



Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah

MODAL INSANI

Kapabilitas Manusia dan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Ahmad Erani Yustika

Desain Perilaku dan Neurosains dalam Perspektif Transformasi Sosial Ekonomi

Novianta Hutagalung

Pendidikan Ilmu Ekonomi di Indonesia

M. Firdaus

Karakter Unggul, Kesuksesan Gemilang

Hermawan Kartajaya

Modal Insani Untuk Perekonomian

Elfindri

***Inspiration not Perspiration:* Menghindari Jebakan Negara Berkembang dengan Pembangunan Manusia yang Handal dan Trampil**

Mohamad Ikhsan

Membangun Sumber Daya Manusia di Daerah: Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Telisa & Wijianto

Peran *Human Capital* dalam Menyongsong Indonesia Maju

Wasiaturrahma

Bisakah Modal Insani Memajukan Negara

Wing Wahyu Winarno



PENERBIT

Bidang Pengembangan Akademik & Riset Pengurus Pusat ISEI

Pemimpin Umum

Perry Warjiyo

Penanggung Jawab

Solikin M. Juhro

Ketua Dewan Redaksi

Hermanto Siregar

Dewan Editor Ahli

Christantius Dwiatmadja
Suharnomo
Jaka Sriyana
Yohanes B. Kadarusman
M.Firdaus
Sahara

Manajemen Redaksi

Anika Faisal
Lisawati
Aviliani
Yoga Affandi
Antonius Widodo

Redaktur Pelaksana

Firman Sihol Parningotan

Wakil Redaktur Pelaksana

Jonathan Ersten Herawan

Keuangan

Efrilia Sukmagraha,

Desain dan Layout

Najmah Faisal
Fabritio Paulus Kumowal

Kantor Redaksi

Achmad Kusnadi
Nuni Purwahyuni,
Suswanto
Rudi Rianto

Disclaimer:

Opini, laporan dan informasi yang dimuat dalam majalah ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi redaksi Warta ISEI.

ISEI MENYAPA

Sambutan Penanggung Jawab WARTA ISEI 01

OPINI

Kapabilitas Manusia dan Ekonomi Berbasis Pengetahuan 03
Ahmad Erani Yustika

Inspiration not Perspiration: Menghindari Jebakan Negara Berkembang dengan Pembangunan Manusia yang Handal dan Trampil 05
Mohamad Ikhsan

Modal Insani Untuk Perekonomian 08
Elfindri

Pendidikan Ilmu Ekonomi di Indonesia 09
M. Firdaus

Karakter Unggul, Kesuksesan Gemilang 11
Hermawan Kartajaya

Desain Perilaku dan Neurosains dalam Perspektif Transformasi Sosial Ekonomi 13
Novianta Hutagalung

Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing 18
N.S. Aji Martono

Membangun Sumber Daya Manusia di Daerah: Kunci Menuju Indonesia Emas 2045 19
Telisa & Wijianto

Peran Human Capital dalam Menyongsong Indonesia Maju 21
Wasiaturrahma

Bisakah Modal Insani Memajukan Negara 23
Wing Wahyu Winarno

Relevansi Pendidikan dan Industri di Provinsi Banten 25
Hady Sutjipto

Kota Solo Sebagai Pelopor TPID 27
Lukman Hakim

Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 29
Andri Ronaldo Pasaribu

Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Aksebilitas Kredit Usaha Rakyat 31
Bintang Oka Firmansyah

OPINI

Mencari Matahari: Memberdayakan Perempuan dan Mewujudkan Kewirausahaan Sosial 33
Retno Suminar

Keterampilan Digital Sebagai Modal Utama Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Daerah 35
Arifai Ilyas

RESENSI BUKU

Birokrasi Inovatif 36
Agus Nompitu

Laporan Kegiatan ISEI Cabang

Laporan ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat 38

Laporan Kegiatan ISEI Pusat

Diskusi Panel: Strategi Pengembangan Hilirisasi Industri, Ketahanan Pangan, dan SDM Unggul 40

Pelantikan Pengurus Pusat ISEI 41

The 47th Federation of ASEAN Economic Association Conference 42

ISEI Ajak Akademisi Produktif Menulis 44

Pelaksanaan Seminar Kajian Kebijakan Publik 5.0 45

ISEI Dorong Akselerasi Akreditasi & Indeksasi Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (EMBA) 47

ISEI Workshop Series #2: Running to Big Data Era 48

ISEI MENYAPA

Oleh **Solikin M. Juhro**
Sekretaris Umum PP ISEI

Pada era globalisasi yang semakin pesat ini, salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menciptakan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Salah satu kunci utama untuk mencapainya adalah dengan mengoptimalkan modal insani (human capital). Modal insani bukan sekadar aspek jumlah angkatan kerja, melainkan juga kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi besar dalam hal ini, namun seringkali kualitas sumber daya manusianya masih terbatas. Melalui perspektif Romer's Model dalam teori pertumbuhan ekonomi endogen, artikel dalam edisi Warta ISEI kali ini mencoba menggali bagaimana modal insani dapat menjadi faktor pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks Indonesia.

Paul Romer, seorang ekonom pemenang Nobel, mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tradisional seperti modal fisik dan tenaga kerja, tetapi juga oleh akumulasi pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan oleh sumber daya manusia. Dalam Romer's Model, perkembangan teknologi dan inovasi dipengaruhi langsung oleh tingkat kualitas modal insani. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas, inovasi, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan perspektif ini, penting bagi Indonesia untuk tidak hanya fokus pada kuantitas tenaga kerja, tetapi lebih mengutamakan pengembangan kualitas modal insani. Dalam artikel ini, dibahas berbagai solusi konkret yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi Indonesia, seperti ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global.

Salah satu solusi yang dibahas adalah pentingnya membangun karakter unggul. Dalam konteks Romer's Model, kualitas individu sangat mempengaruhi kapasitas inovasi dan

produktivitas. Pembentukan karakter unggul yang berlandaskan pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kedisiplinan akan menciptakan modal insani yang tidak hanya kompetitif tetapi juga produktif. Sebagai contoh, upaya memperkuat pendidikan karakter sejak dini dapat mengoptimalkan potensi generasi muda untuk menciptakan solusi-solusi inovatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain karakter, kompetensi teknis yang relevan dengan perkembangan zaman menjadi aspek lain yang krusial. Salah satu tantangan utama Indonesia adalah rendahnya tingkat keterampilan kerja, terutama keterampilan digital. Transformasi digital yang sedang berlangsung saat ini menuntut adanya peningkatan kapasitas modal insani dalam bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan keterampilan digital harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam menyusun program pelatihan yang efektif untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing dalam dunia digital.

Pentingnya sertifikasi dan pengurangan tingkat NEET (*Not in Education, Employment, or Training*) juga menjadi fokus utama dalam membangun modal insani. Sertifikasi keterampilan yang diakui secara nasional dan internasional akan memberi jaminan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. Dengan meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan serta memberikan peluang untuk sertifikasi, kita dapat mengurangi jumlah NEET yang saat ini masih cukup tinggi di Indonesia.

Di samping itu, dampak dari program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas modal insani. Program ini memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga miskin, namun dengan syarat bahwa anak-anak mereka tetap bersekolah. Dengan demikian, PKH tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas modal insani jangka panjang. Program ini, jika dikelola

dengan baik, dapat mengurangi kesenjangan pendidikan dan mendorong generasi muda untuk lebih berdaya saing.

Terakhir, pembangunan diaspora yang berkualitas juga menjadi aspek penting dalam memperkuat modal insani. Diaspora Indonesia memiliki potensi besar untuk membawa kembali pengetahuan, investasi, dan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Dengan memfasilitasi dan membina hubungan yang baik dengan diaspora, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi luar negeri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.

Melalui pendekatan yang holistik, seperti yang digariskan dalam teori Romer's Model, Indonesia dapat meningkatkan kualitas modal insani yang pada gilirannya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Artikel dalam edisi Warta ISEI kali ini memberikan solusi konkret dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut dan mengajak kita semua untuk berperan aktif dalam mewujudkan visi ekonomi masa depan yang lebih baik.



TRANSAKSI DI LUAR NEGERI

DENGAN POKET VALAS DI

**my
BCA**

**16 MATA UANG
ASING**

**DEBIT/TARIK TUNAI
TANPA KONVERSI KURS**

**TOP UP
VALAS 24/7**

AKTIFKAN SEKARANG

bca.id/poket

#NYAMANNYAMENDUNIA

Opini

Kapabilitas Manusia dan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Oleh Prof Ahmad Erani Yustika

Guru Besar FEB Universitas Brawijaya & Ekonom Senior Indef

Laporan terbaru Bank Dunia (2025) yang bertajuk “*World Development Report 2024*”, menyebutkan hanya ada 34 negara berpendapatan menengah yang berhasil naik ke pendapatan tinggi sejak tahun 1990. Banyak faktor yang bisa ditelisik sebagai sebab kesulitan banyak negara tersebut menggapai pendapatan tinggi. Bank Dunia menyebut “*technological infusion*” sebagai salah satu tiang penyebabnya. Pertumbuhan ekonomi bukan cuma perlu investasi, tapi juga *infusion*, dalam wujud teknologi. Penjelasan ini amat relevan dengan situasi Indonesia hari ini yang tengah berjuang keras menuju negara berpendapatan tinggi. Sehingga, pekerjaan prioritas pemerintah yang mesti ditangani segera ialah penguasaan teknologi. Sungguh pun begitu, penguasaan teknologi membutuhkan syarat adanya pendalaman pengetahuan. Tanpa pengetahuan yang memadai, maka teknologi tidak akan pernah bisa digenggam. Jadi, saat ini penguatan kapabilitas manusia merupakan batu bata yang harus disusun agar kemajuan ekonomi bisa direngkuh.

Berikutnya, data menarik ini juga perlu diketahui publik. Pada 1700 – 1850, kontribusi Asia terhadap PDB dunia nyaris mencapai 60%. Setelah itu perekonomian Asia terus melemah dan puncaknya terjadi pada 1950 ketika donasinya cuma tinggal 15% terhadap ekonomi global. Usai tempo itu, aktivitas ekonomi Asia secara perlahan mulai menggelembung lagi. Saat ini angkanya telah mendekati 40%, persis kembali ke masa dekade 1850-an. Proyeksi berikutnya, pada 2050 kontribusi ekonomi Asia akan menuju periode emas tersebut (abad 18 – 19), di mana sumbangannya terhadap ekonomi dunia mencapai 52% (Azis, 2021). Mencermati perkembangan mutakhir rasanya kalkulasi itu akan menjadi kenyataan, karena perekonomian China, Jepang, India, Korsel, dan Indonesia terus merangsek secara meyakinkan meninggalkan pertumbuhan ekonomi AS dan negara Eropa lainnya. Pendeknya, saat ini merupakan abad Asia, di mana Indonesia merupakan salah satu pemain vital.

Pengetahuan dan Kelembagaan

Pada masa silam, kemajuan ekonomi suatu negara ditentukan oleh kekayaan

sumber daya alam (SDA). Namun, tesis itu runtuh karena dalam perjalanannya banyak negara kaya SDA malah jatuh sebagai bangsa miskin. Setelah itu, ditengarai pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh tingkat kepadatan penduduk. Negara yang memiliki tingkat intensitas penduduk rendah dianggap memiliki peluang mensejahterakan rakyatnya. Fakta ini juga terbantahkan sebab negara dengan tingkat kepadatan penduduk penuh, seperti Jepang dan Hongkong, mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Sebaliknya, Brazil dan Rusia, yang tingkat kepadatan penduduknya relatif rendah, pendapatan per kapitanya lebih kecil ketimbang Swiss atau Jerman. Pandangan mutakhir menganggap teknologi sebagai faktor penjas suatu negara bisa mengakumulasi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Teknologi membawa suatu negara selalu bisa memperbaiki kegiatan ekonomi menjadi efisien dan membuat pekerjaan lebih produktif. Inilah pangkal rujukan dari abad “*knowledge-based economy*” (EBP).

Tidak berhenti di situ, dalam dua dekade terakhir muncul diskursus yang lebih pekat mengenai pentingnya faktor “kelembagaan” (*institutions*) sebagai variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kelembagaan -berbeda dengan faktor pendidikan, SDA, penduduk, dan teknologi- dipandang bisa menerangkan fenomena perbedaan pencapaian kemajuan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) antarnegara. Acemoglu dan Robinson (2012) menyebutkan kelembagaan merupakan sumber terpenting yang menentukan suatu negara/bangsa gagal atau maju perekonomiannya. Negara yang kelembagaannya inklusif (*inclusive economic institutions*) cenderung kinerja ekonominya bagus. Sebaliknya, negara yang kelembagaannya jeblok/ekstraktif (*extractive economic institutions*) mempunyai kinerja ekonomi yang buruk, misalnya pertumbuhan ekonomi yang tidak berlanjut, produktivitas yang rendah, dan kesejahteraan ekonomi terpuruk.

Biaya Transaksi dan Destruksi

Negara yang berhasil menggabungkan EBP dan kelembagaan yang solid terbukti menghasilkan capaian yang gemilang,

misalnya Korsel dan Finlandia. Sekiranya terdapat lima karakter pokok dari negara yang mengkombinasikan kedua hal tersebut. *Satu*, mengkonstruksi karakter manusia yang berorientasi kepada penciptaan, bukan pengekor. Tujuan inovasi melampaui efisiensi (pada tahap awal). *Dua*, pendidikan formal dan informal ditujukan menambah stok pengetahuan (kedalaman terhadap bidang yang ditekuni), bukan gelar kesarjanaan. *Tiga*, insentif kelembagaan inovasi mesti lebih besar ketimbang aturan main spesialisasi, baik pada lingkup negara, korporasi, maupun komunitas. *Empat*, alokasi dan jenis kegiatan di dalam mata anggaran publik dirombak supaya menghasilkan inovasi dan invensi (penemuan), bukan bersandarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dipenuhi ongkongan regulasi. *Lima*, institusi pendidikan dan riset menjadi jangkar ekonomi. Ia memimpin sekaligus mendorong arah pembangunan ekonomi.

Model produksi pada masa lalu mengandalkan pembagian kerja/spesialisasi agar produktivitas tenaga kerja meningkat. Terkait kelembagaan, tugas terpenting yang harus dikerjakan agar muncul spesialisasi adalah menciptakan aturan main yang efisien (Yeager, 1999). Indikator vital efisiensi kelembagaan bisa dilihat dari tinggi/rendahnya biaya transaksi. Semakin rendah biaya transaksi yang muncul dari kegiatan ekonomi, berarti menunjukkan kelembagaan yang efisien; demikian sebaliknya. Terdapat dua jalur yang jamak dilakukan. *Pertama*, membuat regulasi (formal maupun informal) yang menjamin kepastian pelaku ekonomi melakukan transaksi. *Kedua*, memperkuat sistem penegakan apabila terjadi masalah dalam proses transaksi. Biaya transaksi yang rendah akan memperbesar pasar karena kenaikan permintaan (*demand*). Selanjutnya, dorongan pasar yang kian besar inilah yang menuntut pembagian kerja. Ujungnya, spesialisasi memacu tingkat produktivitas dan menjadi sumber utama pertumbuhan (kinerja) ekonomi.

Kelembagaan semacam itu masih penting, namun makin kehilangan relevansi sejak “*endogenous technical change theory*” yang bersandar teknologi dan inovasi menjadi tulang punggung

ekonomi (Maradana et al, 2017). Schumpeter memperkenalkan konsep *creative destructive* untuk menjelaskan kebutuhan 'merusak' konsep lama digantikan penciptaan baru, khususnya yang bertujuan menangkap peluang, metode produksi dan transportasi, desain pasar, dan bentuk baru dari organisasi industrial. Implikasinya, operasionalisasi kelembagaan dalam pendekatan dinamis ini berbeda dengan kasus pertumbuhan statis. Kelembagaan (aturan main) dalam pendekatan dinamis fokus mengubah perilaku organisasi agar terjadi perubahan dan peningkatan teknologi sehingga produk yang dihasilkan kompetitif di pasar. Peran terpenting dari kelembagaan adalah mendesain aturan yang membuat korporasi mempunyai insentif melakukan proses 'perusakan kreatif', yang bertepi kepada penemuan teknologi baru dan memicu pertumbuhan ekonomi.

Literasi dan Kapabilitas Organisasi

Narasi di atas mesti diterjemahkan dalam wujud strategi dan rencana aksi yang konkret agar bisa dieksekusi secara sistematis. Salah satu strategi yang rumit dikerjakan adalah penyiapan kualitas warga negara dalam bentuk pemerataan literasi yang tegak. Proses pembelajaran dan kurikulum digeser ke intensi "daya baca" dan invensi. Pekerjaan rumah ini bakal panjang, namun mesti dicicil sejak saat ini, bahkan sekarang pun sebetulnya sudah terlambat. Setiap kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan (dan Kebudayaan) merupakan ruang baru yang wajib dikaitkan dengan tujuan besar EBP tersebut. Siswa mendalami bidang yang menjadi minat dan keahliannya. Mereka adalah subyek belajar yang difasilitasi peningkatan kemampuan literasinya secara terus-menerus. Pada ujungnya mereka akan menjadi kelompok "*creative destruction*" pada wilayah kerja masing-masing. Jika ini terpantulkan dengan kuat, maka invensi menjadi keniscayaan pada cabang kerja sektor publik maupun privat.

Seperti yang telah dikupas di bagian depan, bila invensi menjadi kebutuhan dan cara pandang baru, maka orientasi dan kapabilitas organisasi (publik dan privat) mesti digeser dari semula konsentrasi kepada efisiensi menjadi praktik yang menekankan pembukaan ruang inovasi dan penghargaan terhadap penemuan. Aturan main (kelembagaan) diarahkan mengubah perilaku organisasi/korporasi yang melebarkan ruang bagi munculnya inovasi dan perkembangan teknologi. Ranking indeks inovasi global Indonesia pada posisi 54 (WIPO, 2024). Ini merupakan kemajuan yang pesat karena pada 2020 peringkat inovasi Indonesia masih berada di peringkat 89. Kultur riset

di lembaga pendidikan dan penelitian difokuskan memproduksi temuan yang menyokong aktivitas ekonomi (dibutuhkan sistem informasi dan anggaran terintegrasi). Korporasi memberikan alokasi anggaran riset yang lebih besar sebagai investasi inovasi, seperti praktik yang lazim di negara maju. Kelembagaan di sektor publik harus didekonstruksi melalui desain struktur birokrasi yang landai (flat). Penyebaran sumber daya fungsional lebih dominan ketimbang struktural.

Pilar terakhir dari EBP adalah jejaring ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi). Perekonomian berjalan dengan kerumitan dan persinggungan antarpelaku yang kian tinggi sehingga tidak mungkin dikerjakan tanpa membangun jejaring. Jejaring tersebut mengaitkan dengan aneka pemangku kepentingan, aktor dan institusi global, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemangku kepentingan bersinggungan dengan daya dukung untuk mengarusutamakan pengetahuan, inovasi, dan teknologi informasi sebagai tulang punggung aktivitas ekonomi. Pasar dalam negeri tidak cukup sebagai pengungkit pada skema EBP, namun mesti menjangkau pasar yang lebih luas. Implikasinya, aktor dan institusi pada level global menjadi faktor penarik berjalannya ekonomi berbasis pengetahuan. Investasi teknologi informasi mesti merambah ke seluruh pelaku ekonomi, termasuk usaha mikro dan kecil. Seluruh gerak ini akan menjadikan pengetahuan sebagai kredo baru perekonomian.

Pengetahuan dan Pemerataan

Salah satu problem utama bangsa ialah ketimpangan ekonomi, yang sebagian berakar dari kepincangan pengetahuan. Pertanyaannya, bagaimana kemajuan pengetahuan ini tidak berpungguan dengan ikhtiar membangun pemerataan pembangunan? Modal apa yang dimiliki bangsa? Sekurangnya tiga kapital inti dimiliki bangsa pada aras ini. *Pertama*, di bidang ekonomi kreatif negara memiliki kekayaan sistem nilai yang telah membentuk aneka kebudayaan sehingga mozaik pengetahuan tidak pernah kehilangan pasokan. Mainan anak-anak, misalnya, yang dibuat dari sumber daya sekitar (pelepeh pisang, bambu, buah jeruk, batang kelapa, dan lain-lain) merupakan sebagian replika kecil betapa pengetahuan lokal berkembang dan berpijak di bumi. Pendidikan formal mungkin terbatas, namun pengetahuan bisa berpuncak dari kreativitas setempat. Kecerdasan tersebut tentu tersambung dari pintu budaya, seperti yang tersembul dari ritual saat menanam atau memanen, arsitektur rumah tradisional,

atau kecantikan motif wayang dalam desain batik. Sepanjang ragam budaya tersebut tidak redup, maka ekonomi (kreatif) akan terus hidup.

Kedua, pendalaman akses informasi (internet, digitalisasi, aplikasi) mesti menysar seluruh pelosok negara dan lapis warga. Saat ini internet telah menjangkau sekitar 70% populasi. Artinya, sekitar 200 juta penduduk terpapar dalam jejaring besar global perekonomian. Mereka tidak saja memiliki makna sebagai ceruk pasar yang gigantik, tetapi juga produsen gagasan yang dapat dikonversi menjadi pemasok (barang/jasa) otentik. Sumber pengetahuan saat ini diperoleh dari akses dan jejak digital tersebut. Kemajuan aktivitas ekonomi di lokasi/negara lain secara cepat bisa dipelajari dan dimodifikasi. Demikian pula, ekonomi yang dikembangkan di dalam negeri secara gegas dapat dipajang di etalase aplikasi yang bakal ditengok oleh warga dunia. Jika akses tersebut diimbangi dengan literasi pemanfaatan dan pengolahan informasi menjadi kegiatan produksi, maka berpotensi menjadi ledakan ekonomi yang bersumber dari kekuatan jejaring pengetahuan. China adalah teladan konkret dalam melakukan mobilisasi digitalisasi menjadi hegemoni ekonomi.

Ketiga, sekarang telah berjalan proses perpindahan kultur secara massif di Indonesia karena adanya pola pergerakan berikut: tenaga kerja – standarisasi – urbanisasi – komersialisasi. Selama 40 tahun terakhir eskalasi peningkatan kapabilitas pengetahuan tenaga kerja terus berlangsung, sehingga standarisasi keterampilan (sertifikasi) menjadi identitas baru ekonomi. Mereka ini pula yang mendikte pasar dalam banyak sisi: jenis produksi, mekanisme distribusi, dan metode konsumsi. Jadi, sumber mata air utamanya ialah kapabilitas manusia. Ini pula yang terjadi di negara maju. Jepang, Korsel, Singapura, Taiwan, Hongkong, dan China kemajuannya jelas dihelai oleh pengetahuan dan teknologi. Korsel mengurus pendidikan secara serius sejak dekade 1970-an dan China mengirim para mahasiswa ke negara-negara maju sejak dekade 1990-an. Literasi menjadi mantra pengembangan produk olahan yang memiliki nilai tambah (hilirisasi). Pengetahuan yang direlaskan dengan dunia usaha menjadi daya ledak pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional di masa depan.

Opini

Inspiration not Perspiration: Menghindari Jebakan Negara Berkembang dengan Pembangunan Manusia yang Handal dan Trampil.

Oleh **Prof Mohamad Ikhsan**

Guru Besar FEB Universitas Indonesia & Pengurus Pusat ISEI Bidang II

Pada tahun 1994 dalam majalah *Foreign Affairs*¹, pemenang Nobel Ekonomi Profesor Paul Krugman dengan mengutip hasil penelitian koleganya Prof Alvin Young mengkritik sumber pertumbuhan di negara-negara Asia Timur termasuk Indonesia lebih disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang memeras keringat (*perspiration*) dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari proses inovasi (*inspiration*). Krugman mengatakan bahwa model pembangunan seperti ini tidak akan berkelanjutan dan membuat negara Asia Timur keluar dari jebakan negara berkembang (*middle income trap*). Pikiran Krugman sejalan pula dengan teori ekonomi pembangunan baru (*endogenous growth model*) yang menekankan pada inovasi dan memungkinkan terciptanya *increasing return to scale*.

Dalam konteks Indonesia, kita dapat melihat dalam Sejarah pembangunan ekonomi yang terjadi selama periode pertumbuhan tinggi sebelum Krisis Ekonomi tahun 1997. Dalam periode 1969-1996, Indonesia tumbuh dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,2 persen per tahun selama lebih dari 30 tahun dan membuat *Growth Commission* yang diketuai pemenang Nobel Ekonomi lainnya, Michael Spence dan beranggotakan pemenang Nobel lainnya seperti Robert Solow dan sejumlah *prominent persons* dari seluruh dunia – menggolongkan Indonesia sebagai anggota *the elite 13 countries*. Kelompok elite - belakangan menjadi the elite 15 dengan Vietnam dan India sebagai negara *late comers*- dianggap berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi 6+ selama 3 dekade dan menurunkan kemiskinan secara signifikan. Keberhasilan Indonesia memasuki *the elite 13 countries* di masa lalu tidak terlepas dari kebijakan anggaran yang mengalokasikan sebagian besar rezeki migas rahun 1970an dan 1980an untuk pembangunan sumber daya manusia seperti yang dibuktikan oleh



pemenang Nobel Ekonomi lainnya Profesor Esther Duflo dalam jurnal ekonomi yang paling bergengsi the *American Economic Review*.²

Apakah tren ini berlanjut seperti di masa lalu? Hal ini pertanyaan besar. Minimal ada beberapa isu di sini. Pertama, kebutuhan SDM ini berbeda karena proses transformasi ekonomi berada pada tahapan dimana kualitas lebih sensitif dan menentukan *cost competitiveness*. Peran tenaga kerja tidak sekedar cukup untuk sekedar ngerti tulis baca seperti tahun 1980an tetapi memerlukan *skill* tertentu. Kedua, tingkat keahlian pun makin beragam dan memerlukan *niche market* yang berbeda. Ketiga, kelihatannya pasokan tenaga kerja tidak mampu menyediakan permintaan ini yang ditandai dengan hasil survei iklim investasi menunjukkan *mismatch* yang cukup serius terhadap permintaan dan pasokan tenaga kerja. Keempat, kekakuan pasar kerja akibat rigiditas dalam peraturan di pasar kerja membuat biaya transisi dari proses transformasi meningkat cukup signifikan dibandingkan di era 1980an.

2. Duflo, Ester (2001), *Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from a Usual Policy Experiment* "American Economic Review vol. 91, no. 4, (pp. 795-813)

Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi dan Mutu Modal Manusia

Teori Pertumbuhan baru menunjukkan pendidikan mempengaruhi sumber pertumbuhan melalui dua saluran yaitu melalui peningkatan kuantitas (stok) pendidikan dan kualitasnya. Pengalaman sejarah ekonomi di negara industri dan negara industri baru menunjukkan bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan penting dari pendidikan juga kita alami dalam sejarah perkembangan ekonomi Indonesia. Secara potensial pendidikan dan kesehatan akan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memperkuat posisinya dalam kehidupan, masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan. Peningkatan tingkat pendidikan wanita misalnya bukan hanya meningkatkan kemampuan kapasitas pendapatannya, melainkan pula dapat memperbaiki kesehatan reproduktifnya, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak, yang keduanya akan memperbaiki kemampuan generasi sekarang dan masa mendatang.

Investasi dalam pendidikan juga akan memproteksi pekerja dan memperbaiki jaminan keamanan baik fisik maupun keuangan yang merupakan elemen penting dalam aspek kualitas hidup. Pendidikan bersama-sama kondisi

1 Krugman, Paul, East Asia Miracle: Perspiration or Inspiration, *Foreign Affairs*, November-December, 1994

kesehatan yang baik akan memperbaiki kemampuan orang miskin untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan termasuk dalam peningkatan mobilitas kerja antar sektor. Investasi dalam pendidikan juga akan dapat memfasilitasi *social inclusion* jika pendidikan terdistribusikan dan tertargetkan dengan baik untuk kelompok miskin. Perbaikan pendidikan juga akan memperbaiki proteksi lingkungan. Perbaikan pendidikan wanita akan menurunkan jumlah anggota keluarga yang pada gilirannya akan menurunkan tekanan lingkungan. Dengan pendidikan yang baik, memungkinkan masyarakat mengolah informasi dengan lebih baik untuk memelihara lingkungan.

Tidak bisa sekedar menambah jumlah penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun tetapi harus mampu meningkatkannya hingga pendidikan 12 tahun sekaligus memperkuat kualitas lulusan perguruan tinggi.

Pendidikan berperan juga dalam kinerja penurunan kemiskinan di Indonesia terutama di daerah pedesaan. Seperti diketahui, penurunan kemiskinan pada era 1970an hampir sepenuhnya dijelaskan oleh peningkatan produktivitas di sektor pertanian tepatnya produktivitas di sektor padi. Peningkatan produktivitas ini tidak akan mungkin terjadi tanpa upaya untuk memberantas tingkat buta huruf dengan program Paket A dan B. Bagaimana mungkin kita mendisiminasikan teknologi baru – revolusi hijau – kepada petani dengan keadaan petani kita yang buta huruf. Peningkatan kemampuan menulis dan membaca telah membantu upaya penyuluh pertanian untuk mentransfer teknologi dalam produksi padi.

Namun seperti yang di sampaikan di atas, perkembangan pola persaingan dalam abad ke 21 mendatang dimana peran teknologi dan sumber daya manusia – dan kombinasinya – sangat menentukan kemampuan suatu negara untuk mampu untuk bersaing di pasar internasional. Kita tidak bisa sekedar menambah jumlah penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun tetapi harus mampu meningkatkannya hingga pendidikan 12 tahun sekaligus memperkuat kualitas lulusan perguruan tinggi.

Kualitas pendidikan juga terkait dengan investasi kita dalam bidang kesehatan terutama upaya kita untuk meningkatkan gizi ibu dan balita termasuk kualitas kesehatan mereka. Peningkatan kualitas gizi mereka akan menentukan *human endowment* di masa mendatang. Hal ini

menunjukkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tidak bisa dipisahkan. Artinya kita harus meningkatkan nilai investasi kita baik dalam pendidikan dan kesehatan secara bersamaan.

Apa yang terjadi dengan kondisi sumber manusia kita?

Kondisi sektor pendidikan dan kesehatan kita diwarnai dengan beberapa karakteristik umum yaitu: *Pertama*, akses pendidikan 9 tahun dan kesehatan dasar secara nasional tampaknya sudah mampu kita penuhi. Tetapi jika kita gunakan data lebih rinci berdasarkan daerah maupun gender, masih terlihat perbedaan yang cukup tinggi. Misalnya dalam pendidikan di beberapa daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, *schooling ration*nya sudah mencapai hampir 100% baik untuk SD maupun SMP. Tetapi untuk beberapa daerah lain seperti Papua, NTT tingkat pencapaian sekolah ini masih sangat rendah.

Serupa pula jika dilihat berdasarkan gender, secara *aggregate* untuk pendidikan SD tidak ada perbedaan yang mencolok tetapi mulai dari tingkat SMP ke atas perbedaan mulai terlihat dan makin kentara. Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan bidang kesehatan. Di daerah yang per kapita tinggi umumnya masalah kesehatan dasar sudah memenuhi standar dan kondisi gizi ibu dan anak pun sudah lebih baik dari rata-rata nasional. Namun di beberapa daerah yang pendapatan per kapitanya rendah, kondisi kesehatan dasar masih jauh dari memadai.

Terlihat terdapat hubungan yang kuat antara kondisi pencapaian dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar dengan kondisi kesejahteraan rumah tangga. Di daerah yang kondisi kesejahteraannya lebih baik (tingkat kemiskinannya rendah), keadaan kualitas manusianya cenderung lebih baik. Dan sebaliknya daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi mempunyai korelasi yang kuat dengan kualitas kualitas manusianya juga lemah. Hal ini memberikan implikasi bahwa kebijakan yang membebaskan pungutan (*free school*) belum akan cukup untuk mendorong peningkatan akses pendidikan dan kesehatan dasar bagi keluarga miskin. Perlu ada kebijakan tambahan untuk memberikan insentif akan keluarga miskin bersedia untuk meningkatkan aksesnya kepada pendidikan dan kesehatan dasar.

Karakteristik *kedua* adalah menyangkut kualitas. Jika dibandingkan dengan kondisi sumber daya manusia di negara-negara lain kualitas manusia Indonesia jelas lebih rendah. Survey yang dilakukan oleh OECD menunjukkan capaian skor PISA siswa-siswa Indonesia secara rata-rata lebih buruk dibandingkan dengan negara-

negara lain. Namun melihat pencapaian prestasi siswa Indonesia dalam pelbagai *Math and Sciences Olympics*, persoalan ketimpangan dalam kualitas juga menjadi persoalan seperti halnya dalam kuantitas akses tersebut. Namun persoalan kualitas ini hampir merata terlihat di seluruh daerah di Indonesia.

Rendahnya kualitas penduduk Indonesia terisyarat pula dari relatif kurang menggembirakan tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh survey yang dilakukan oleh *International Productivity Organisation* (IPO).

Implikasi dan Strategi Pembangunan Manusia Indonesia

Implikasi pertama adalah perlunya peningkatan investasi sektor publik dalam bidang pembangunan manusia, walaupun kesenjangan tidak terlalu besar. Walaupun sejak tahun 2005, alokasi anggaran untuk pembangunan manusia meningkat secara signifikan. Dalam bidang pendidikan alokasi anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah telah hampir mencapai norma yang berlaku di negara yang pendapatan menengah. Dalam bidang kesehatan walaupun standar kebutuhan belum tercapai tetapi investasi sektor public telah meningkat secara signifikan dalam 2 tahun ini. Peningkatan secara besar-besaran ini dimungkinkan karena pengalihan subsidi BBM – yang sebagian jatuh kepada kelompok pendapatan tinggi – untuk digunakan bagi peningkatan sumber daya manusia Indonesia ini.

Kebutuhan investasi sektor publik ini terutama dibutuhkan untuk mengejar masalah kualitas termasuk untuk meningkatkan insentif bagi guru dan dosen. Anggaran sektor publik hendaknya diprioritas untuk pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu perlu dipikirkan quasi-fiscal policy melalui *tax deduction scheme for education*. Langkah ini akan meningkatkan partisipasi *phylantropy* dalam membiayai pendidikan. Sebagai contoh endowment yang dimiliki oleh Harvard University dari para alumninya hampir menyamai cadangan devisa Indonesia.

Kedua, upaya untuk meningkatkan akses kepada keluarga miskin. Upaya ini akan menyelesaikan pula disparitas akses pendidikan berdasarkan daerah. Kebijakan tambahan yang dibutuhkan berupa pemberian insentif tambahan untuk keluarga miskin untuk mengirimkannya ke sekolah dan menjamin agar gizi ibu dan balita dari keluarga miskin meningkat. Dewasa ini pemerintah telah memperkenalkan kebijakan baru berupa pemberian bantuan tunai bersyarat terkait dengan bidang pendidikan. Program ini tergolong sukses dilakukan di banyak

negara Amerika Latin dalam meningkatkan akses dan kualitas manusia keluarga miskin. Fokus kebijakan ini akan dilakukan pada daerah yang disparitas pencapaian akses pendidikan dan kesehatan dasar tinggi. Kebijakan Makanan Bergizi (MBG) benar secara konsep tetapi pengalaman banyak negara maju atau negara berkembang yang meniru membutuhkan keterampilan atau porsi resep tertentu yang tepat agar bisa mencapai sarannya secara efektif dan efisien.

Ketiga, perbaikan efisiensi dalam sisi penawaran pendidikan dan kesehatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan guru/dosen serta tenaga medis dan paramedis cenderung tinggi³. Hal ini memberikan pemikiran jika rasionalisasi dilakukan dan proceed dari rasionalisasi tersebut dikembalikan dalam bentuk peningkatan insentif bagi tenaga yang ada, kebutuhan dana tambahan tidak banyak diperlukan.

Keempat, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, pertama, dengan meningkatkan secara terus menerus standar nasional melalui ujian standardisasi seperti ujian negara; kedua, mendorong kompetisi dengan membiarkan pasar pendidikan terbuka terhadap sekolah asing.⁴ Keterbukaan ini akan memberikan akses yang lebih baik bagi keluarga yang berpendapatan menengah ke bawah menikmati pendidikan publik yang lebih baik, mengingat rumah tangga berpendapatan atas cenderung akan mengirim putra-putrinya ke sekolah swasta; Ketiga, dengan meningkatkan

kualitas pengajar dengan memberikan insentif yang lebih baik bagi pengajar dan ujian standardisasi secara berkala.⁵ Yang harus dicegah adalah dampak *moral hazard* yaitu peningkatan insentif tidak diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu upaya peningkatan insentif ini harus pula diikuti dengan perbaikan *governance*. Hal ini berlaku dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Keempat, *review* kurikulum secara berkala untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja. Kelima, mendorong kerjasama pendidikan dengan industri dapat berupa peningkatan kerjasama riset atau kerjasama pengajaran.⁶ Keenam, pemberian beasiswa kepada mahasiswa pasca sarjana ke luar negeri ke universitas dunia melalui program LPDP terus dilanjutkan. Secara bertahap, sebagian dana tersebut dialokasikan pula untuk memperkuat dan memperbaiki kualitas PTN di dalam negeri. Ketujuh, riset di tingkat universitas pula harus dilakukan secara selektif (*niche market approach*).⁷

Kelima, pentingnya untuk memperkenalkan dan sekaligus meningkatkan *computer literacy* pada tingkat pendidikan sedini mungkin. *Knowledge based economy* tidak akan bisa lepas dari kemampuan kita menggunakan komputer. Lihat saja dalam kegiatan produksi tekstil dan *garment*. Teknologi mesinnya sudah berubah total dimana peranan komputer

makin dominan sejak disain hingga dalam proses pemasaran. Hal yang sama juga berlaku untuk sebagian besar kegiatan ekonomi. *Upgrading* sistem pendidikan dengan menggunakan komputer ini tentu membutuhkan biaya. Tetapi masalah kendala investasi ini bisa di atasi dengan melakukan identifikasi yang tepat kebutuhan infrastruktur keras dan lunak untuk setiap tingkatan. Tentu untuk tingkat dasar, kita tidak memerlukan komputer generasi baru. Cukup yang sederhana saja. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, dengan memperkenalkan komputer sederhana seperti yang diperkenalkan oleh MIT dengan komputer \$ 100. Banyak *philanthropies* yang mau berpartisipasi untuk membiayai program ini. Langkah yang lain melakukan adopsi program *recycle* komputer generasi lama. Program gradasi yang demikian akan mengurangi kebutuhan biaya dan sekaligus dapat mempercepat peningkatan computer literasi di Indonesia.

Keenam, peningkatan kualitas rumah tangga Indonesia tidak selamanya harus melalui lembaga formal. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas Balai Latihan Kerja. Fungsi BLK ini secara efektif berjalan di Singapore misalnya sehingga kualitas dan produktivitas tetap terjaga dan meningkat.

Terakhir, reformasi pasar kerja untuk menghilangkan distorsi dan memperkuat kembali fleksibilitas di pasar kerja Indonesia.

3 Bukan rahasia lagi dosen di PTN jarang mengajar, sementara pemerintah terus harus membayar gajinya.

4 Fleksibilitas yang diberikan untuk membuka kelas internasional (*double degree*) merupakan langkah awal dan merupakan suatu *win-win solution*. Namun upaya ini belum cukup perubahan secara mendasar perlu dilakukan baik memberikan kebebasan bagi PTN untuk menentukan *tuition* dan sistem renumerasi

5 Di PT sistem tenor akan membantu meningkatkan kualitas pengajar hingga tingkat tertentu

6 Langkah ini dilakukan oleh misalnya Citibank yang meminta staf seniornya untuk menjadi pengajar tamu di FEUI.

7 Hampir tidak mungkin kita bersaing di bidang AI atau IT dengan Stanford, MIT atau Harvard. Tetapi kita bisa bersaing jika mengembangkan riset dalam pertanian misalnya untuk ketahanan atau padi. Dugaan saya, kita akan mampu bersaing dalam bidang kesehatan tropis.



Modal Insani Untuk Perekonomian

Oleh Prof Elfindri
Guru Besar FEB Universitas Andalas

Dalam pandangan ekonom klasik, fungsi produksi (Q) diperankan melalui tenaga kerja (L) dan modal (K). Kontribusi tenaga kerja akan semakin terlihat dari besaran koefisiennya, semakin besar nilai koefisien elastisitas tenaga kerja (Le), maka menghasilkan nilai tambah terbentuk dengan padat tenaga kerja, dihasilkan oleh manusia setempat relative terhadap modal yang digunakan.

Ketika pandangan ekonom moderen Robert Solow dan dilanjutkan oleh Daron Acemoglu, menemukan bahwa teknologi (t), fungsi manusia tidak lagi sebagai pekerja, namun sebagai penghasil pembaharuan. Melalui inovasi produk dan kerja. Schumpeter telah mengajukan begitu berperannya enterpreuneral manusia dalam menghasilkan barang dan jasa jasa.

Dipercaya kemudian bahwa ekonomi akan semakin tumbuh ketika peranan teknologi semakin tinggi. Teknologi yang dihasilkan oleh manusia yang berilmu, yang semakin efisien dan kompetitif.

Dari pandangan klasik, neo klasik pertumbuhan ekonomi moderen serta *entrepreneurship*, keberadaan manusia menjadi dasar untuk investasi dalam perekonomian sebuah bangsa. Investasi manusia berkembang pesat, hingga investasi itu memenuhi manusia yang holistik dan sempurna.

Neuromomics dan Insanomic

Manusia yang diperankan oleh tenaga kerja, dan menghasilkan produktivitas dan inovasipun tidak hanya bisa dipandang sebagai labor.

Secara statistik, tenaga kerja selain dari jumlah diperlukan kualitas manusia persoalan yang juga penting. Bagaimana investasi untuk hasilkan kualitas manusia, dan apa dimensinya yang perlu diperhatikan?

Pertanyaan mendasar kualitas manusia yang diformulasikan selama ini terbatas pada aspek pemenuhan "jenjang pendidikan" dan stok kesehatan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin dipercaya sebagai instrumen kebijakan untuk hasilkan manusia yang bermutu. Dalam perjalannya, manusia tumbuh dan

berkembang tidak saja pada kualitas inteligensia (Qk), mengingat inteligensia hanyalah sebagai salah satu komponen otak manusia yang perlu dipenuhi menurut pandangan neurosains. Semakin baik investasi terhadap manusia, semakin baik kognitive yang tinggi diperlihatkan melalui "critical thinking dan problem solving".

Kapasitas kognitif akan lahirkan teknologi dan inovasi yang positif dan rasional. Jika produk dihasilkan semakin efisien dan beragam, memerlukan biaya produksi yang semakin rendah. Muaranya pada persaingan bersaing pasar pada posisi menguntungkan.

Investasi pada kognitif tidaklah cukup, mengingat masih banyak komponen neuro manusia yang perlu disiapkan. Motorik pembentuk keterampilan akan membuat produktivitas tersendiri, melalui proses pendidikan kejuruan, magang serta "learning by doing". Proses ini akan meningkatkan kapasitas keterampilan (skills) manusia, ini merupakan komponen kualitas insani masuk Qt.

Sementara kualitas insani berikutnya adalah berkaitan dengan pembangunan karakter (Qss), melalui pembiasaan bekerja keras, kemampuan berkomunikasi, disiplin dan etika, kolaborasi, dan bersemangat. Unsur *soft skills* ini melengkapi kualitas manusia yang diajukan oleh Daniel Coleman. Sehingga *soft skills* (Qss) merupakan bagian investasi manusia investasi yang tidak kalah pentingnya.

Berikutnya ketika kognitif, psikomotorik dan *soft skills* merupakan elaborasi dari manusia insani, disiapkan masih ada satu dimensi yang jarang dilihat sebagai *stock* manusia insani. Dia adalah manusia yang X-talent, manusia yang talenta eksekusi terlatih, penerobos, inisiatif dalam bahasa Agama, manusia pengamal yang tangguh.

Dalam skala mikro, X-talent merupakan unsur manusia yang kuat dan terasah pada tahap eksekusi, inisiatif, x oleh Coleman dinyatakan sebagai *execution leaderships* (X-talent). Komponen ini mesti dijadikan sebagai salah satu target lanjutan dalam menghasilkan manusia Indonesia insani.

Mengingat manusia Indonesia juga memiliki budaya dan agama, maka bu-

daya lokal yang baik (yang bersandarkan agama) bisa dijadikan sebagai "indigenous culture" yang mesti diperhitungkan.

Mengingat Agama memandu manusia untuk hidup baik di dunia untuk tujuan akhirat, maka diperlukan juga menyiapkan keimanan dan kesolehan. Sehingga kesolehan merupakan modal religious yang perlu dijamin semakin lengkap sosok stock manusia yang dihasilkan.

Dalam konsepsi manusia insani, merdeka tumbuh dan berkembang secara sempurna, tidak *selfish*, memiliki kepekaan lingkungan, dan sosial yang jujur, tidak koruptif.

Intinya dalam meningkatkan stock modal insani adalah menghasilkan manusia manusia yang sempurna, dimana kuat kognitive (Qk), kuat keterampilan (Qt), bagus soft skills (Qss), X-Talent, dan mantap Modal agamanya (Qr), ini akan membuat kesempurnaan dari penciptaan manusia dan menjadikan manusia semakin holistik keberadaanya.

Investasi Manusia Insani

Manusia insani adalah manusia emas. Dia tidak saja tumbuh dengan kepintaran saja, namun disertai kejujuran, keimanan yang terpartri ke dalam hatinya, sehingga manusia insani tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan, resah dengan dominasi kapitalis, dan *concerns* masalah *deprivation* hasil pembangunan.

Manusia insani bukanlah yang hanya menargetkan nilai duniawi, namun menyiapkan diri dari segala tindakannya untuk kepentingan jangka panjang. Ekonomi yang dihasilkan adalah yang berkeadilan, yang juga menjaga keberlangsungan alam dan lingkungan.

Manusia insani merupakan manusia emas. Dia dihasilkan dengan keimanan yang *given*, menggunakan otak tingkat tinggi, berbuat baik. Kemudian Allah memberikan kemudahan baginya ilmu yang bermanfaat. Sebuah isi dan pesan dari salah satu ayat Al-Qahfi 13. Insyallah.

Opini

Pendidikan Ilmu Ekonomi di Indonesia

Oleh **Prof Muhammad Firdaus**

Guru Besar FEM IPB dan Pengurus ISEI Pusat Bidang V

Sudah lebih dari satu dekade Fakultas Ekonomi di Indonesia berubah nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di IPB, karena sejak berdirinya pada tahun 2005, namanya sedikit berbeda yaitu Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Keduanya mempunyai filosofi yang sama, bahwa jurusan atau prodi Ilmu Ekonomi atau jamak dikenal dengan sebutan prodi Ekonomi dan Studi Pembangunan (ESP) di Indonesia, adalah entitas yang secara keilmuan berbeda dengan program studi manajemen, bisnis dan atau akuntansi. Nama Fakultas Ekonomi (saja, tanpa bisnis) masih bisa dijumpai di beberapa universitas ternama seperti Oxford dan Cambridge, namun hanya membawahi departemen atau bidang ilmu ekonomi saja. Banyak universitas ternama yang menempatkan Ilmu Ekonomi dalam rumpun Fakultas Ilmu Sosial. Di beberapa negara kadang memilih istilah sekolah untuk satu bidang ilmu, didirikan sekolah Ilmu Ekonomi. Universitas di Malaysia dan Indonesia pun sudah mulai mengubah nama fakultas menjadi atau mendirikan sekolah. Sedangkan untuk manajemen dan akuntansi, di banyak universitas peringkat atas dunia, ada di bawah pengelolaan sekolah bisnis. Selain itu karena ekonomi bisa dimaknai secara luas dari epistemologi yaitu berkenaan dengan urusan rumah tangga individu (*household economics* dll.), rumah tangga perusahaan/industri (berbagai fungsi manajemen dan akuntansi) serta "rumah tangga" negara (fiskal, moneter dll.).

Mahasiswa yang memilih prodi Ilmu Ekonomi atau ESP, secara umum ingin memperoleh pengetahuan dan analisis yang lebih kuat serta mendasar dalam ilmu ekonomi. Di universitas ternama di dunia, dari survei diketahui bahwa motivasi sebagian lulusannya memang sejak awal ingin nantinya memperdalam ilmu ekonomi ke jenjang master atau doctoral. Lebih banyak mahasiswa setelah lulus dari prodi Ilmu Ekonomi ingin melanjutkan ke bidang yang tidak linier sepenuhnya, seperti manajemen dan bisnis, hukum, politik sosiologi dll. atau mengambil program sarjana mayor-minor atau *double degree* Ilmu Ekonomi dengan area tersebut. Hal yang wajar sesuai dengan salah satu definisi manajemen atau bisnis misalnya, sebagai

kombinasi ilmu dan seni/pengalaman; dimana Ilmu Ekonomi adalah *core science* dari manajemen. Di Indonesia lulusan prodi ESP banyak yang bekerja di Kementerian dan Lembaga termasuk Bank Indonesia, lembaga riset/*think-tank* serta perbankan. Dasar analisis yang kuat (mikro dan makro dikombinasikan dengan metode kuantitatif seperti ekonometrika, *game theory* dll.) menjadi modal dasar lulusan ESP direkrut berbagai institusi tadi.

Nama institusi, bentuk organisasi, kurikulum dan cakupan program yang ditawarkan memang sangat bergantung setidaknya pada dua hal: historis dan sumberdaya manusia. Pada universitas peringkat atas dunia, secara umum setelah lulus dari mata kuliah-mata kuliah dasar ekonomi seperti pengantar ekonomi, mikro dan makro, matematika, statistika dan ekonometrika; mahasiswa ditawarkan berbagai konsentrasi yang bergantung pada dua hal tadi. Ragam konsentrasi keilmuan disediakan seperti ekonomi kesehatan, ekonomi ketenagakerjaan, ekonomi lingkungan, ekonomi publik, ekonomi regional, keuangan dan perbankan bahkan perilaku organisasi serta pengambilan keputusan. Di Indonesia rata-rata konsentrasi yang ditawarkan mencakup ekonomi moneter, ekonomi industri atau pembangunan dan ekonomi regional. Tentu beberapa universitas besar melebarkan konsentrasi bergantung pada SDM yang dimiliki. Di Indonesia, untuk program sarjana, kurikulum ilmu ekonomi masih "mewajibkan" penulisan tugas akhir/skripsi. Bahkan tidak jarang di beberapa universitas, bahkan yang bukan terakreditasi unggul, skripsi harus ditransformasi sampai menjadi publikasi di jurnal, baru sarjana ekonomi dapat diperoleh.

Sebenarnya universitas yang bereputasi sangat baik serta di negara-negara yang sistem pendidikannya lebih maju, kemerdekaan untuk memilih jalur yang ditempuh sampai selesai jenjang pendidikan tertentu relatif lebih besar. Sebagai contoh gelar "honor" tidak harus selalu dikonotasikan dengan seorang sarjana menyelesaikan program dengan skripsi (*undergraduate thesis*). Bisa saja gelar honor diberikan dengan

pendalaman beberapa mata kuliah. Pilihan untuk menyelesaikan pendidikan dengan honor atau tidak, diingatkan bukan karena motivasi (pernah diwacanakan di kita) karena nanti akan menempuh master atau doctoral, tetapi karena betul-betul mempunyai ketertarikan terhadap riset dan analitis yang lebih tinggi.

Ada satu kesan yang saya petik dari pengalaman beberapa waktu bertugas di Malaysia, karena banyak berhubungan dengan perguruan tinggi; juga bertemu mahasiswa yang berasal dari Indonesia yang jumlahnya menempati posisi kedua setelah China, atau mirip dengan jumlah mahasiswa Indonesia di Australia. Sarjana yang lulus dari universitas di Indonesia terkesan lebih unggul dari sisi kemampuan berpikir analitis, sedangkan yang lulus dari universitas di Malaysia lebih mampu dalam hal praktikal danantisipasi pada perubahan lingkungan global. Dari sisi kurikulum, secara praktis beban tugas akhir seperti skripsi bukan menjadi penekanan utama di Malaysia, namun mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan magang (kerja), yang dilakukan menjelang wisuda selama 3 sampai 4 bulan di dunia industri. Jadi magang dilakukan saat tugas akhir yang jauh





lebih sederhana dari skripsi (*final year project*) sudah selesai dikerjakan. Dunia industri pun dapat memperoleh *talent* untuk dapat direkrut, dimana tidak sedikit mahasiswa dari Indonesia memperoleh hal itu karena terkesan lebih adaptif dan semangat pencapaian target yang lebih tinggi dibanding rekan dari tempatan.

Yang menarik, salah satu faktor pendorong jumlah mahasiswa dari Indonesia yang besar di Malaysia, karena selain yang memang berasal dari lulusan sarjana di Indonesia, juga banyak yang langsung melanjutkan ke jenjang master, disebabkan kemerdekaan dalam memilih kurikulum yang ditawarkan, yaitu *coursework*, *by research* atau *mix-mode* (seperti S2 di Indonesia). Seperti halnya kita yang banyak sekali mengirimkan *awardee* LPDP ke Belanda dan Inggris, banyak yang menyelesaikan master dalam waktu kurang dari setahun karena tidak adanya kewajiban *thesis* apalagi publikasi ilmiah; disertai dengan pemadatan waktu kuliah dengan memanfaatkan waktu musim panas. Di tingkat doktoral lah penekanan kewajiban riset mandiri diberlakukan. Menempuh jalur doktor *by research* juga tidak dipersulit dengan syarat kandidat harus terlebih dahulu memiliki publikasi ilmiah terindeks Scopus seperti di beberapa program pasca sarjana di Indonesia. Dengan penyusunan proposal selama

semester pertama, studi doktor memang banyak yang dapat diselesaikan dalam waktu 3 tahun atau kurang. Tentunya, apapun bentuk program yang ditawarkan, capaian kualitas lulusan memang dapat dijamin karena sistem asesmen yang sudah sangat baik, profesional dan independen serta kompetensi SDM dosen yang mumpuni. Di banyak universitas yang Ilmu Ekonominya menduduki peringkat atas dunia, mahasiswa jenjang master saat menempuh perkuliahan, yang sering digabung dengan mahasiswi kandidat doktor, jika dapat melewati *passing grade* untuk tiga mata kuliah yaitu mikro, makro dan ekonometrika, mereka langsung dapat meneruskan ke jenjang doktoral.

Saya meyakini dengan jaminan dan penataan "kemerdekaan" kurikulum pendidikan ilmu ekonomi yang semakin baik, kemampuan lulusan universitas di Indonesia dapat bersaing saat berhadapan dengan lulusan perguruan tinggi kelas atas dunia. ISEI yang di dalamnya terdapat LAMEMBA, menjadi pengawal kualitas lulusan pendidikan ilmu ekonomi, yang didirikan bersama IAI dan AFEBI. Belajar dari program akreditasi internasional yang bereputasi, instrumen akreditasi yang lebih berorientasi pada (rencana) pencapaian luaran atau *outcome* dapat menjadi indikator bagi prodi untuk penataan kurikulum. Keter-

libatan asesor yang berasal dari pengu-rus dan anggota ISEI wilayah, baik dari akademisi maupun praktisi, merupakan wujud dari amanah pendirian LAM yang dibentuk oleh organisasi profesi. Secara khusus, bidang V di ISEI yang menangani akademik dan riset, dapat terus berkoordinasi dengan ISEI wilayah untuk pelaksanaan *workshop*, seminar, pelatihan dan publikasi ilmiah. Sehingga misi ISEI untuk berkontribusi pada dunia akademisi, dunia industri dan kebijakan publik terus semakin nyata. Sebagai contoh keterampilan penggunaan alat analisis yang bukan lagi perangkat lunak "bajakan", berbagai teknik pengambilan keputusan dengan metode kuantitatif dapat menyumbang pengayaan kurikulum pendidikan ekonomi di perguruan tinggi. Mari kita terus berkolaborasi.

Opini

Karakter Unggul, Kesuksesan Gemilang

Oleh **Hermawan Kartajaya**
Founder and Chair of MCorp

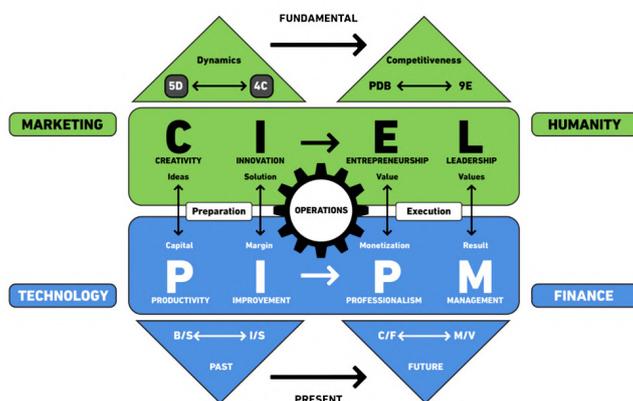
Indonesia adalah negara yang penuh akan potensi. Tidak hanya dari sumber daya alamnya, seperti minyak kelapa sawit dan nikel, Indonesia juga sarat akan potensi dari segi ketenagakerjaan. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia (281.603.800 juta jiwa – BPS 2024), serta peringkat kedua setelah India dalam jumlah universitas (3.277 universitas – Statista 2023), Indonesia memiliki kapasitas untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu bersaing di lanskap profesional dalam dan luar negeri. Tetapi, apabila dilihat dari kondisi aktualnya, meskipun Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja terbesar di Asia Tenggara, sebanyak kurang lebih 142 juta jiwa (Asean Briefing 2024), tenaga kerja Indonesia relatif kalah saing apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara, seperti Singapura dan Vietnam.

Ini disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kualitas pendidikan yang lebih rendah, sulitnya akses untuk menerima pendidikan dan pelatihan yang sesuai dan berkualitas, serta ketidaksesuaian antara

kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan dari perusahaan. Selain dari kemampuan akademis dan teknis, tenaga kerja di Indonesia juga harus dilengkapi oleh atribut-atribut yang mampu meningkatkan kualitas mereka. Terdapat tiga poin yang ingin saya sampaikan terkait kualitas yang wajib dimiliki untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia.

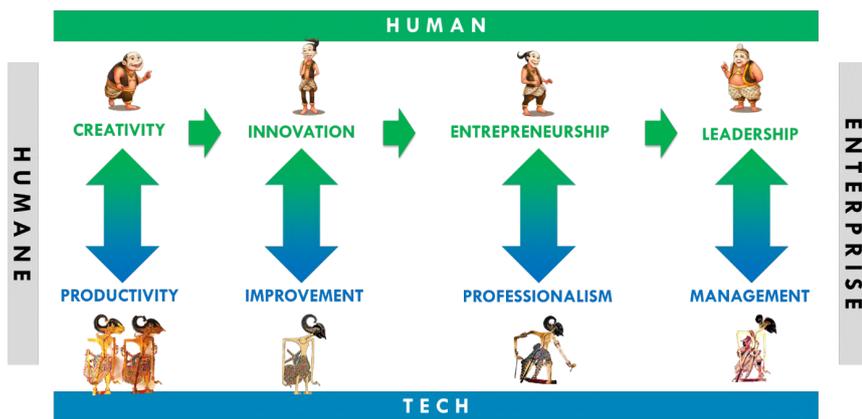
Menurut saya, setiap orang harus memahami dan memiliki atribut CIEL dan PIPM, seperti yang tergambar di model berikut, yang saya sebut sebagai Omnihouse Model untuk menjadi sebuah individu unggulan. Ini merupakan model yang digunakan sebagai acuan utama untuk buku saya bersama Prof. Philip Kotler dan Jacky Mussry yang berjudul *Entrepreneurial Marketing: Beyond Professionalism to Creativity, Leadership, and Sustainability* yang diluncurkan di Jenewa, Swiss pada tahun 2023.

Omnihouse Model sendiri terinspirasi dari kata dalam bahasa Latin – *omnis* – yang berartikan “menggabungkan”, dipadukan dengan kata bahasa Inggris – *house* – yang melambangkan suatu tempat, fasilitas, ataupun bisnis. Secara sederhana, Omnihouse Model sendiri terdiri dari atribut-atribut yang wajib dimiliki, yakni *creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership* (CI-EL) serta *productivity, improvement, professionalism, dan management* (PI-PM). Sebagai seorang individu, tidaklah cukup untuk menjadi seseorang yang PI-PM. Keempat atribut



Gambar 1: Omnihouse Model

Sumber: Wiley, 2023.



Gambar 2: Punokawan (Human) x Pandawa (Tech)

Sumber: Wiley, 2023.

tersebut juga harus dilengkapi oleh CI-EL: kreativitas, inovasi, jiwa kewirausahaan, dan jiwa kepemimpinan yang baik.

CI-EL terinspirasi dari kata dalam bahasa Perancis – *ciel* – yang berarti langit. Sehubungan dengan itu, saya sering sampaikan bahwa apabila anda ingin mencapai langit, anda harus memiliki atribut-atribut CI-EL! Kedepannya, saya berencana untuk menjadikan Omnihouse Model ini sebagai acuan dan dikembangkan secara lebih lanjut untuk menciptakan *Balanced Scorecard* baru, yang akan dibahas lebih lanjut dalam buku terbaru saya bersama Prof. Philip Kotler dan Jacky Mussry, yang semoga akan rilis di tahun-tahun mendatang.

Saya sangat bangga dengan konsep CI-EL PI-PM yang menjadi inti dari Omnihouse Model, karena itu merupakan kesempatan saya untuk membawa budaya Indonesia ke dalam suatu publikasi internasional. Saat merumuskan konsep CI-EL PI-PM ini, saya merasa tertantang untuk memasukkan unsur Indonesia kedalam konsep saya. Saya menggunakan karakter-karakter wayang untuk atribut-atribut yang ada di CI-EL dan PI-PM.

PI-PM dilambangkan dengan lima tokoh Pandawa: Nakula-Sadewa, Arjuna, Bima, dan Yudhistira. Sedangkan CI-EL sendiri dilambangkan dengan tokoh wayang Punokawan: Bagong, Petruk, Gareng, dan Semar. Dalam kisah wayang Jawa, diceritakan bahwa Kurawa mampu dikalahkan oleh Pandawa sebagai penasihat mereka. Sama halnya dengan konsep CI-EL PI-PM ini, atribut PI-PM yang dimiliki oleh seorang individu juga harus dilengkapi oleh atribut CI-EL untuk mencapai kesuksesan.

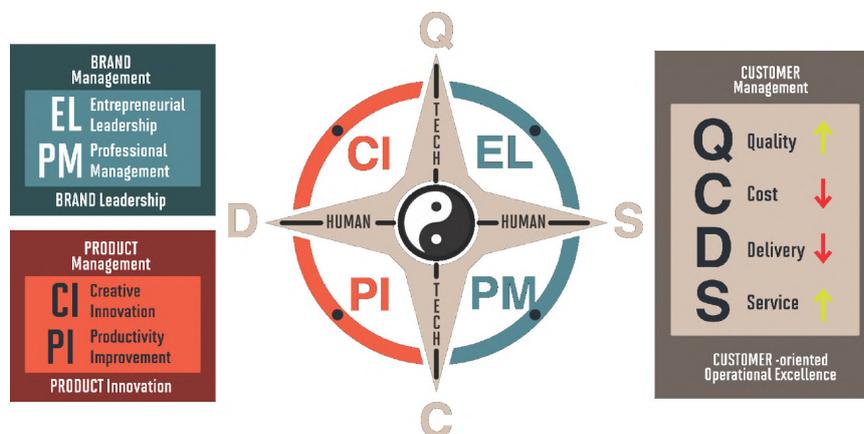
Apabila diperhatikan secara seksama, memang CI-EL dan PI-PM ini merupakan sebuah dikotomi, dua kelompok atribut yang sangat berbeda. Namun, kemam-

puan seseorang untuk mengkonvergensi dikotomi CI-EL dan PI-PM inilah yang akan membedakan kualitas seorang individu dibandingkan dengan yang lainnya. Di era teknologi sekarang ini, internet, media sosial, dan kecerdasan artifisial/AI semakin populer digunakan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Penting sekali untuk mampu mengadopsi *mindset* CI-EL dan PI-PM. Saya yakin, secara cepat atau lambat AI akan mengubah lanskap ketenagakerjaan, dimana akan banyak pekerjaan yang digantikan dengan AI untuk efisiensi. Namun, AI tidak akan mampu menggantikan sisi kreatif, inovatif, kewirausahaan, dan kepemimpinan dari manusia. Oleh karena itu, penting untuk memiliki CI-EL agar menjadi individu dengan daya saing tinggi dan tidak tergantikan oleh teknologi seperti AI.

Dikotomi tersebut akan dijelaskan secara lebih detil dalam model Human x Tech Compass. Model kompas ini terbagi menjadi dua, yaitu *tech* dan *human*, dimana konsep CI-EL dan PI-PM dihubungkan dengan konsep *quality-cost-delivery-service* (QCDS), yang

menjadi konsep acuan dalam buku saya bersama Philip Kotler dan Jacky Mussry, *Reimagining Operational Excellence: Inspiration from Asia* yang terbit pada tahun 2024. Berdasarkan model Human x Tech Compass, *quality* dan *cost* berada di sumbu *tech*, sedangkan *delivery* dan *service* berada di sumbu *human*. Berdasarkan sumbu-sumbu tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi akan membantu peningkatan dalam segi kualitas dan penyesuaian biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa. Meskipun teknologi canggih dapat membantu dalam proses pengantaran dan mendukung dalam pemberian pelayanan, manusia masih tidak tergantikan, memegang pengaruh yang sangat besar dalam *delivery* dan *service* yang diberikan kepada pelanggan dikarenakan emosi dan perasaan masih menjadi bagian penting dalam *delivery* dan *service*. Human x Tech Compass ini juga mengadopsi prinsip yin-yang, menyeimbangkan antara manusia dan teknologi untuk mencapai satu tujuan.

Berikut merupakan beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada pembaca Warta ISEI. Saya harap konsep-konsep yang saya sampaikan di kesempatan ini dapat menjadi inspirasi kepada semua dan dapat diaplikasikan secara luas untuk membantu meningkatkan kualitas individu di Indonesia dan membantu Indonesia menghasilkan tenaga kerja berkualitas yang mampu bersaing dalam skala global serta memajukan perekonomian nasional.



Gambar 3: Human x Tech Compass

Sumber: MCorp, 2024

Opini

Desain Perilaku dan Neurosains dalam Perspektif Transformasi Sosial Ekonomi

Oleh **Novianta Hutagalung, MBA**
CEO & Co-Founder of SNH Consulting

Presiden Donald Trump setelah terpih mengumumkan proyek investasi dalam jumlah fantastis: 500 Miliar Dollar AS. Tiga sosok kunci teknologi dunia yang berada di balik project ini adalah Sam Altman (*founder of Open AI*), Larry Ellison (*founder Oracle*) dan Masayoshi Son (*Soft Bank*). Project ini diberi nama Project Stargate. Project Stargate konon ditujukan untuk mengembangkan pusat data dan infrastruktur open AI (*artificial intelligence*) yang memungkinkan AS sebagai kekuatan nomor satu dunia untuk teknologi tersebut. Tak lama berselang, dunia dikejutkan dengan munculnya Deepseek, teknologi open AI asal Cina. Teknologi ini dipercaya mampu mengimbangi kinerja Chat-GPT (open-AI) Amerika, namun dengan biaya pengembangan yang jauh lebih murah. *Artificial Intelligence* kini menjadi fondasi baru transformasi ekonomi di berbagai negara.

Bagaimana dengan Indonesia?

Penunjukkan Prof. Stella Christie seorang *cognitive scientist* (ilmuwan yang mempelajari otak, pikiran dan kecerdasan manusia) sebagai wakil Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi merupakan angin segar di negeri ini. Namun demikian, perubahan yang terjadi semakin bersifat disruptif. Kehadiran teknologi AI Deep Seek menunjukkan bahwa apa yang telah kita ketahui saat ini (*the known*) tak lagi cukup. Ada sedemikian banyak tantangan di masa depan yang belum diketahui (bersifat *unknown*) yang cenderung ambigu (*ambiguous*), sarat kebaruan (*full of novelty*) dan *complex*.

Sayangnya kita kerap terjebak pada asumsi dan perilaku masa lalu. Kendatipun istilah-istilah baru (seperti revolusi *industry 4.0*, AI, modal manusia, digitalisasi, govtech *Government Technology*, transformasi birokrasi, kurikulum Merdeka, dan lainnya telah digunakan luas, dalam praktiknya, manusia seringkali dipersepsikan sebagai entitas yang homogen. Artinya pikiran, perasaan, kepribadian dan perilaku yang ada dalam diri manusia bersifat tunggal. Manusia dianggap selalu dapat berpikir rasional.

Dalam kenyataannya, pikiran dan perilaku manusia tak sepenuhnya bersifat rasional dan sejalan dengan kepentingan jangka panjangnya. Contoh konkret dari hal ini adalah lonjakan jumlah transaksi judi online di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Di tengah asumsi terjadinya penurunan daya beli dalam masyarakat, volume transaksi judi online justru memperlihatkan peningkatan yang dramatis. Selama periode Januari sampai Maret 2024 saja, jumlah transaksi judi online mencapai Rp. 600 Trilyun! Angka ini sangat fantastis!

Jika asumsinya manusia selalu mampu berpikir rasional **seharusnya** mereka mampu bertindak menggunakan akal sehat. Uang yang digunakan untuk judi on-line, **seharusnya** dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif dan berdampak positif dalam jangka panjang. Manusia ternyata tak selalu mengandalkan akal sehat dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan. Manusia kerap kali berpikir, mengambil keputusan dan berperilaku menyimpang dari yang seharusnya.

Manusia memiliki beragam komponen dalam otak dan tubuh (dan senyawa kimia) yang mengandung dimensi fisiologis, perseptual, emosional, sosial, kognisi dan habitual. Dalam kondisi minim tekanan misalnya logika bisa saja berperan dominan. Sebaliknya dalam situasi dan kondisi yang berbeda (seperti ketika dalam situasi terancam), sisi-sisi emosional dalam diri manusia bisa saja secara cepat mengambil alih ("melumpuhkan") kemampuan berpikir logis.

Limbic system merupakan bagian dalam otak yang dianggap bertanggungjawab atas sisi-sisi sosial-emosional manusia. Bagian ini membuat manusia tak selalu imun dari perilaku bertahan hidup (*survival*) yang cenderung bersifat tak rasional.

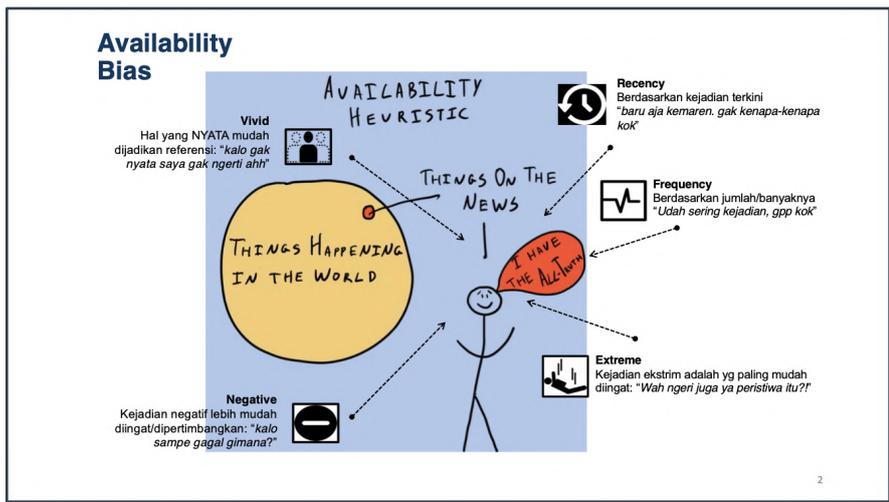
Stress yang disebabkan oleh tuntutan hidup sehari-hari misalnya dapat mengaktivasi system limbik dalam otak. Tekanan yang memicu stem limbik inilah yang dapat menyebabkan perilaku

"meledak-ledak" bersifat minim kesadaran yang berisiko tinggi. *Limbic system* (pusat emosional dalam otak ini) bekerja sangat kuat dan cepat. Ketika *limbic system* bekerja secara dominan maka bagian *prefrontal cortex* dalam otak melakukan peran eksekutif (merencanakan, mengarahkan dan berpikir reflektif dan kontekstual) dan peran pengereman (*breaking role*) seolah lumpuh. *Limbic system* yang kuat dan cepat mengalahkan peran *prefrontal cortex* yang lambat dan "lemah".

Faktor kebiasaan yang bersifat skematis dan asosiatif juga berperan kunci dalam pengambilan keputusan dan perilaku. Misalnya saja reformasi birokrasi. Program ini telah digaungkan sejak lama. Namun kuatnya kebiasaan lama seolah menghambat efektivitasnya. Kebiasaan bekerja prosedural dan birokratis bisa jadi hambatan yang sulit untuk diatasi. Kebiasaan bersifat otomatis. Sifat otomatis dari kebiasaan mengandung implikasi bahwa manusia tak perlu menggunakan sumber daya mental yang "mahal" (sarat energi) untuk berpikir, mengambil keputusan dan bertindak. Kebiasaan memungkinkan otak untuk menghemat energi.

Konteks berulang menimbulkan hubungan asosiatif, kebiasaan dan skema yang sangat familiar dalam otak. Otak lalu menjadikan konteks berulang ini sebagai referensi (acuan) dalam bertindak. Oleh karenanya keputusan dan tindakan dilakukan hanya dengan mengandalkan *data base* yang telah tersedia di otak (*availability heuristic*).

Pemenang hadiah Nobel ekonomi, Herbert Simon dan Daniel Kahneman menyebutkan kecenderungan ini sebagai WYSIAT (*What you see is all there is*). Bias dalam berpikir dan bertindak ini cenderung cepat, intuitif dan otomatis. *Availability heuristic* menunjukkan bahwa otak kerap kali bekerja cepat dengan menggunakan jalan pintas (*mental short cut*). Hal ini dapat menjelaskan mengapa kita kerap kali terjebak dalam keputusan dan perilaku yang bersifat instan dan parsial (sepotong-sepotong).



Gambar 1: Availability Bias
Sumber: Decision Lab (thedeclarationlab.com)

Tak hanya itu, kemampuan kognisi pada suatu saat tertentu juga dapat dipengaruhi oleh faktor fisiologis (fungsi organ tubuh). Kondisi fisik (kelelahan, gangguan tidur) dapat mempengaruhi kinerja mental. Sebaliknya pikiran (seperti stress) juga mengganggu otak dan tubuh. Singkatnya, tubuh dan senyawa kimia tubuh dan otak bekerja mempengaruhi kondisi mental. Banyak kajian mengungkapkan bahwa tidur merupakan fondasi utama yang mempengaruhi kemampuan kognitif (kemampuan mencerna) dan perilaku.

Kerja harus diimbangi dengan tidur dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Tidur memungkinkan otak bekerja melakukan rekonstruksi mental dan biologis yang sangat penting bagi kinerja mental yang optimal. Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sleep-wake cycle disebut juga sebagai (*circadian rhythm*). Ritme tersebut diatur melalui pusat jam biologis (*master clock*) di otak.

Pikiran dan perilaku manusia juga dipengaruhi oleh **atensi** dan **persepsi**. Bagi para penentu kebijakan, kepatuhan mungkin menjadi perhatian utama sehingga dianggap penting. Bagi masyarakat kebanyakan, bertahan hidup sehari-hari adalah hal yang sangat penting. Singkatnya, tidak setiap orang memiliki persepsi yang sama tentang hal-hal yang dianggap penting atau tak penting.

Persepsi tentang apa yang dianggap penting dan tak penting ini dipengaruhi oleh pemicu perseptual. Berbagai hal (obyek) yang ada di sekeliling kita yang kemudian diproses secara bawah sadar oleh sistem inderawi. Isu-isu Sustainability (keberlanjutan), perubahan iklim (*climate change*), digitalisasi, Govtech (*government technology*), open-AI dan investasi dalam pengembangan modal manusia

bisa saja merupakan hal penting yang harus dilakukan. Namun isu-isu tersebut di atas mungkin saja "jauh" dari keseharian realitas hidup masyarakat kebanyakan. Hal ini menimbulkan yang disebut sebagai **distance bias** (penyimpangan berpikir yang ditimbulkan oleh jarak). Akibatnya masyarakat belum beranggapan bahwa hal-hal tersebut penting untuk dipelajari dan dikembangkan.

Usulan Pengembangan Modal berdasarkan Prinsip Neuroscience dan Behavioral Science

Kenyataan dan basis neuroscience dan behavioral science yang didiskusikan di atas dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam mengembangkan model praktis yang relevan dan berdampak bagi proses perubahan transformasional yang dikehendaki. Model Go-Be-PAHAM (Goals-Context-Behavior-PAHAM).

Go merepresentasikan **goals** yang hendak dicapai berdasarkan konteks tantangan dan problematika perubahan yang dihadapi. Goals merupakan hasil atau dampak yang diharapkan. Goals dapat ditetapkan pada tingkatan makro, organisasi dan individual (personal). Idealnya goals merupakan hasil dari proses pemahaman atas perubahan lingkungan yang dihadapi. Dalam konteks organisasi maupun individual, goals biasanya ditetapkan sebagai hasil proses antisipasi masa depan (*foresighting*) dan analisa strategis.

Be merepresentasikan **behavior** (perilaku atau Tindakan). Perilaku dapat terdiri dari tindakan yang diharapkan/dikehendaki (*expected, desirable behavior*) dan perilaku yang tidak diharapkan/dikehendaki (*unexpected/undesirable behavior*). Dalam lingkungan yang bersifat VUCA misalnya, maka perilaku yang dikehendaki dan relevan antara lain adalah berempati,

mengantisipasi masa depan (*anticipating the future*), belajar dan bertumbuh secara terus menerus (*learning and growing*), menyikapi masalah sebagai peluang belajar dan bertumbuh, beradaptasi dengan perubahan, berkolaborasi (*collaborating*), melibatkan (*engaging*), empatik dan inovasi (*innovating*).

Goals adalah hasil/dampak/akibat yang bersifat *lagging*. Sementara **be** (behavior) adalah Tindakan yang dianggap mampu memicu dan mendorong (bersifat *leading*) pencapaian hasil (goals) yang dikehendaki. **Leading** adalah hal-hal yang mendahului hasil. Sementara **lagging** adalah hal-hal yang diharapkan timbul setelah hal-hal yang bersifat mendahului (*leading*) dilakukan.

Behavior yang dikehendaki menjadi fondasi bagi proses pencapaian goals yang ditetapkan. Perilaku yang diharapkan dan dikehendaki mendekati pencapaian *goals*. Sementara perilaku yang tidak dikehendaki menjauh dari pencapaian *goals*. Fokus hanya kepada hasil (*outcomes*) merepresentasikan *fixed mindset* yang cenderung abai terhadap pengembangan *system (context)* yang justru jadi fondasi bagi keberlanjutan pencapaian *goals*.

PAHAM merepresentasikan bagaimana faktor-faktor **Physiology, Attention, Habit, Abilities** dan **Motivation** yang membentuk perilaku yang dikehendaki dapat dikelola dan ditumbuhkembangkan.

Physiology (fisiologi) berkaitan dengan bagaimana tubuh mempengaruhi mental dan sebaliknya. Aspek fisiologis mempengaruhi kemampuan otak dan perilaku. Salah satu komponen fisiologis yang penting adalah kemampuan dalam mengelola ritme sirkadian (siklus tidur dan terjaga).

Sayangnya, berbagai hal dapat menimbulkan gangguan pada ritme sirkadian. Manusia modern saat ini dimungkinkan untuk bekerja dan bersosialisasi tanpa kenal batas waktu. Gangguan (kurang) tidur juga menjadi fenomena masyarakat modern abad-21. Tuntutan kerja dalam lingkungan organisasi abad-21 dapat menimbulkan **beban kerja mental** tinggi.

Untuk itulah, pengembangan modal insani mensyaratkan kemampuan dalam mengelola komponen fisiologis dalam PAHAM secara utuh. Tubuh yang lemah dan tak sehat dapat menyebabkan gangguan pada kemampuan kognisi dan perilaku.

Atensi dan persepsi. **Atensi** mengarahkan sumber-sumber daya mental. Jika atensi yang diberikan terhadap suatu hal

minim, maka intensitas sumber-sumber daya mental yang dialokasikan pun akan turun. Atensi penting dalam proses **neuroplasticity**. Neuroplasticity adalah perubahan struktural dan jejaring otak yang ditimbulkan oleh pikiran (atensi), pikiran dan pengalaman. Singkatnya, transformasi dalam berpikir dan berperilaku dapat mengubah jejaringan syaraf dalam otak.

Sementara itu, gagasan masuk akal namun dianggap tak kongruen (tak mulus diproses berdasarkan skema atau bentuk yang sudah tersedia di otak karena pengalaman berulang di masa lalu) cenderung sulit disimulasikan oleh otak. Kita akan lebih mudah mencerna sesuatu yang dapat disimulasikan dengan lebih mulus (minim hambatan) oleh otak. EV (*electric vehicle*) misalnya saja kendatipun relevan dengan agenda keberlanjutan, dalam kenyataannya membutuh waktu untuk diterima Masyarakat. Masyarakat sejak lama terbiasa dengan mesin ICE (*internal combustion chamber*). Mobil EV tanpa suara bisa saja terkesan asing.

Dalam hal ini, bagaimana mendesain pemicu perseptual yang mampu memicu proses transformasi mental dan emosional menjadi komponen kunci kompetensi yang perlu dikembangkan. Hal ini antara lain mencakup kemampuan dalam mendesain frekuensi (*frequency*), kekinian (*recency*), kenyataan (*vividness*), jarak (*distance, proximity*), wadah (*confinement*), batas-batas (*borders*), daya raih (*affordance*), posisi, arah, ukuran dan kejelasan (*vividness*).

Atensi dan persepsi menjadi salah satu komponen penting dalam PAHAM karena (1) menentukan agenda kunci yang dikehendaki (atau yang tak dikehendaki) (2) mengarahkan perhatian dan penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia (sumber daya mental dan sumber daya lainnya) (3) mendorong terjadinya *brain plasticity* dan (4) mengatasi bias ke arah goals yang relevan dan dikehendaki. Ketidaktepatan atensi menimbulkan ruang bagi terjadinya distraksi.

Habits (kebiasaan). Wendy Wood penulis buku *Bad Habits and Good Habits* dan James Clear penulis *Atomic Habits* mengungkapkan bahwa sebagian (44%) perilaku manusia dipengaruhi oleh **kebiasaan**. James Clear lebih jauh mengungkapkan bahwa kebiasaan dapat dipandang sebagai sistem yang mampu mendorong pencapaian goals (hasil). Pencapaian tujuan dapat mengalami kegagalan bukan karena goals yang ditetapkan. Goals yang ditetapkan bisa saja sangat canggih. Namun jika kebiasaan (sebagai sistem) yang berjalan tak sejalan, goals akan sulit untuk dicapai.

Kebiasaan oleh karenanya dapat menjadi sumbatan (*bottleneck*) atau katalis (*catalyst*) dalam pencapaian goals. Pengaruh kebiasaan dalam pembentukan perilaku begitu kuat karena kebiasaan bersifat otomatis. Kebiasaan membutuhkan sangat sedikit kesadaran dan energi mental. Artinya, kebiasaan mensyaratkan upaya disengaja yang minim.

Kebiasaan (habit) dapat diartikan sebagai perilaku otomatis bawah sadar yang ditimbulkan oleh **pemicu kontekstual** tertentu. Charles Duhigg mengungkapkan bahwa kebiasaan secara sederhana dapat diuraikan dengan **formula CAR** (*cues, action, reward*). Cues adalah konteks yang memicu perilaku (kebiasaan) tertentu. Action adalah perilaku (kebiasaan) tertentu yang dipicu oleh pemicu kontekstual (*contextual cues*). Sementara itu, reward adalah upah sensasi menyenangkan yang diperoleh dan atau diantisipasi dari perilaku (kebiasaan) tertentu.

Formula kebiasaan (CAR) mengungkapkan bahwa konteks yang stabil (berulang) merupakan pemicu kebiasaan yang kuat. Hubungan asosiatif yang kuat kemudian terjadi antara *contextual cues* dengan perilaku (*actions*).

Untuk itu, desain atas kebiasaan merupakan komponen yang tak terpisahkan dari upaya pengembangan modal manusia abad-21. Desain konteks yang mampu membentuk perilaku atau kebiasaan yang diharapkan merupakan salah satu dimensi kunci. Kemampuan dalam mendisrupsi atau mendesain ulang konteks yang menjadi pemicu kebiasaan menjadi sangat kritical.

Pada sisi lain, perubahan kebiasaan juga dapat dilakukan dengan mengubah (memodifikasi) perilaku namun dengan pemicu kontekstual yang sama. Misalnya saja selama bertahun-tahun setiap problematika atau tantangan yang dihadapi (*contextual cues*) disikapi dengan saling mencari kesalahan (*blame game*). Kebiasaan seperti ini dapat menciptakan mentalitas yang rigid (*fixed mindset*) dan budaya pikir dan perilaku saling menyalahkan (*blame game*).

Kebiasaan yang berbeda dapat dikembangkan jika setiap masalah dan problematika disikapi dengan perilaku belajar dan inisiatif inovasi (sebagai perilaku atau kebiasaan yang baru).

Kebiasaan dapat membentuk budaya, identitas dan karakter. Kemampuan organisasi atau individu (di berbagai lingkup dan tingkatan) dalam mengembangkan kebiasaan yang relevan dan berdampak menjadi sangat penting. Memahami mengapa kebiasaan penting untuk dikembangkan (*why*), siapa actor

kunci yang akan dilibatkan (*who*), apa kebiasaan yang dikehendaki (*what*) dan bagaimana cara mengembangkannya (*how*) adalah bagian dari upaya pengembangan modal insani kritical yang harus dikembangkan.

Para pelaku kunci di berbagai ruang lingkup fungsi dan level organisasi, harus memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana faktor kebiasaan berperan dalam proses pembentukan pikiran dan perilaku.

Abilities (kemampuan). **Abilities** menggambarkan kemampuan untuk melaksanakan tindakan atau perilaku yang dikehendaki dalam upaya mencapai *goals* (tujuan dan sasaran) yang dikehendaki. Dalam merespon tantangan lingkungan VUCA. Kemampuan esensial (*essential abilities*) yang dibutuhkan dalam merespon tantangan dan problematika perubahan ke depan. Pertanyaannya kemudian adalah pendekatan praktis *neuroscience* dan *behavioral science* seperti apa yang dapat dilakukan?

Prinsip **neuroplasticity** (*brain plasticity*) dan **growth mindset** (*behavior*) adalah salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan *abilities*. *Neuroplasticity* secara sederhana dapat diartikan sebagai proses reorganisasi jaringan otak yang memungkinkan interkoneksi antara bagian (baca; sel-sel saraf) yang satu dengan yang lainnya.

Kemampuan Memahami dan Mengelola Sinyal Interoception dan Exteroception.

Otak dan pikiran secara konsisten menerima sinyal informasi dari berbagai sumber. Sinyal yang diterima dapat diproses dari sumber-sumber internal dari dalam tubuh dan eksternal dari luar tubuh. **Insula** dan **default mode network** (DMN) dalam otak memproses sinyal-sinyal yang bersumber dari tubuh untuk kemudian mengintegrasikannya ke dalam emosi dan pengambilan Keputusan. Bagaimana otak mengenali sinyal-sinyal yang bersumber dari dalam tubuh disebut sebagai **interoception**. Sebaliknya, otak juga mencerna, memproses dan merespon berbagai sinyal yang ditangkap dari sumber-sumber eksternal di luar tubuh. Jaringan kunci yang berperan dalam hal ini adalah **prefrontal cortex** dan **central executive network** (CEN). Bagaimana otak mengenali dan memproses sinyal-sinyal yang bersumber dari luar tubuh disebut **exteroception**.

Di era VUCA, kemampuan mencerna sinyal *interoception* dan *exteroception* untuk kemudian menentukan prioritas yang relevan dan berdampak sangat berperan penting. Ketidakseimbangan terjadi apabila kita lebih mengandalkan salah satu sinyal saja (*interoception* atau *exteroception* semata). Kecenderungan

hanya mengandalkan interoception dapat menimbulkan sikap kaku, tertutup, *defensive*, reaktif, dan emosional.

Sementara, organisasi, pemimpin dan individu yang hanya mengandalkan *exteroception* dapat mengakibatkan perilaku reaktif yang bersifat jangka pendek. Ancaman kompetisi, disrupsi digital (AI) dan konten-konten viral sosial media dapat memicu perilaku reaktif. Organisasi atau individu dapat mengabaikan konsekuensi tekanan eksternal terhadap kondisi internal dalam tubuh demi mengejar kriteria sukses eksternal yang bersifat jangka pendek. Risiko yang terjadi biasanya adalah *burnout* (kelelahan), kehilangan kepekaan dan empati, *euphoria* pasar, orientasi terhadap hasil secara berlebihan dan perilaku agresif.

Reflective Thinking and Debiasing Skills.

Mengenal dan mengelola diri juga mencakup kemampuan untuk belajar memahami bagaimana faktor fisiologis, atensi, persepsi, kebiasaan, kemampuan dan motivasi mempengaruhi pikiran dan perilaku. Dinamika PAHAM dalam diri dapat menjadi *blind spot* yang seringkali luput dari pengamatan. Kebaharuan seringkali sulit diwujudkan karena ego dan reaksi emosional (*limbic system*) cenderung mendahului, mengatasi dan bahkan mengatasnamakan logika akal sehat. Bias dalam berpikir dan bertindak yang berdampak terhadap pencapaian hasil seringkali justru tidak dipahami apalagi dikelola dengan baik. Akibatnya bias dari goals yang dikehendaki semakin menganga lebar.

Empathy & Innovation skills. *Design thinking* yang diintegrasikan ke dalam proses pengembangan diperlakukan sebagai tools untuk mengembangkan inovasi. *Design thinking* terutama harus ditanamkan sebagai *mindset* (*paradigma*) dalam berpikir, mengambil keputusan dan berperilaku. Penggunaan *design thinking* sebagai *mindset* (*kerangka berpikir*) memungkinkan kita untuk memaknai problematika dan tantangan yang dihadapi dalam perspektif yang segar dan baru. Masalah dan tantangan yang dihadapi tak lagi semata dicermati dan disikapi dengan menggunakan kaca mata logika. Problematika juga dapat didefinisikan sebagai proses memahami sisi-sisi emosional, habitual, bias, *system* keyakinan, identitas dan perseptual secara utuh.

Empati oleh karenanya merupakan bagian tak terpisahkan dari proses *design* dan inovasi. Tanpa kepekaan dan empati, sulit untuk mendefinisikan (*membangkitkan*) masalah dan tantangan dari perspektif yang dalam dan berbeda (terutama dari sudut pandang aktor kunci yang sedang menghadapi masalah). Empati sering disepadankan dengan budaya komunal yang lebih bersifat guyup. Empati

sering juga ditempatkan pada sisi yang berlawanan dengan budaya individualis. Namun empati dalam konteks ini lebih dapat dikaitkan dengan *theory of mind* untuk memahami dan mengenali berbagai aspek PAHAM yang memicu perilaku tertentu dari berbagai perspektif yang berbeda.

Motivation. Memotivasi diri dan orang lain untuk mengembangkan perilaku atau tindakan tertentu bukanlah sesuatu yang mudah. Upaya pengembangan mensyaratkan energi (*sumber-sumber daya*) mental. Belajar mensyaratkan fokus (*konsentrasi*). Belajar juga mengandung ketidakpastian dan tak selalu membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Pada sisi lain, otak bekerja dalam moda hemat energi. Oleh karenanya, otak cenderung memilih jalan pintas, cara-cara yang sudah diketahui dan yang lebih pasti. Risiko kegagalan dari belajar menimbulkan perasaan tak nyaman.

Belajar mengandung atas antisipasi masa depan yang lebih baik. Hal ini menyiratkan **reward prediction error (RPE)**. *Reward prediction error* merupakan mekanisme otak untuk melakukan penyesuaian (*adjustment*) dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan. Jika upaya yang dilakukan menghasilkan sesuatu di atas ekspektasi, maka *reward prediction error* positif (*dopamine* berada dalam kondisi surplus). Sebaliknya jika *reward prediction error* tidak menghasilkan sesuatu sebagaimana yang diharapkan, maka *reward prediction error* (RPE) negatif (*dopamine* berada dalam kondisi *deficit*).

Hal ini menimbulkan dua konsekuensi utama: (1) *reward prediction error* (RPE) yang positif (*hasil di atas ekspektasi*) menimbulkan dorongan belajar (*untuk mengulangi pengalaman menyenangkan dari keberhasilan yang dicapai*) (2) sebaliknya, *reward prediction error* (RPE) negatif (*hasil tak sesuai ekspektasi*) menyurutkan motivasi belajar dan mengembangkan diri. Kegagalan menimbulkan perasaan menyakitkan (*tak nyaman*). Perasaan sakit (*tak nyaman*) dari kegagalan dapat menurunkan motivasi untuk mengeksplorasi masa depan dan mempelajari hal-hal yang belum diketahui (*unknown*). Kondisi ini menimbulkan *negative bias* dan proteksi terhadap status quo (*status quo bias*).

FTE negatif seringkali dipersepsikan sebagai ancaman. Ancaman biasanya memicu reaksi *limbic system*. Respon yang biasanya terjadi adalah 3F (*freeze*: membeku, *flight*: kabur/menghindar atau *fight*: melawan). Bagaimana otak merespon hal ini kemudian dapat menimbulkan bias (*penyimpangan dalam berpikir dan berperilaku*) seperti *negativity bias*, *hyperbolic discounting*, *ambiguity aversion bias* dan *status quo bias*.

Strategi yang dapat dilakukan dalam menyikapi hal ini adalah mengembangkan kemampuan menyikapi kegagalan (RPE negatif) sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan mengembangkan *growth mindset*, *stress mindset* dan menempatkan *reward* pada proses (*upaya*) bukan pada hasil. *Growth mindset* dalam hal ini berkaitan dengan sikap positif dalam merespon kegagalan. Kegagalan justru dipersepsikan dan dimaknai sebagai peluang melakukan perbaikan. Sementara *stress mindset* dapat dilakukan dengan mengubah narasi dalam diri bahwa stress adalah hal yang normal, perlu dan diantisipasi dalam proses belajar dan bertumbuh. Ketidaknyamanan oleh karenanya harus dipersepsikan sebagai konsekuensi wajar dari proses pembelajaran, pengembangan dan pertumbuhan.

Hal yang dapat dilakukan antara lain dengan mendesain pemicu kontekstual PAHAM yang relevan dalam bentuk budaya, narasi, teknologi, gaya kepemimpinan, umpan balik, kebijakan dan sistem manajemen kinerja yang memungkinkan FTE negative disikapi dengan upaya belajar, bertumbuh dan melakukan perbaikan. Desain pemicu kontekstual yang relevan memungkinkan kegagalan, umpan balik dan upaya perbaikan dapat dilakukan secara cepat. Hal ini lah yang disebut sebagai siklus: *fail fast, get feedback fast, learn fast, test fast and iterate fast*.

Perubahan perilaku yang mengarah kepada inovasi mensyaratkan upaya yang mensyaratkan energi mental. Penggunaan energi mental menyiratkan ketidaknyamanan (*reaksi emosional*) yang dapat menyurutkan motivasi. Untuk itu pengembangan konteks sosial, budaya, teknologi kebiasaan dan kebijakan yang mendorong tindakan eksploratif dan kebaharuan dalam tingkatan dan ruang lingkup yang *manageable* juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Berbagai hal di atas menunjukkan bahwa transformasi modal manusia mensyaratkan pemahaman yang utuh atas *Goals*, perilaku dan PAHAM (*physiologis*, *attensi*, *habit*, *abilities* dan *motivation*). Pemahaman ini kemudian dapat ditermahkan ke dalam strategi pengembangan *Goals*, perilaku dan PAHAM yang relevan. Tujuan yang menantang (*stretch/demanding goals*) mensyaratkan tuntutan perilaku dan tingkatan PAHAM yang juga tinggi.

Tingkatkan Profesionalitas dan Kredibilitas Melalui Sertifikasi di **LSP LSPP**

LSP LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan) adalah lembaga yang melaksanakan sertifikasi profesi di bidang perbankan. Sertifikasi LSP LSPP diakui oleh otoritas dan pelaku industri keuangan dalam rangka standarisasi kompetensi SDM perbankan.

Bidang Kompetensi



Manajemen
Risiko Perbankan



Operation



Wealth Management



General Banking



Audit Intern Bank



Kepatuhan



Funding & Services



Kredit Perbankan



Pelindungan
Kosumen (PEPK)



APU - PPT

Info Lebih Lanjut:

Contact Us



Phone Number:
08119852217



Website:
www.lssp.or.id

Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing

Oleh **NS. Aji Martono**
Wakil Ketua Bidang II Pengurus Pusat ISEI

Sertifikasi profesi di bidang ekonomi merupakan suatu bukti pengakuan terhadap kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh seorang profesional di bidang ekonomi. Sertifikasi ini penting untuk memberikan jaminan bahwa individu yang mengantongi sertifikat tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang. Dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, sertifikasi profesi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing serta kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang ekonomi.

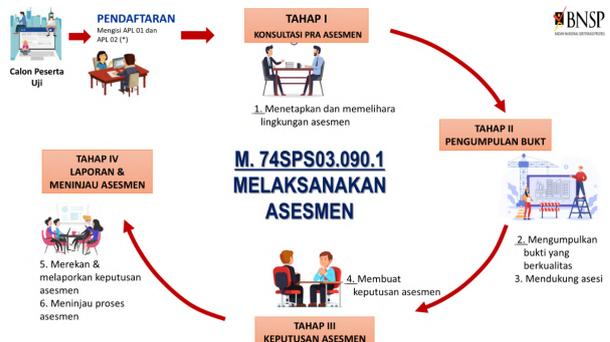
Pentingnya Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi

Dalam dunia ekonomi yang terus berkembang, kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan memiliki pengetahuan yang memadai sangat tinggi. Sertifikasi profesi di bidang ekonomi, seperti akuntansi, keuangan, analisis ekonomi, atau manajemen, dapat menjadi bukti bahwa seorang profesional memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas individu di mata perusahaan, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada klien dan mitra bisnis tentang kemampuan profesional yang dimiliki.

Saat ini terdapat berbagai lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. LSP memegang peran sentral dalam memastikan bahwa para profesional di bidang ekonomi memiliki kompetensi yang diakui dan relevan dengan kebutuhan industri. Melalui sertifikasi yang dikeluarkan, LSP tidak hanya menjamin kualitas tenaga kerja, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing individu, mematuhi regulasi yang ada, serta memastikan relevansi dan keberlanjutan profesi di dunia ekonomi yang terus berkembang. Oleh karena itu, LSP sangat penting dalam mengembangkan kualitas SDM dan profesionalisme di bidang ekonomi.

Sertifikasi ini memastikan bahwa para profesional tidak hanya memahami teori ekonomi, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam dunia nyata sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebagai contoh, terdaftar 13 LSP yang memiliki lisensi dari BNSP juga terdaftar di OJK diantaranya : LSP Pasar Modal, LSP Profesional Perbankan, LSP BSMR, LSP Keuangan Syariah, LSP Majelis Ulama Indonesia (MUI), LSP Pembiayaan Indonesia, LSP Penjaminan, LSP Peransuransian Syariah, LSP Certif, LSP Pasar Modal Indonesia (PMI), LSP IKEPAMI, LSP AAMAI dan LSP Beksya. LSP tersebut adalah lembaga yang dapat melakukan asesmen dan sertifikasinya diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap LSP di sektor keuangan memiliki standar dan prosedur sertifikasi yang berbeda-beda, namun tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang disertifikasi memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan profesinya dengan baik, sesuai dengan standar industri, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan sektor keuangan yang terus berubah.

Alur Memperoleh Sertifikasi Profesi



Dampak Sertifikasi Terhadap Karir Profesional

Sertifikasi profesi dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan karir seorang profesional di bidang ekonomi. Dengan adanya sertifikat yang menunjukkan kompetensinya, seorang profesional lebih mudah mendapatkan peluang kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak perusahaan yang mencari karyawan dengan sertifikasi karena mereka percaya bahwa individu tersebut memiliki kemampuan yang teruji dan dapat bekerja dengan standar yang tinggi.

Selain itu, sertifikasi juga dapat menjadi jalan bagi seorang profesional untuk memperoleh posisi yang lebih tinggi dalam karirnya. Misalnya, seorang analis ekonomi yang memiliki sertifikasi dapat berpeluang untuk menduduki posisi manajerial yang membutuhkan keahlian lebih mendalam. Sertifikasi ini membuka kesempatan bagi individu untuk mengembangkan karir dan meningkatkan penghasilannya.

Menyongsong Era Globalisasi dan Digitalisasi

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin maju, dunia ekonomi juga turut mengalami perubahan yang pesat. Teknologi informasi, big data, dan kecerdasan buatan (AI) semakin berperan penting dalam pembuatan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, sertifikasi profesi juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Hal ini menciptakan peluang bagi individu untuk mengembangkan keterampilan yang lebih spesifik, seperti sertifikasi dalam analisis data ekonomi atau manajemen keuangan digital.

Sertifikasi yang berbasis teknologi ini memungkinkan seorang profesional di bidang ekonomi untuk terus mengikuti perkembangan industri dan menguasai keterampilan yang relevan. Dalam konteks ini, sertifikasi tidak hanya menjadi alat untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan diri dalam dunia ekonomi yang semakin dinamis.

Kesimpulan

Sertifikasi profesi di bidang ekonomi memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam dunia kerja yang semakin kompetitif. Dengan memiliki sertifikasi, seorang profesional dapat menunjukkan kompetensinya, meningkatkan kredibilitas, dan memperoleh peluang karir yang lebih baik. Selain itu, sertifikasi juga menjadi jembatan untuk menghadapi tantangan dunia ekonomi yang terus berkembang, khususnya di era digitalisasi dan globalisasi. Oleh karena itu, sertifikasi profesi menjadi investasi yang berharga bagi setiap individu yang ingin meningkatkan kualitas dirinya dan berkontribusi secara maksimal di dunia ekonomi.

Opini

Membangun Sumber Daya Manusia di Daerah: Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh **Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty** Guru Besar FEB UI & Pengurus Pusat ISEI Bidang V dan **Wijianto** BPP HIPKA

Indonesia memiliki impian besar untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, tepat saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan. Untuk mewujudkannya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci. Namun, tantangan besar masih menghadang, salah satunya adalah ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencolok di berbagai daerah. Tanpa pemerataan pembangunan, visi Indonesia Emas bisa jadi hanya sebatas impian.

Mewujudkan Indonesia Emas 2045 memerlukan upaya serius dalam membangun sumber daya manusia di seluruh wilayah. Ketimpangan jumlah sekolah di berbagai daerah harus segera diatasi agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam perjalanan menuju kemajuan. Dengan membangun lebih banyak sekolah, meningkatkan kualitas pengajaran, serta memanfaatkan teknologi dalam pendidikan, kita dapat memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Ketimpangan IPM: Realitas yang Harus Diatasi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ketimpangan IPM yang cukup lebar antar provinsi. Kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur memiliki IPM tinggi, mencerminkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sebaliknya, daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa wilayah terpencil masih tertinggal jauh. Pada 2023, DKI Jakarta mencatat IPM di atas 80, sementara Papua masih di bawah 65. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan kualitas hidup yang sangat timpang.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin (0,85 persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39. Selama periode 2020–2024, rata-rata pertumbuhan IPM Indonesia adalah 0,75 persen

per tahun. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama dalam standar hidup layak dan pengetahuan. Harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat dari 13,15 tahun menjadi 13,21 tahun, sementara rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas naik dari 8,77 tahun menjadi 8,85 tahun. Selain itu, umur harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2024 mencapai 74,15 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

daerah dengan IPM rendah, banyak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Kurangnya fasilitas sekolah, keterbatasan jumlah guru berkualitas, dan minimnya dukungan teknologi membuat anak-anak di daerah tertinggal sulit bersaing dengan mereka yang tinggal di kota besar. Ketimpangan jumlah sekolah berdampak besar pada kualitas SDM di Indonesia. Anak-anak di daerah terpencil sering kali harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah terdekat, yang menyebabkan angka putus seko-



Gambar 1. Perkembangan Tren IPM Indonesia

Selanjutnya, perbedaan ini terlihat dalam skala lebih kecil, antara kabupaten dan kota. Kota metropolitan memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan kelas atas, sementara banyak daerah pedalaman masih kesulitan mendapatkan layanan dasar. Hal ini berdampak pada kesempatan kerja, kesejahteraan ekonomi, dan harapan hidup masyarakatnya. Dengan pemerataan pembangunan SDM, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat yang sama, sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud secara inklusif.

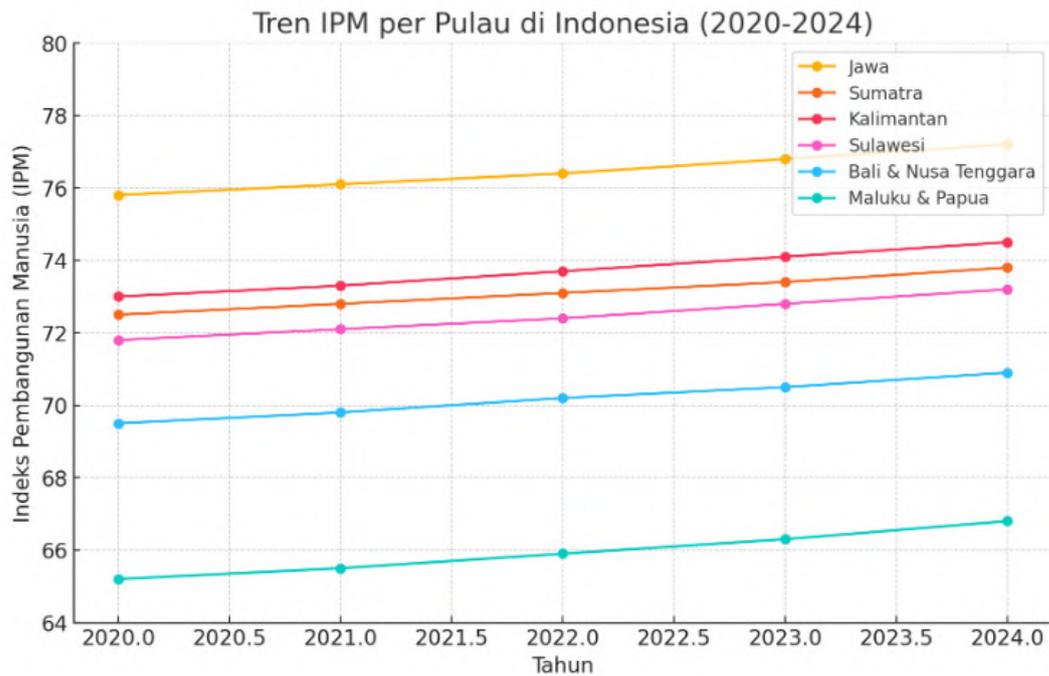
Dampak Ketimpangan Sekolah terhadap Pembangunan SDM

Ketimpangan IPM bukan hanya soal statistik. Ini adalah kenyataan yang dirasakan oleh jutaan orang setiap hari. Di

lah tinggi. Selain itu, keterbatasan jumlah guru berkualitas dan fasilitas belajar yang kurang memadai semakin memperburuk situasi pendidikan di daerah tersebut.

Minimnya akses terhadap pendidikan juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Masyarakat yang kurang terdidik memiliki keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan layak, yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan dan ketergantungan terhadap sektor informal. Selain itu, banyak anak-anak dari daerah tertinggal harus merantau ke kota besar demi mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang mengakibatkan daerah asal mereka semakin kekurangan SDM berkualitas.

Salah satu contoh nyata ketimpangan pendidikan adalah perbandingan antara



Gambar 2. Perbandingan IPM per Pulau di Indonesia

Provinsi Jawa Tengah dan Papua. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Jawa Tengah memiliki sekitar 18.000 sekolah dasar, sedangkan Papua hanya memiliki sekitar 2.500 sekolah dasar meskipun luas wilayahnya lebih besar. Hal ini menyebabkan rasio siswa terhadap sekolah di Papua jauh lebih tinggi, yang berdampak pada kualitas pembelajaran yang kurang optimal.

Lebih lanjut, Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia masih terpusat di Jawa, dengan sekitar 60% berada di Jawa dan 40% di luar Jawa. Ketimpangan ini membatasi akses pendidikan tinggi bagi daerah luar Jawa, yang memiliki jumlah perguruan tinggi jauh lebih sedikit. Misalnya, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur memiliki lebih dari 400 perguruan tinggi, sementara Papua dan NTT masing-masing kurang dari 50 institusi. Sebagai solusi, beberapa inisiatif lokal telah mencoba menghadirkan sekolah berbasis komunitas dengan dukungan tenaga pengajar sukarela. Namun, upaya ini masih perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang lebih konkret dalam membangun sekolah di daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.

Strategi Mewujudkan Pembangunan Merata

Tentu dengan menjembatani ketimpangan ini, kita perlu strategi yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga berbasis komunitas. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil yakni Pertama, Pendidikan yang Lebih Merata dan Inovatif. Pendidikan adalah modal utama untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemerin-

tah perlu memperkuat sekolah di daerah terpencil dengan fasilitas yang layak dan pengajar berkualitas. Tentunya, teknologi harus dimanfaatkan dengan maksimal. Model pembelajaran berbasis digital, seperti sekolah daring dan kelas interaktif berbasis internet, bisa menjadi solusi bagi daerah yang sulit dijangkau. Kedua, Akses Kesehatan yang Mudah Dijangkau. Tidak boleh ada lagi daerah yang kekurangan layanan kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas harus merata, dengan tenaga medis yang memadai. Telemedicine, atau layanan konsultasi kesehatan berbasis teknologi, juga bisa membantu daerah yang jauh dari rumah sakit besar. Selain itu, pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi dalam membangun pusat kesehatan terpadu di daerah dengan IPM rendah. Ketiga, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal. Ketimpangan ekonomi hanya bisa diatasi dengan menciptakan peluang kerja di daerah tertinggal. Ini bisa dilakukan dengan mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), memberikan akses permodalan bagi wirausaha lokal, serta mendorong investasi di sektor yang sesuai dengan potensi daerah, seperti pertanian, pariwisata, atau industri kreatif. Digitalisasi ekonomi juga harus diperluas agar pelaku usaha di desa bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Keempat, Pembangunan Infrastruktur yang Adil. Jalan, listrik, internet, dan transportasi harus tersedia di seluruh pelosok negeri. Dengan konektivitas yang lebih baik, masyarakat desa mendapatkan akses yang sama dengan warga kota dalam mencari pekerjaan, menjalankan bisnis, atau mendapatkan layanan publik. Pengembangan desa berbasis *smart village* juga bisa menjadi solusi dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kelima, Kolaborasi Semua Pihak. Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah. Sektor swasta, lembaga sosial, dan masyarakat juga harus terlibat. Dengan kolaborasi yang erat, berbagai inisiatif lokal bisa berkembang dan memberikan dampak nyata. Program CSR perusahaan besar bisa diarahkan untuk meningkatkan IPM di daerah-daerah tertinggal.

Tindak Lanjut Kedepan Bahwa dengan Mengembangkan Potensi Lokal Berbasis Kearifan Daerah, Setiap daerah memiliki potensi unik yang bisa dikembangkan. Misalnya, daerah pesisir bisa fokus pada industri perikanan dan ekowisata, sementara daerah agraris bisa diperkuat dengan pertanian modern dan pengolahan hasil panen. Dengan strategi ini, masyarakat bisa berkembang tanpa harus pindah ke kota besar. Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Masyarakat. Pembangunan komunitas tidak bisa berjalan tanpa dukungan dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran akan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi harus terus ditingkatkan. Program edukasi berbasis komunitas, pelatihan keterampilan, dan peningkatan literasi digital dapat membantu masyarakat lebih mandiri dan berdaya.

Opini



Peran Human Capital dalam Menyongsong Indonesia Maju

Oleh **Prof. Dr. Wasiaturrahma**
Guru Besar FEB Universitas Airlangga

Modal insani adalah modal atau capital dalam konsep modal manusia (human capital concept). Konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan (ide), kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja.

Modal manusia adalah komponen yang sangat penting di dalam organisasi. Manusia dengan segala kemampuannya bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Manusia adalah kunci sukses dalam proses produksi, karena ada enam komponen dari modal manusia, yakni: (1) Modal intelektual; (2) Modal emosional; (3) Modal sosial; (4) Modal ketabahan, (5) Modal moral; dan (6) Modal kesehatan.

Keenam komponen tersebut merupakan modal manusia yang harus dimiliki oleh setiap individu. Penerapan komponen tersebut menjadikan sumber daya manusia yang ada di daerah maupun nasional akan bersinergi dalam membangun kualitas yang lebih baik bagi insani dan

perekonomian Indonesia. Sumber daya manusia tidak hanya memperhatikan satu atau dua komponen saja, melainkan semua komponen harus memenuhi kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti misalnya, modal manusia tidak cukup hanya mengandalkan modal intelektual, emosional, sosial, dan ketabahan, akan tetapi modal manusia juga membutuhkan modal moral dan kesehatan yang seimbang. Ketika masyarakat dalam suatu daerah memiliki modal insani seperti enam komponen di atas, maka mereka dapat dengan mudah dalam mengembangkan kreativitas, ide, keterampilan lainnya yang tentunya dapat memunculkan sesuatu yang baru dalam perekonomian. Kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh setiap sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi

busi bagi ekonomi suatu daerah atau negara, seperti memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan usaha, jasa, dan lain-lainnya.

Kemajuan perekonomian setiap daerah dapat diperhatikan dari kualitas sumber daya manusia dengan keterampilan dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakatnya, seperti misalnya kemampuan dan kemudahan akses pendidikan, pelatihan, jaringan teknologi lainnya menjadikan perbandingan dengan daerah lain. Perbedaan tersebut tentu sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi setiap daerah, karena kinerja serta kemampuan masyarakat yang masih belum memadai. Masyarakat perlu mengembangkan keterampilan non formal maupun formal sebagai bentuk modal diri dalam bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu, apabila masyarakat mulai sadar akan kualitas dari *human capital* sangat berpengaruh terhadap kemajuan sosial ekonomi, maka mereka akan mempersiapkan diri meningkatkan keterampilan dan kreativitas dalam mengikuti perkembangan zaman yang menuntut setiap orang harus memiliki *value*.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) atau *human capital* memegang peranan penting dalam menyongsong kemajuan ekonomi Indonesia. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, keberhasilan suatu negara tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga pada seberapa baik kualitas SDM yang dimiliki. Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, memiliki potensi besar dalam memanfaatkan *human capital* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan laporan dari *World Bank* melalui *The Human Capital Index update 2020*, indeks sumber daya manusia (*Human Capital Index/HCI*) Indonesia memiliki angka cukup baik yakni 0,54 bahkan lebih baik dari Filipina yang berada di angka 0,52 dan India 0,49.

Angka tersebut mengalami kenaikan dari *Human Capital Index* tahun 2018 yakni 0,53. *Human Capital Index* menjadi tolok ukur negara-negara dalam mengimplementasikan penciptaan SDM yang memenuhi kualitas di suatu negara. Hal ini menjadi dasar wujud kehadiran SDM yang mumpuni.

Pendidikan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, berpikir kritis, serta

memiliki kreativitas dan inovasi. Meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang, Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil, yang siap menghadapi tantangan pasar global.

Program pendidikan yang menekankan pada pengembangan *soft skills* dan *hard skills* akan memastikan bahwa SDM Indonesia dapat berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional.

Human Capital sebagai Fondasi Ekonomi yang Kuat

Dalam konteks ekonomi Indonesia, kualitas *human capital* juga dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, para pekerja dapat bekerja lebih efisien dan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Selain itu, *human capital* yang berkualitas juga berperan penting dalam menciptakan *startup* dan inovasi yang mampu mendorong sektor ekonomi baru, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Di sisi lain, meskipun kualitas *human capital* sangat penting, kepemimpinan yang cerdas dan kuat menjadi elemen penggerak yang menentukan apakah potensi tersebut akan terealisasi secara maksimal. **Smart leader** memiliki wawasan yang luas dan kemampuan untuk membuat keputusan strategis yang dapat memanfaatkan kualitas *human capital* untuk kemajuan ekonomi. Pemimpin yang cerdas akan mampu mendorong kebijakan yang mendukung inovasi, penelitian, dan pengembangan, yang pada gilirannya akan mendorong daya saing ekonomi bangsa.

Sementara itu, **strong leader** memiliki ketegasan, visi yang jelas, dan kemampuan untuk menginspirasi serta memotivasi orang lain. Seorang pemimpin yang kuat mampu menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan semangat kerja. Dalam konteks kemajuan ekonomi, pemimpin yang kuat dapat menciptakan kebijakan yang mendorong investasi, mengurangi hambatan birokrasi, serta menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan sektor-sektor strategis.

Sinergi antara Human Capital dan Kepemimpinan

Human capital yang berkualitas menjadikan pemimpin yang cerdas dan kuat untuk kesulitan dalam menjalankan visi ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, meskipun memiliki pemimpin yang cerdas dan kuat, tanpa SDM yang berkualitas, kebijakan-kebijakan yang diterapkan

tidak akan mampu memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi.

Selain itu, dengan perkembangan yang semakin pesat, kepemimpinan yang cerdas dan kuat juga diperlukan untuk menghadapi tantangan baru seperti disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi global. Pemimpin yang memiliki wawasan dan ketegasan dapat merumuskan kebijakan yang memadai untuk memitigasi risiko-risiko tersebut dan memastikan bahwa ekonomi negara tetap tumbuh positif secara berkelanjutan.

Tantangan dan Rekomendasi

Namun, tantangan terbesar Indonesia dalam memanfaatkan kualitas *human capital* adalah ketimpangan akses pendidikan dan pelatihan yang masih ada, terutama di daerah-daerah terpencil. Upaya pemerintah dalam menyediakan pendidikan berkualitas, sekolah vokasi dan akses pelatihan yang merata harus terus didorong untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis, memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi pada ekonomi negara.

Secara keseluruhan, kualitas *human capital* menjadi salah satu kunci utama untuk menyongsong era kemajuan ekonomi Indonesia. Dengan fokus pada pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan yang relevan, serta penciptaan lingkungan yang mendukung inovasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang maju secara ekonomi dan sosial.

Opini

Bisakah Modal Insani Memajukan Negara?

Oleh **Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS**
Dosen STIE YKPN Yogyakarta

Modal Insani dan Pertumbuhan Ekonomi

Modal insani atau modal insani adalah konsep yang merujuk pada sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang dapat memberikan nilai tambah bagi individu, organisasi, dan ekonomi secara keseluruhan (Kucharčíková, 2011). Modal insani bukan hanya sekadar jumlah tenaga kerja yang tersedia, tetapi juga mencerminkan kualitas tenaga kerja tersebut dalam hal keahlian, kreativitas, inovasi, serta kemampuannya dalam beradaptasi dengan perubahan.

Untuk menggambarkan kualitas modal manusia di suatu negara, Bank Dunia melakukan pengukuran secara periodik. Hubungan antara indeks modal insani dengan Produk Domestik Bruto, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk negara-negara ASEAN dan beberapa negara besar dapat dilihat pada tabel berikut.

Indeks modal insani yang tinggi, sebenarnya memberi dampak positif terhadap kemajuan suatu negara. Beberapa dampak tersebut antara lain adalah:

1. Negara dengan indeks modal insani yang tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih terampil, sehat, dan berpendidikan.
2. Modal manusia yang kuat sering kali dikaitkan dengan peningkatan inovasi dan adopsi teknologi baru.
3. Negara dengan modal insani yang tinggi lebih menarik bagi investor asing karena mereka menawarkan tenaga kerja yang kompeten dan produktif.

Tabel Indeks HCI, PDB, Populasi, dan Pertumbuhan Ekonomi

Negara	HCI	PDB (2022)	Populasi	PE (2022) %
Singapura	0.88	467,46	5,64	3,6
Malaysia	0.61	469,62	33,57	8,7
Thailand	0.60	580,69	70,0	2,6
Vietnam	0.69	447,16	98,2	8,0
Indonesia	0.54	1.390,02	273,8	5,3
Filipina	0.55	425,66	113,9	7,6
Laos	0.45	17,94	7,5	4,5
Kamboja	0.49	30,71	16,7	5,2
Myanmar	0.47	63,56	54,0	2,0
Brunei Darussalam	N/A	15,04	0,44	1,1
China	0.65	17.963,05	1412,0	3,0
Jepang	0.76	4.230,07	125,7	1,0
Amerika Serikat	0.78	25.462,01	331,9	2,1
Brazilia	0.59	1.920,16	215,3	2,9
Russia	0.68	1.780,21	143,4	2,2
Inggris	0.75	3.131,31	67,3	4,1

HCI: Modal insani Index tahun 2022; PDB tahun 2022 dalam miliar dollar AS; Populasi dalam juta jiwa; PE: Pertumbuhan ekonomi tahun 2022

Sumber: Bank Dunia dan UNDP

4. Indeks modal insani yang tinggi sering kali dikaitkan dengan distribusi pendapatan yang lebih adil.
5. Negara-negara dengan modal manusia yang tinggi, seperti Singapura dan Swiss, memiliki daya saing ekonomi yang tinggi di kancah internasional.
6. Dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan pendapatan per kapita yang meningkat, negara dapat mengumpulkan lebih banyak pajak dari perusahaan dan individu.

Selain dengan indeks tersebut, sebenarnya secara kasat mata juga dapat dilihat dari orang-orang kaya di suatu negara. Negara dengan indeks modal insani yang tinggi, biasanya memiliki orang-orang kaya yang bidang usahanya mengandalkan kreativitas, kepandaian, inovasi atau ketangkasan, seperti olah raga, perancang teknologi, musisi, artis, dan sebagainya. Sedangkan pada negara-negara dengan indeks modal insani yang rendah, orang-orang kayanya biasanya mengandalkan sumber daya alam, seperti minyak, batubara, tambang, dan sebagainya.

Sebagai contoh, kita lihat saja beberapa individu terkaya di Amerika Serikat yang menunjukkan bagaimana investasi dalam modal insani dapat menghasilkan kesuksesan luar biasa. Mereka berasal dari berbagai bidang, termasuk teknologi, investasi, hiburan, dan olahraga, misalnya:

- **Elon Musk:** CEO Tesla dan SpaceX, yang memiliki latar belakang dalam fisika dan ekonomi, serta keterampilan kewirausahaan dalam mengembangkan inovasi di bidang kendaraan listrik dan eksplorasi luar angkasa (Vance, 2015).
- **Larry Page & Sergey Brin:** Co-founders Google, yang mengembangkan mesin pencari terkemuka dengan algoritma inovatif yang mengubah cara manusia mengakses informasi digital (Levy, 2011).
- **Jensen Huang:** Founder dan CEO Nvidia, yang mengembangkan teknologi chip grafis yang menjadi fondasi kecerdasan buatan dan komputasi modern (Miller, 2021).



- **Steve Jobs:** Co-founder Apple, yang merevolusi industri teknologi dengan inovasi dalam perangkat lunak, komputer, dan ponsel pintar (Isaacson, 2011).
- **Oprah Winfrey:** Ikon media dan pengusaha, yang membangun kerajaan bisnis berbasis media dan filantropi dengan modal intelektual dan komunikasi yang luar biasa (Kelley, 2019).
- **Bill Gates:** Co-founder Microsoft, yang memanfaatkan keterampilan pemrograman dan manajemen bisnis untuk membangun salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia (Isaacson, 2021).

Para tokoh tersebut membuktikan bahwa modal insani berupa pendidikan, pengalaman, dan keterampilan sangat berperan dalam menciptakan kesuksesan individu serta memberikan dampak besar terhadap perekonomian global.

Komponen Modal insani

Modal insani terdiri dari beberapa elemen utama yang membentuk kapasitas individu dalam menciptakan nilai ekonomi dan sosial. Menurut Becker (1993), modal insani mencakup keterampilan, pendidikan, dan pengalaman yang diperoleh individu sepanjang hidup mereka. Berikut adalah beberapa komponen utama modal insani:

- **Pendidikan dan Pelatihan:** memainkan peran utama dalam pengembangan keterampilan individu. Penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan menghasilkan tingkat pengembalian ekonomi yang tinggi baik bagi individu maupun masyarakat (Psacharopoulos & Patrinos, 2018).
- **Pengalaman Kerja:** memungkinkan individu untuk mengembangkan

keterampilan praktis yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pendidikan formal. Menurut Mincer (1974), pengalaman kerja berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas individu di berbagai industri.

- **Kesehatan dan Kesejahteraan:** memiliki dampak langsung pada produktivitas dan kemampuan kerja individu, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi suatu negara.
- **Kemampuan Inovasi dan Kreativitas:** menjadi elemen penting dari modal insani. Florida (2002) mengungkapkan bahwa kreativitas adalah faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi modern, terutama di sektor teknologi dan industri kreatif.
- **Soft Skills dan Kompetensi Interpersonal:** Kemampuan dalam komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, dan pengelolaan konflik menjadi semakin penting dalam dunia kerja yang dinamis.

Dengan memahami dan mengembangkan komponen-komponen tersebut, organisasi dan individu dapat meningkatkan daya saing serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan inovatif.

Cara Meningkatkan Modal insani

Setelah kita dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi modal insani, maka kita dapat menyusun berbagai strategi yang pas. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan modal insani di antaranya adalah sebagai berikut:

- Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kome-

tensi tenaga kerja (Becker, 1993), dan pelatihan berbasis teknologi (World Economic Forum, 2020).

- Pengembangan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif (Robinson & Morrison, 2000).
- Insentif bagi pengembangan diri dan keterampilan, seperti beasiswa dan pelatihan bersertifikat (Noe, 2010).
- Program kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas dan efektivitas kerja (Schultz, 1961) dan kebijakan keseimbangan kerja-hidup dapat meningkatkan efisiensi kerja (OECD, 2019).

Whats next?

Modal insani menjadi tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengembangan modal insani harus menjadi prioritas bagi perusahaan, pemerintah, dan institusi pendidikan guna menciptakan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.

Opini

Relevansi Pendidikan dan Industri di Provinsi Banten

Oleh Dr. **Hady Sutjipto, S.E., M.Si.**

Pengurus ISEI Cabang Serang Banten dan Kaprodi Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Provinsi Banten, sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia, sebagai pintu gerbang pulau Jawa dari Sumatera dan memiliki potensi ekonomi yang besar karena letaknya yang dekat dengan Daerah Khusus Jakarta serta didukung oleh infrastruktur yang terus berkembang, seperti Pelabuhan Merak dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Provinsi ini menjadi salah satu pusat industri dan perdagangan penting, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada tingkat ketenagakerjaan dan kesejahteraan penduduknya.

Provinsi Banten, yang selama ini dikenal sebagai kawasan industri, menarik banyak investor dalam sektor manufaktur, infrastruktur, dan jasa. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten pada triwulan IV 2024 mencatatkan realisasi investasi senilai Rp 22,20 triliun dan realisasi investasi secara keseluruhan pada tahun 2024 mencapai Rp 105,62 triliun. Capaian investasi ini naik 7,71 persen secara Y-on-Y dibandingkan tahun 2023. Realisasi itu membuat Banten berada di peringkat lima nasional dengan realisasi tertinggi setelah Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Realisasi ini berhasil

menyerap tenaga kerja sebanyak 34.932 orang, terdiri dari 34.577 orang Tenaga Kerja Indonesia dan 355 Tenaga Kerja Asing (Radar Banten 05/02/2025)

Namun demikian, meskipun realisasi investasi yang besar, Banten masih menghadapi tantangan serius dalam masalah ketenagakerjaan, Banten termasuk dalam daftar provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi kedua di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada Agustus 2024 sebesar 6,68%, Jumlah pengangguran di Banten pada Agustus 2024 sebanyak 414,75 ribu orang, atau turun 33,68 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Jika dilihat perkembangan dalam lima tahun terakhir, maka secara rata-rata di Banten telah terjadi penurunan jumlah pengangguran sekitar 49,26 ribu orang setiap tahun atau berkurang sebesar 0,79 persen per tahun.

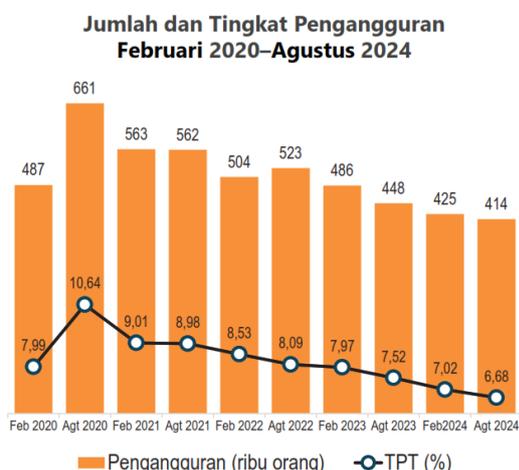
Sementara itu, Penyerapan tenaga kerja terbesar masih didominasi oleh lapangan Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa peningkatan investasi tinggi, tetapi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Banten masih tertinggi kedua secara nasional ?

Pendidikan dan Daya Saing Tenaga Kerja di Banten

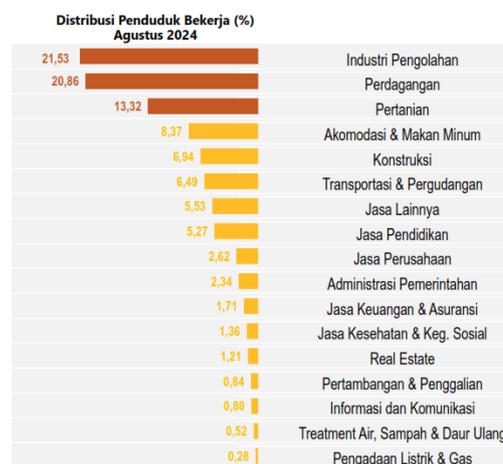
Berdasarkan data BPS Banten, pengangguran di Banten masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Sebagian besar pengangguran adalah lulusan SMK, yang menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan belum cukup untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di Banten.

Menurut teori **Human Capital**, pendidikan dan pelatihan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang lebih terampil akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan lebih mudah diserap oleh pasar kerja. Di Banten, rendahnya pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan menyebabkan tenaga kerja tidak siap untuk memenuhi kebutuhan pasar industri yang berkembang pesat. Akibatnya, banyak lapangan kerja yang tersedia diisi oleh pekerja dari luar daerah atau tenaga kerja asing.

Masalah ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri juga diperparah oleh sistem pendidikan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja. Meskipun lulusan SMK seharusnya lebih



Sumber : BPS Banten



siap untuk langsung bekerja, data BPS Banten menunjukkan bahwa TPT pada Agustus 2024 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2023. Pada Agustus 2024, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 11,58 persen. Ini menunjukkan bahwa banyak tenaga kerja muda yang belum memiliki pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja.

Solusi Kebijakan

Untuk mengatasi masalah pengangguran di Banten, beberapa solusi kebijakan yang dapat diterapkan:

Kebijakan Hilirisasi Industri

Kebijakan hilirisasi industri adalah salah satu langkah yang diharapkan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja di Banten. Hilirisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sebelum diekspor, dapat membuka kesempatan kerja baru dalam sektor-sektor seperti pengolahan bahan mentah, manufaktur, dan distribusi. Di Banten, hilirisasi sektor petrokimia, logam, dan otomotif dapat berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Namun, kesuksesan hilirisasi tergantung pada kemampuan tenaga kerja lokal untuk memenuhi tuntutan keterampilan yang dibutuhkan dalam proses produksi yang lebih kompleks.

Penguatan Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi harus diperkuat untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar kerja, terutama dalam sektor-sektor unggulan seperti industri manufaktur dan teknologi. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan in-

dustri untuk menyusun kurikulum yang relevan dan berbasis kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi tetap menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja di Banten.

Diversifikasi Ekonomi

Banten tidak boleh hanya bergantung pada sektor industri manufaktur padat modal. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sektor-sektor lain seperti ekonomi kreatif, pariwisata, dan pertanian modern untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan Kewirausahaan dan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, terutama di sektor informal. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan yang lebih kuat kepada UMKM melalui akses permodalan, pelatihan manajemen, dan peningkatan akses pasar. Dengan berkembangnya UMKM, akan tercipta lebih banyak lapangan kerja baru.

Peningkatan Program Pelatihan dan Sertifikasi Keterampilan

Pemerintah daerah harus memperbanyak program pelatihan dan sertifikasi keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Program-program ini harus mencakup keterampilan digital, pengoperasian teknologi canggih, dan manajemen produksi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Banten meskipun terjadi peningkatan

investasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara arus modal yang masuk dan kemampuan menciptakan lapangan kerja. Penyebab utama dari masalah ini adalah ketergantungan pada industri padat modal, rendahnya daya saing tenaga kerja lokal, dan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi jangka panjang yang melibatkan penguatan pendidikan vokasi, diversifikasi ekonomi, pengembangan UMKM, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. Kebijakan hilirisasi industri juga perlu dioptimalkan agar lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, diharapkan masalah pengangguran di Banten dapat diatasi secara bertahap, dan provinsi ini mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakatnya. Dengan langkah-langkah yang tepat, Banten dapat keluar dari predikat sebagai provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia dan menjadikan investasi yang masuk sebagai motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja.

“Keputusan terbaik bukan diambil dari asumsi, tapi dari data yang tepat dan riset yang kuat”

Prof. Stella Christie (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi).

Opini

Kota Solo Sebagai Pelopor TPID

Oleh **Lukman Hakim, Ph.D.**

Dosen FEB UNS & Ketua ISEI Cabang Surakarta

Inflasi adalah fenomena makro-ekonomi yang paling menghantui perekonomian Indonesia. Dari lintasan sejarah, kita melihat bahwa sejak merdeka, inflasi selalu menjadi momok ekonomi. Pengalaman hiperinflasi pertama terjadi pada masa Kabinet Hatta (20 Desember 1949-6 September 1950) yang disebabkan oleh adanya Korean Boom. Pada masa ini, untuk mengatasi inflasi itu, pada tanggal 19 Maret 1950, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengumumkan kebijakan “pengguntingan uang” yang juga dikenal sebagai “gunting Sjafruddin”, terhadap uang NICA. Untuk mencegah efek negatif dari tindakan ini, maka separuh mata uang dipakai sebagai alat pembayaran, dan separuh lainnya ditukar dengan surat obligasi pemerintah yang dibayar kembali secara berangsur-angsur (Prawiranegara, 1987).

Tentu saja, mengingat tingkat inflasi dan tingginya peredaran uang, tindakan ini secara ekonomis bisa dibenarkan, dan pada waktu yang bersamaan, pengguntingan uang ini juga bernapaskan semangat nasionalisme. Setidak-tidaknya, kenyataan ini tercermin dari pernyataan Sjafruddin Prawiranegara (1987:102): “We had to get a uniform currency for the whole of Indonesia”. Pemilikan mata uang nasional yang tersendiri adalah syarat-syarat moneter dan ekonomis paling elementer bagi sebuah negara. Namun dalam pengertian politis, sebagaimana juga telah disebutkan di atas, pengaruh kepemilikan mata uang nasional ini bergerak lebih jauh dari sekedar batas-batas ekonomi yakni sebuah usaha mewujudkan perlawanan ekonomi terhadap dominasi kolonial. Penafsiran bahwa penghapusan “uang NICA” tersebut lebih merupakan tindakan politik, sebab apa yang dihasilkan secara ekonomis tidaklah signifikan: kendatipun pada awalnya peredaran uang berhasil diturunkan sampai sekitar 40% dan laju inflasi relatif tertekan, namun setelah beberapa pekan, jumlah uang beredar dan inflasi kembali meningkat (Oey, 1991:327).

Demikian terjadi lagi inflasi dari sudut permintaan (*demand side inflation*) ada akhir masa Demokrasi Terpimpin ini sebagai akibat pencetakan uang menyusul pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat pesat. Pengeluaran itu terutama

ma diperuntukkan membiayai nasionalisasi perusahaan Belanda, dan peperangan, baik dalam rangka menumpas pemberontakan-pemberontakan maupun untuk merebut Irian Barat, serta konfrontasi dengan Malaysia. Keadaan ini menyebabkan defisit anggaran membengkak. Jika pada 1955, defisit anggaran hanya sebesar 14% dari total penerimaan pemerintah, maka pada 1965 telah meningkat menjadi 174% (Mas’oed, 1989:47). Untuk mengatasi defisit anggaran yang semakin besar, pemerintah mengambil jalan pintas melalui pencetakan uang. Pencetakan uang merupakan salah satu penyebab lahirnya inflasi, karena dalam ekonomi makro terdapat keyakinan bahwa peningkatan jumlah uang beredar akan menaikkan inflasi. Maka, dapat dipastikan bahwa pencetakan uang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hiperinflasi pada tahun 1960-an.

Sementara, pada masa ini juga terjadi inflasi sisi penawaran (*supply side inflation*) karena adanya pasokan. Sebab lain yang tidak kalah pentingnya adalah merosotnya pasokan komoditi pokok: beras. Pada tahun 1965, harga beras telah mencapai Rp726,04/kg, padahal pada tahun sebelumnya masih Rp202,08/kg. Selain karena disebabkan kegagalan panen, kelangkaan beras juga diakibatkan melesetnya realisasi impor. Pada tahun 1965 direncanakan akan mengimpor 1.010 ribu ton, namun realisasinya hanya 203 ribu ton (Mears dan Moeljono, 1990: 32). Begitu pasokan beras di pasar mengalami penurunan, maka harga beras melambung tinggi yang diikuti kenaikan komoditi lain yang mendorong hiperinflasi.

Perpaduan pencetakan uang yang berlebihan dan kelangkaan beras merupakan penyebab utama lahirnya hiperinflasi. Jika tingkat inflasi pada tahun 1960 dan 1961, masing-masing mencapai hanya 20% dan 95%, maka pada tahun 1965 menembus angka 605%. Untuk mengatasi hiperinflasi itu, lagi-lagi pemerintah melakukan kebijakan pemotongan nilai uang. Melalui Penetapan Presiden No. 27/1965 tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan penurunan nilai mata uang dari Rp1000 menjadi Rp1. Kebijakan ini jelas merugikan masyarakat luas, karena kekayaan masyarakat menurun 1000%.

Kebijakan dan tindakan menurunkan tingkat inflasi dengan menurunkan JUB ini menampakkan hasil yang nyata. Jika pada tahun 1966, pertumbuhan jumlah uang beredar (JUB) sebesar 763% dan karena itu memicu terjadinya hiperinflasi sebesar 636%, maka mulai tahun 1967 JUB hanya tumbuh sekitar 132% dan tingkat inflasi mengalami penurunan menjadi 171%. Pada tahun 1969 pertumbuhan JUB semakin menurun menjadi 61% dan tingkat inflasi menurun secara lebih drastis hingga mencapai 17%. Penurunan tingkat inflasi terendah di bawah dua digit terjadi pada tahun 1971, hanya sekitar 3%, dengan pertumbuhan JUB sebesar 28%. Hal ini adalah prestasi paling gemilang dari program stabilisasi pada awal Orde Baru.

Kecukupan logistik, terutama komoditi beras menjadi program utama jangka pendek yang harus disukseskan pemerintah transisi pada masa awal Orde Baru. Kegagalan penyediaan beras pada masa Orde Lama telah menjadi “momok” yang paling menakutkan regim baru pimpinan Jenderal Soeharto ini. Pada 23 April 1969 dibentuklah Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang bertugas untuk mengendalikan pengadaan dan pendistribusian bahan kebutuhan pokok, terutama beras. Untuk tahap awal, fungsi lembaga ini adalah untuk mencukupi kebutuhan beras pegawai negeri dan militer. Karena sangat pentingnya lembaga ini, maka langsung dikomandani Jenderal Soeharto, sedangkan Kepala Stafnya adalah Achmad Tirtosudiro. Dalam usaha meningkatkan kinerja Kolognas, maka pada 10 Mei 1967, lembaga itu dirubah menjadi Badan Urusan Logistik (Bulog). Kepala Staf Kolognas Letjen. Achmad Tirtosudiro ditunjuk sebagai Kabulog. Tugas Bulog adalah berfungsi sebagai badan tunggal pengendalian kebutuhan pangan nasional (Booth & McCawley, 1981)

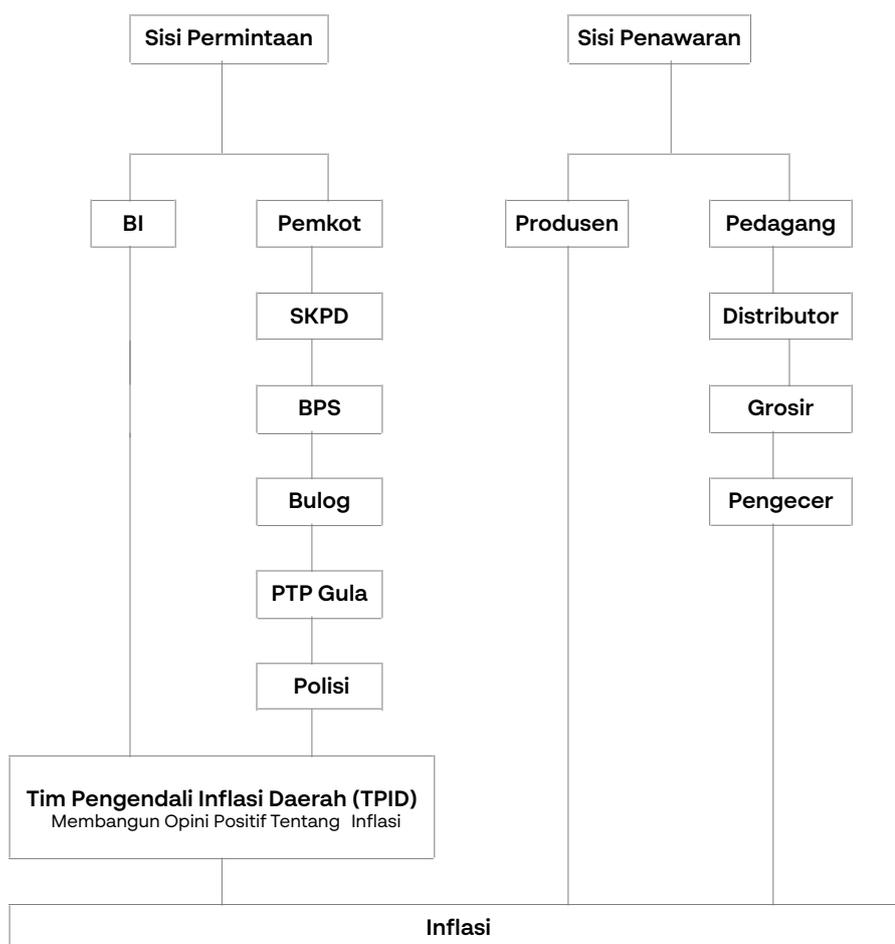
Dengan adanya Bulog ini, pemerintah dapat mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan beras dan bahan makanan pokok lainnya. Hal ini merupakan prestasi paling gemilang dari program stabilisasi pada awal Orde Baru. Penurunan hiperinflasi secara drastis menurut Hill (1996) ini merupakan prestasi terbesar dari Pemerintah Orde Baru. Bah-

kan tidak hanya itu, kebijakan yang konsisten dan ditunjang lembaga yang kredibel seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) telah sanggup mengendalikan inflasi sepanjang 32 tahun Pemerintah Orde Baru berkuasa.

Namun setelah reformasi ketika tatanan ekonomi berubah, pola pengendalian inflasi juga mengalami perubahan yang drastis. Jika pada masa Orde Baru peranan Bulog sangat dominan, maka pada era reformasi peranan Bulog dibatasi. Bahkan setelah keluarnya undang-undang paket desentralisasi daerah pada tahun 1999, posisi dan peranan Bulog menjadi sangat terbatas. Agar tetap dapat membantu menyediakan kebutuhan pokok secara nasional, terutama beras, Bulog berubah badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum (Perum). Dalam posisi ini Bulog hanya sebagai penunjang stabilitas harga komoditi beras, sedangkan yang bertanggungjawab secara langsung adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian jika dahulu, Bulog bisa langsung dapat melakukan operasi pasar jika terdapat kelangkaan kebutuhan pokok, saat ini tidak lagi. Kewenangan itu melakukan operasi pasar adalah di tangan Pemkab/kota.

Kota Solo merupakan pelopor berdirinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Melalui Keputusan Walikota Surakarta Nomor 589.05/20/1/2010 tertanggal 1 Maret 2010 ditetapkan berdirinya TPID. Yang ditandatangani oleh Walikota Joko Widodo. Dalam SK tersebut, Ketua pengarah adalah Walikota Surakarta, sedangkan Pimpinan BI Solo sebagai sekretaris. Terbentuknya TPID Kota Solo adalah terinspirasi adanya Tim Pengendali Inflasi Nasional yang dibentuk oleh Bank Indonesia di Jakarta. Tugas utamanya adalah mengendalikan inflasi dengan cara mengurangi informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) di pasar.

TPID menggantikan sistem yang lama dimana terdapat lembaga tunggal yakni Bulog. Maka, dalam TPID pengendalian inflasi tidak dimonopoli oleh satu lembaga saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua *stakeholders* di daerah yang meliputi antara lain Pemkab/kota, Bank Indonesia, BPS, Kepolisian, dan Bulog. TPID pada prinsipnya adalah memantau inflasi, sekaligus mengurangi adanya distorsi harga sebagai akibat adanya informasi yang tidak simetris tentang perkembangan harga. Dengan informasi yang relatif simetris akan dapat mereduksi etimasi masyarakat yang berlebihan tentang kemungkinan adanya kekurangan pasok sebuah komoditi yang dapat memicu adanya inflasi yang tinggi. Dengan demikian dengan adanya TPID membantu masyarakat agar meyakini adanya kepastian pasokan dan harga komoditi barang-barang kebutuhan pokok. Model TPID Solo ini telah menginspirasi di berbagai Pemprov dan Pemkab/kota untuk menerapkannya hingga saat ini.



Gambar 2.4
Jalur Pengendalian Inflasi Daerah Dalam Rangka
Mendorong Ketahanan Pangan

Opini

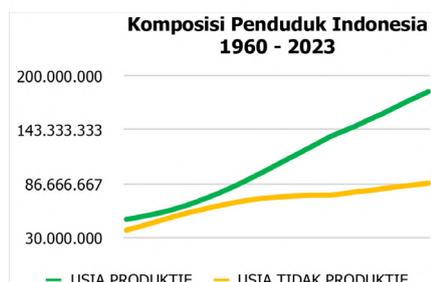
Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Oleh **Andri Ronaldo Pasaribu**
BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Spicker (2000) menciptakan istilah welfare state atau negara kesejahteraan yang merupakan suatu kondisi ideal dimana kesejahteraan sosial seluruhnya dijamin dan diselenggarakan oleh pemerintah yang terdiri dari layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial.

Lantas, bagaimana dengan penduduk Indonesia? Apa upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan layanan kesehatan yang mampu dijangkau oleh seluruh penduduknya? Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Dalam Undang-Undang tersebut dibentuklah BPJS Kesehatan yang merupakan badan hukum publik serta ditugaskan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang beroperasi penuh pada tahun 2014.

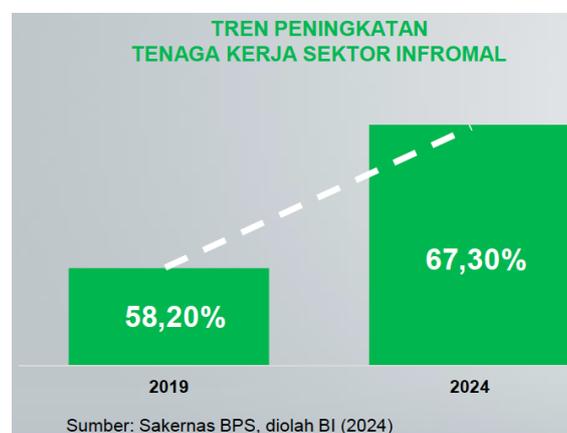
Kemudian, bagaimana dengan nasib pekerja di Indonesia? Apakah seluruh pekerja di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan? Apa upaya pemerintah Indonesia menciptakan iklim yang mendukung produktivitas pekerja? Apakah Indonesia memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu saja menjadi masalah besar jika tidak dijawab dengan langkah yang nyata. Mengingat Indonesia saat ini masih menikmati bonus demografi dan memiliki target Indonesia Emas 2045, dimana pekerja merupakan salah satu motor penggerak utamanya.



Ternyata, hukum pelaksanaan jaminan sosial sudah ada dari amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana disebutkan bahwa "untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa" dan pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga membentuk BPJS Ketenagakerjaan yang ditugaskan untuk melindungi pekerja yang bekerja di Indonesia baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), termasuk juga Pekerja Migran Indonesia (PMI), melalui 5 (lima) program yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta beserta dengan anggota keluarganya.

International Labour Organization (ILO), merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, dan bermartabat, mendefinisikan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan untuk tenaga kerja, keluarganya dan juga ahli warisnya. ILO telah membuat Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial. Dalam konvensi tersebut terdapat 9 (sembilan) hal dasar yang menjadi standar untuk diselenggarakannya jaminan sosial bagi tenaga kerja di suatu negara, yaitu: layanan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan untuk pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, dan tunjangan ahli waris. Dari kesembilan standar yang ditetapkan oleh ILO tersebut, Pemerintah Indonesia melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan telah hampir memenuhinya. Hal ini merupakan langkah konkrit Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar pekerja di wilayah In-

donesia. Seluruh pekerja di Indonesia diharapkan dapat fokus untuk mencapai titik maksimum produktifnya tanpa khawatir dengan risiko pekerjaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita, menyejahterakan pekerja dan keluarganya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan pada akhirnya target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.



Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saat ini program jaminan sosial ketenagakerjaan telah mencapai *universal coverage*? Apakah pekerja formal sudah pasti mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan? Bagi pekerja informal, apakah juga dapat terlindungi? Meskipun kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara Undang-Undang bersifat wajib, namun menurut laporan keuangan tahunan BPJS Ketenagakerjaan masih banyak tenaga kerja yang belum menjadi peserta, bahkan peserta BPJS Ketenagakerjaan juga tidak sepenuhnya terus berkelanjutan untuk berkontribusi melalui membayar iuran. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor pekerja informal. Kondisi pekerja informal Indonesia meningkat signifikan, dimana pada tahun 2019 sebesar 58,20% sedangkan pada tahun 2024 sudah mencapai 67,30%. Kondisi pekerja informal yang meningkat ini salah satunya disebabkan menurunnya daya serap pekerja di sektor formal, sehingga pekerja-pekerja yang sebelumnya bekerja sebagai pekerja formal, tidak memiliki pilihan lain sehingga menjadi pekerja informal demi memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun kondisi ini dapat meningkatkan risiko tidak tercapainya *universal coverage* jaminan sosial

ketenagakerjaan dimana pekerja informal memiliki banyak keterbatasan.

Menurut ILO (2018), masyarakat yang tidak mampu cenderung bekerja di sektor informal dan bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Masyarakat ini memiliki keterbatasan untuk masuk ke pasar tenaga kerja formal yang biasanya disebabkan oleh tingkat pendidikan dan keahlian. Menurut ILO (2018), pekerja informal ini sebenarnya ingin menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, namun mereka memiliki keterbatasan dana untuk membayarkan iurannya. *Willingness to pay* yang rendah bukan dikarenakan mereka menganggap jaminan sosial itu tidak penting, namun dikarenakan fokus mereka hanyalah memenuhi kebutuhan primer untuk hari ini.

Kondisi pekerja informal ini diperparah dengan fakta bahwa, mereka tidak pernah terpikirkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hari esok, lusa, atau minggu depan, bahkan mereka tidak pernah terpikirkan untuk menabung untuk kehidupan di masa depan. Fokus mereka hanyalah satu, yaitu dapat memenuhi kebutuhan hari ini. Risiko terbesar yang mereka hadapi ketika bekerja diantaranya kecelakaan kerja dan kematian, dimana jika risiko tersebut tidak dialihkan ke dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, maka akan memberikan dampak negatif kepada anggota keluarganya serta meningkatkan angka kemiskinan.

BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas dan memperdalam jangkauannya terhadap pekerja informal di Indonesia.

Tidak hanya kepada pekerja formal, BPJS Ketenagakerjaan juga berperan aktif dalam memberikan sosialisasi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan hak bagi pekerja informal. BPJS Ketenagakerjaan senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta di tingkat daerah maupun pusat untuk meningkatkan jumlah peserta dan memastikan peserta tersebut berkelanjutan dalam berkontribusi melalui pembayaran premi. Sebagai instansi yang berhubungan dekat dengan pekerja, BPJS Ketenagakerjaan rutin mengampanyekan langkah promotif dan preventif untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

Tugas besar ini tentu saja bukan hanya menjadi beban bagi BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Mencapai *universal coverage* jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekedar harapan jika seluruh pihak dapat bergotong royong. Baik secara individu, pihak swasta, dan pemerintah harus berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan langkah nyata dan berbagai solusi, ditengah kondisi demografi, geografi, struktur tenaga kerja, dan kondisi lainnya yang menjadi tantangan maupun peluang besar bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045.



Paul Romer mengemukakan bahwa pengetahuan berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori pertumbuhan endogen Romer mengungkapkan bahwa adanya efek bola salju di pasar ide. ide-ide baru — yang lahir melalui teknologi, didorong oleh paten, dan dipacu oleh sejumlah persaingan sehat — dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan jangka panjang. Romer adalah salah satu pelopor teori pertumbuhan endogen, atau gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi paling baik didorong oleh beberapa kekuatan paling organik di pasar yaitu “manusianya.”

Teori utamanya, yang dipublikasikan pada 1990, menyoroti perbedaan mendasar antara ide dan barang ekonomi lainnya, serta menekankan perlunya kondisi khusus agar ide dan pengetahuan dapat berkembang dan berkontribusi terhadap dinamika pasar.

“The more we know, the easier it gets to discover,”

Paul Romer (2018 Nobel Prize Winner)

Opini

Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Aksesibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Oleh **Bintang Oka Firmansyah, S.E.**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Perekonomian merupakan salah satu alat yang memiliki utilitas untuk menjaga keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat. Setiap permasalahan yang timbul di dalam kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat memerlukan alur kebijakan dalam mengatur serta memberikan bantuan kepada khalayak publik (Setiawan, 2018).

Fenomena kemiskinan hampir terjadi pada setiap negara berkembang salah satunya Indonesia (Ulfa dan Mulyadi, 2020). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi bagian dari 14 provinsi dengan angka kemiskinan ekstrem tahun 2022 di atas nilai nasional (Sumadi, 2022). Bantuan tunai sosial yang diberikan melalui berbagai program menjadi alternatif penanggulangan kemiskinan. Namun, berbagai studi membuktikan bahwa bantuan tunai sosial tidak memiliki manfaat secara berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang terbiasa menerima bantuan pemerintah tanpa berusaha meningkatkan taraf hidup (*living standards*) atau dalam perkembangan ekonomi kemiskinan disebut dengan *poor mentality*.

PKH merupakan bentuk program *Conditional Cash Transfer* (CCT) di Indonesia yang telah ada sejak tahun 2007 dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan (Sondang dan Matsuyuki, 2022). Implementasi PKH didasari oleh Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No.1 Tahun 2018. Selain memperoleh bantuan tunai, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH juga diberikan pendampingan dalam mengembangkan usaha. Bagi pelaku usaha, kredit dapat menjadi alternatif permodalan yang mampu mendorong kebutuhan usaha baik untuk pendirian maupun pengembangan.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu langkah yang dapat ditingkatkan oleh pemerintah untuk mencapai pemenuhan modal usaha di DIY. Dalam upaya peningkatan kinerja usaha, pemerintah menetapkan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 sebagai bentuk dukungan akses kredit bagi pengembangan usaha. Pada tahun 2022, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan BI No 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BI No 23/13/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang dimaksudkan untuk mendorong akses kredit/pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR (Perorangan Berpenghasilan Rendah).

Indikator makro dan mikro menjadi kedua hal yang sangat penting dipertimbangkan dalam merancang kebijakan. Sinergi Bank Indonesia (BI) dan seluruh jajaran pemangku kepentingan (*stakeholder*) perlu mendukung penyaluran kredit sebagai upaya pengembangan usaha di DIY. Dalam mendukung upaya tersebut, pemerintah telah merealisasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Disamping itu, kebijakan makroprudensial BI juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit pinjaman

usaha. Dengan demikian adanya kejelasan tentang pentingnya mempertimbangkan kebijakan sosial ekonomi secara makro dan mikro menjadi faktor tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan melakukan kajian empiris untuk mengetahui seberapa besar dampak dari intervensi program PKH terhadap kondisi penyaluran KUR di DIY pada tahun 2022 sebagai katalisator kebijakan makroprudensial BI.

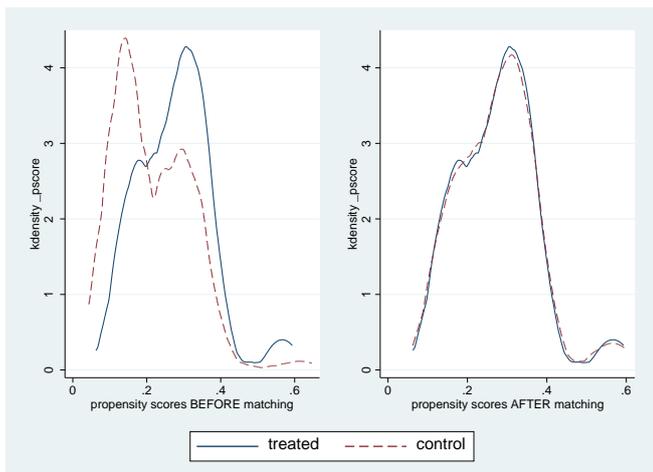
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) seluruh Kabupaten/Kota dan publikasi Tinjauan Regional berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penggunaan data SUSENAS diambil pada rumah tangga wilayah DIY tahun 2022. Jumlah observasi yang diambil sebesar 3.996 rumah tangga dengan hampir 13.092 individu. Disamping itu, studi ini juga menggunakan data publikasi Tinjauan Regional PDRB Kabupaten/Kota DIY tahun 2022 untuk selanjutnya mendukung analisis variabel PDB Perkapita.

Metode analisis Propensity Score Matching (PSM) digunakan untuk mengestimasi evaluasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) dan kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia terhadap aksesibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tahapan pertama pada analisis PSM adalah analisis regresi logit. Analisis ini bertujuan untuk mengukur probabilitas karakteristik. Adapun hasil regresi logit menjelaskan beberapa hal yang berpotensi meningkatkan akses KUR meliputi PKH, rata-rata lama sekolah, status usaha, dan akses internet. Disisi lain, hal-hal yang mengurangi aksesibilitas KUR adalah *poor* atau miskin, jenis kelamin, dan PDRB Perkapita.

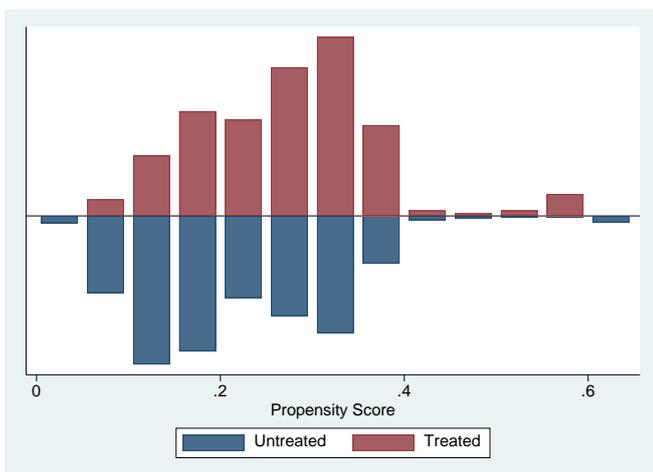
Tahapan kedua yaitu mengukur distribusi sebelum dan sesudah menerima PKH. Hasil distribusi pada gambar 1 menunjukkan jumlah rumah tangga yang tidak menerima PKH (*untreated*) lebih tinggi daripada rumah tangga yang menerima PKH (*treated*). Disamping itu, dalam grafik terdapat *overlap* diantara kedua distribusi sehingga diperlukan pencocokan atau *matching*.





Gambar 1. Distribusi Propensity Score Matching

Pencocokan dilakukan untuk menyeimbangkan kelompok *treated* dan kontrol. Proses matching dapat dilakukan dengan menggunakan teknik *Kernel Matching*. Pada gambar 2, proses pencocokan berhasil menyeimbangkan dua kelompok. Dengan seimbangnnya distribusi skor antara dua kelompok maka lebih sebanding dalam hal karakteristik yang dapat mempengaruhi hasil.



Gambar 2. Kernel Density Sebelum dan Sesudah Matching

Hasil estimasi Propensity Score Matching menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak positif terhadap probabilitas akses KUR sebesar 2%. Dari total seluruh penerima KUR, hanya 9% probabilitas dari kelompok kontrol atau bukan penerima PKH dalam mengakses KUR. Sedangkan kelompok *treated* atau penerima PKH memiliki probabilitas lebih tinggi untuk akses KUR yaitu sebesar 11% dari total penerima KUR.

Dengan kepemilikan PKH, rumah tangga yang terlibat dalam program mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengakses pendanaan sebagai modal memulai atau mengembangkan usaha. Peningkatan probabilitas sebesar 2% berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga melalui akses modal dengan KUR. Meskipun probabilitas kecil, hal ini mengindikasikan bahwa program PKH memiliki peranan penting bagi rumah tangga dalam mempermudah akses kredit KUR.

Dampak positif yang dihasilkan dari program PKH terhadap akses KUR sejalan dengan tujuan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yaitu meningkatkan inklusi keuangan. Namun, dampak 2% dari PKH belum sepenuhnya efektif untuk mening-

katkan akses keuangan rumah tangga miskin. Sehingga diperlukan adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas program PKH untuk mencapai target kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.

Studi oleh Oktavianti dan Hakim, (2017) membuktikan aksesibilitas kredit formal secara signifikan dipengaruhi oleh literasi keuangan dan persyaratan kredit. Selain mengembangkan program PKH, kebijakan dalam meningkatkan akses kredit KUR dapat dilakukan dengan menjangkau rumah tangga melalui peningkatan pemahaman literasi keuangan yang baik. Disamping itu, kebijakan kemudahan persyaratan kredit juga menjadi solusi efektif dalam meningkatkan aksesibilitas KUR.

Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan Bank Indonesia dan *stakeholder* dalam upaya peningkatan akses KUR yaitu:

- **Peningkatan edukasi dan literasi keuangan:** Pemberian edukasi dan literasi melalui berbagai media perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman mengenai KUR dan layanan keuangan
- **Penguatan kerjasama:** Meningkatkan kerjasama antara Bank Indonesia, lembaga keuangan dan pemerintah DIY dengan berbagai strategi yang difokuskan untuk mendukung penyaluran KUR khususnya kepada rumah tangga miskin.
- **Kemudahan persyaratan KUR:** Kebijakan untuk mempermudah persyaratan akses kredit khususnya KUR perlu dilakukan sebagai alternatif untuk meningkatkan akses kredit.

session **01** **Indonesian Family Life Survey (IFLS)**

Analisis survei longitudinal berkala nasional yang mengumpulkan data individu, rumah tangga, dan komunitas di Indonesia

Tema: **"Ekonomi Kesehatan RT Indonesia"**

Sabtu,
08 Maret 2025

13.30 – 17.00
WIB

Rp350.000
Rp250.000

IFLS atau Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) adalah survei longitudinal yang dilakukan secara berulang-ulang pada kelompok responden yang sama selama kurun waktu tertentu yang cukup panjang. Data yang terkumpul melalui survei ini kategori bigdata individu, rumah tangga dan komunitas. Ada hampir 16ribu rumah tangga, dan 50ribu individu. Dengan mengikuti workshop ini anda akan memperoleh pengetahuan struktur kuesioner, kumpulan buku data, menarik data menjadi variabel sesuai kebutuhan kajian, mengolah data, sampai menganalisisnya.

Opini

Mencari Matahari: Memberdayakan Perempuan dan Mewujudkan Kewirausahaan Sosial

Oleh **Retno Suminar**
Founder Srengenge

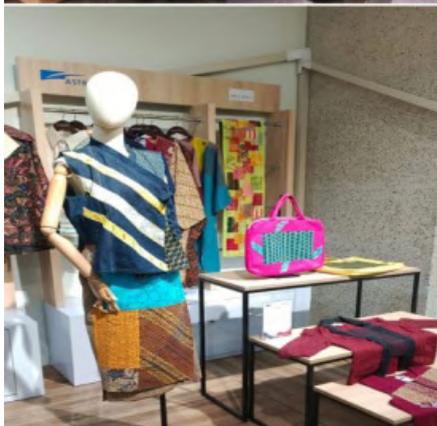
Srengenge, yang berarti matahari dalam bahasa Jawa, adalah nama usaha yang kami dirikan untuk memberdayakan perempuan di Indonesia. Semoga dengan hadirnya Srengenge, banyak perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk mandiri secara ekonomi, terutama dengan memanfaatkan keterampilan praktis yang dapat dikerjakan di rumah.

Kronologi Perjalanan Usaha

Usaha ini dimulai pada tahun 2004, ketika saya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara mendadak di kantor tempat saya bekerja. Setelah bertahun-tahun mencari peluang kerja kembali di dunia perkantoran dan merasa tak ada hasil, saya akhirnya mencoba untuk menekuni kembali hobi yang sudah lama saya tinggalkan—yaitu menjahit, menyulam, merajut, dan keterampilan lain yang berhubungan dengan kain dan benang.

Di keluarga kami, terutama di Solo, terdapat tradisi bagi anak cucu perempuan untuk belajar keterampilan seperti memasak, menjahit, menyulam, dan merajut saat memasuki usia baligh. Meskipun kami telah menempuh pendidikan tinggi, keterampilan ini diajarkan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Saya masih ingat pesan ibu yang disampaikan berulang kali: “Jika kamu menikah nanti, belum tentu pasanganmu bisa memenuhi semua kebutuhan, paling tidak kamu bisa memasak untuk keluarga dan menjahit bajumu sendiri.” Pesan ini sangat berguna dan menjadi pegangan hidup kami di saat-saat sulit.

Dengan latar belakang ini, saya mulai kembali menekuni keterampilan yang sudah lama saya tinggalkan dan mencoba untuk membuat produk-produk seperti baju koko anak laki-laki dan mukena, yang menggunakan kain katun berkualitas dengan sulaman tangan. Setelah empat tahun, produk-produk yang kami buat mulai mendapat perhatian pasar. Kami pun mulai menerima pesanan meskipun memerlukan waktu yang cukup lama



karena setiap produk dikerjakan secara manual.

Pada saat yang bersamaan, seorang teman meminta bantuan untuk menyalurkan dana infaq dan sodaqoh dalam bentuk pelatihan keterampilan. Kami pun mengusulkan untuk mengadakan pelatihan menjahit, menyulam, dan merajut bagi ibu-ibu, remaja, dan difabel yang tinggal di sekitar kami di Cibinong, Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah agar mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan memanfaatkan keterampilan yang diajarkan.

Kami mengadakan pelatihan keterampilan selama dua tahun (2008-2009), dengan target setiap tahunnya melatih 20 orang dalam waktu satu tahun. Pelatihan

tersebut kami harapkan bisa meningkatkan kemampuan peserta agar bisa mendapatkan penghasilan dari rumah.

Namun, setelah pelatihan selesai, muncul tantangan baru. Kemampuan untuk belajar keterampilan tidak serta merta berbanding lurus dengan kemampuan untuk “menjual” keterampilan tersebut. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memberikan pekerjaan langsung dengan memesan rajutan dan sulaman untuk produk-produk yang kami buat. Kami juga mulai menyediakan stok produk, tidak hanya berdasarkan pesanan. Kami belajar bersama tim produksi untuk memenuhi standar kualitas, dan tim produksi belajar bagaimana cara membuat produk sesuai dengan harapan pasar.

Model Bisnis dan Pengembangan Keterampilan

Sejak awal, kami menerapkan sistem kerja fleksibel, di mana ibu-ibu dan remaja bekerja dari rumah dan mengatur waktu kerja mereka sendiri setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan merawat anak. Ini memungkinkan mereka untuk tetap produktif tanpa harus meninggalkan rumah.

Meskipun semula proyek ini hanya direncanakan untuk dua tahun, Alhamdulillah, usaha ini terus berlanjut dan berkembang hingga sekarang. Dana dari penjualan produk juga kami sisihkan untuk melanjutkan pelatihan pemberdayaan. Kami menyadari bahwa pendidikan formal sangat penting, tetapi keterampilan praktis ini juga terbukti menjadi kunci penting dalam bertahan hidup, terutama di masa sulit.

Sejak 2017, kami mulai menjadi binaan dari berbagai lembaga seperti Smesco, Bank BRI, YDBA Astra, dan lainnya. Kami mendapat kesempatan untuk mengikuti berbagai pameran besar, seperti Indonesia Fashion Week, Inacraft, dan Trade Expo Indonesia. Kami juga mendapat kesempatan untuk tampil dalam fashion show berkolaborasi dengan desainer-desainer ternama, serta mulai menerima pesanan sulaman dari desainer Indonesia lainnya. Hal ini memberi kami keyakinan bahwa usaha kami berada di jalur yang benar dan terus berkembang.

Perempuan dan Kewirausahaan Sosial di Indonesia

Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meskipun peran perempuan dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan, kontribusi mereka dalam kewirausahaan sosial dan bisnis seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan modal usaha. Berdasarkan data yang ada, perempuan Indonesia hanya berkontribusi sebesar 20-30% dalam kewirausahaan sosial, sebuah angka yang masih jauh di bawah harapan.

Sebagai contoh, di sektor ekonomi kreatif, meskipun Indonesia memiliki potensi besar, perempuan sering kali tidak mendapatkan peluang yang setara dalam hal pendanaan, pelatihan, dan jaringan bisnis. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia memiliki kendala yang lebih besar dalam mengakses modal usaha dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial, budaya, dan diskriminasi gender yang masih berlaku dalam banyak aspek kehidupan.

Melalui usaha Srengenge, kami berusaha menjawab tantangan ini dengan memberikan pelatihan keterampilan yang dapat mengubah nasib perempuan di daerah-daerah yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Program pelatihan yang kami jalankan telah berhasil membantu banyak perempuan untuk mendapatkan penghasilan dari rumah, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan memulai usaha kecil mereka sendiri. Kami percaya bahwa dengan keterampilan yang tepat, perempuan dapat mengubah hidup mereka dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

Harapan untuk Masa Depan

Kami berharap Srengenge dapat terus berkembang dan membantu lebih banyak perempuan di Indonesia. Kami ingin menjadi matahari yang memberikan cahaya dan harapan bagi perempuan yang membutuhkan peluang untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi mereka. Ke depan, kami berharap Srengenge bisa memperluas jaringan pelatihan, menjangkau lebih banyak perempuan, serta berkolaborasi dengan lebih banyak pihak untuk menciptakan peluang yang lebih besar bagi perempuan di Indonesia.

Kami juga berharap bahwa Srengenge dapat menjadi contoh bahwa kewirausahaan sosial yang berbasis pada pemberdayaan perempuan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dengan memanfaatkan keterampilan, perempuan bisa menjadi agen perubahan



han yang memberikan dampak positif tidak hanya bagi keluarga mereka, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Srengenge bukan hanya soal bisnis, tetapi tentang perubahan hidup yang lebih baik, kemandirian, dan kebahagiaan yang diperoleh melalui kerja keras, kreativitas, dan keberanian untuk terus maju.

Semoga usaha Srengenge bisa terus tumbuh dan berkembang, dan menjadi inspirasi bagi lebih banyak perempuan untuk berani berkarya dan menciptakan peluang bagi diri mereka sendiri dan orang lain.



Opini

Keterampilan Digital Sebagai Modal Utama Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Daerah

Oleh **Arifai Ilyas**

Sekretaris ISEI Cabang Tarakan Kalimantan Utara & Dosen STIE Bulungan Tarakan

Perekonomian daerah di Indonesia, seperti di banyak negara berkembang lainnya, mengalami berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan-tantangan tersebut meliputi ketimpangan sosial-ekonomi, keterbatasan akses terhadap pasar global, serta ketergantungan terhadap sektor-sektor tradisional yang rentan terhadap perubahan kondisi pasar. Dalam konteks ini, salah satu aspek yang semakin diakui sebagai kunci untuk menghadapi tantangan tersebut adalah keterampilan digital. Keterampilan digital tidak hanya menjadi elemen penting bagi individu dalam memasuki dunia kerja, tetapi juga merupakan modal utama yang dapat mendorong kemajuan ekonomi di tingkat daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas bagaimana keterampilan digital dapat menjadi pilar penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkannya.

Transformasi Digital: Tantangan Dan Peluang Bagi Ekonomi Daerah

Transformasi digital adalah sebuah keniscayaan yang telah mengubah cara berbagai sektor ekonomi beroperasi, tidak terkecuali ekonomi daerah. Di era digital, hampir setiap aspek kehidupan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, hingga pelayanan pelanggan, terpengaruh oleh perkembangan teknologi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah di Indonesia siap menghadapi perubahan ini. Banyak daerah yang masih mengandalkan sektor tradisional seperti pertanian dan industri kecil yang belum sepenuhnya mengadopsi teknologi digital dalam proses produksinya. Oleh karena itu, keterampilan digital menjadi faktor krusial dalam mempersiapkan SDM daerah agar dapat beradaptasi dan bersaing dalam pasar global yang semakin terhubung.

Sektor ekonomi yang berbasis pada keterampilan digital memiliki potensi untuk berkembang pesat jika didukung oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang terlatih. Misalnya, dengan adanya keterampilan digital, pelaku usaha di sektor UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas melalui

platform e-commerce, mengelola keuangan dengan aplikasi berbasis digital, atau memanfaatkan media sosial untuk promosi produk secara lebih efisien. Di sisi lain, sektor pertanian juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, misalnya dengan menggunakan perangkat IoT (Internet of Things) untuk memantau kondisi tanaman atau memanfaatkan aplikasi berbasis data untuk mengoptimalkan proses distribusi hasil pertanian. Dengan demikian, keterampilan digital memiliki potensi untuk mengubah paradigma ekonomi daerah yang sebelumnya bergantung pada sektor tradisional menjadi lebih modern dan terintegrasi dengan pasar global.

Keterampilan Digital Sebagai Katalisator Peningkatan Produktivitas

Peningkatan keterampilan digital di tingkat daerah berpotensi besar untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi lokal. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan alat-alat digital yang lebih efisien dan pengembangan platform yang dapat mempermudah akses terhadap informasi serta sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau. Sebagai contoh, pelatihan keterampilan digital bagi pelaku usaha di daerah dapat membuka peluang bagi mereka untuk lebih mudah mengakses pasar global, memperoleh informasi terbaru tentang tren konsumen, serta memperoleh solusi digital yang dapat meningkatkan kualitas produk mereka.

Selain itu, keterampilan digital juga memberikan kemudahan dalam mengelola dan menganalisis data. Dalam dunia bisnis modern, pengolahan data merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dengan keterampilan digital, pelaku usaha di daerah dapat memanfaatkan teknologi big data untuk memprediksi permintaan pasar, menganalisis perilaku konsumen, dan meningkatkan pengambilan keputusan dalam hal produksi dan pemasaran. Keterampilan ini sangat penting dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan kata lain, penguasaan

keterampilan digital dapat meningkatkan produktivitas tidak hanya dalam sektor bisnis, tetapi juga di sektor publik, seperti dalam penyediaan layanan pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.

Meningkatkan Keterampilan Digital Melalui Pendidikan Dan Pelatihan

Agar keterampilan digital dapat menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan ekonomi daerah, penting untuk melakukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Sebagian besar daerah di Indonesia masih menghadapi masalah ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama dalam hal keterampilan teknologi. Oleh karena itu, upaya meningkatkan literasi digital harus dimulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kurikulum di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi perlu diperbarui agar lebih menekankan pada penguasaan teknologi dan keterampilan digital, tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa di bidang teknologi informasi, tetapi juga untuk mereka yang berada di sektor-sektor lain.

Pemerintah daerah, bekerja sama dengan sektor swasta, perlu menyusun program-program pelatihan yang dapat diakses oleh masyarakat umum, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Pelatihan ini dapat meliputi berbagai aspek keterampilan digital, mulai dari dasar-dasar penggunaan komputer, aplikasi perkantoran, media sosial untuk pemasaran, hingga keterampilan yang lebih spesifik seperti pengembangan aplikasi dan analisis data. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga dapat memberikan peluang baru bagi masyarakat untuk menciptakan usaha baru yang berbasis digital.

Kolaborasi Antara Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat

Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pengembangan keterampilan digital di daerah. Pemerintah daerah harus dapat menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur digital dan penyediaan akses internet

yang merata. Tanpa infrastruktur yang memadai, pengembangan keterampilan digital di daerah akan terbatas. Oleh karena itu, pembangunan jaringan internet yang cepat dan terjangkau di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian harus menjadi prioritas.

Selain itu, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam menyediakan pelatihan keterampilan digital, baik melalui perusahaan teknologi maupun lembaga pelatihan yang sudah berpengalaman. Perusahaan-perusahaan teknologi dapat berperan dalam menyediakan alat dan platform untuk pembelajaran, serta mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Di sisi lain, masyarakat harus berperan aktif dalam memanfaatkan kesempatan pelatihan yang ada dan mengaplikasikan keterampilan digital yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan ekonomi maupun sosial.

Tantangan Dalam Mengimplementasikan Keterampilan Digital Di Daerah

Meskipun keterampilan digital memiliki potensi yang besar untuk mengubah perekonomian daerah, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam proses implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet di daerah-daerah terpencil. Meskipun

penetrasi internet di Indonesia semakin meluas, masih ada kesenjangan akses yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan sebagian besar masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau pelatihan yang memadai.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah harus menciptakan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur digital, tetapi juga pada pengembangan keterampilan digital di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan digital yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Harapan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, harapan dari tulisan ini adalah agar keterampilan digital dapat menjadi faktor penggerak utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah di Indonesia. Diharapkan, dengan adanya investasi yang signifikan dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan digital, masyarakat di daerah dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi digital. Selain itu, kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat mendorong pembangunan in-

frastruktur digital yang merata, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dalam memanfaatkan potensi teknologi.

Lebih lanjut, diharapkan bahwa pengembangan keterampilan digital dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi lokal, khususnya UMKM dan pertanian, yang selama ini masih mengandalkan metode tradisional. Dengan demikian, sektor-sektor tersebut diharapkan dapat beradaptasi dan bersaing secara lebih efisien dalam pasar global. Terakhir, harapan utama adalah terciptanya pemerataan akses terhadap teknologi dan pendidikan digital di seluruh daerah Indonesia, terutama di wilayah terpencil, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari revolusi digital ini dan berkontribusi pada kemajuan perekonomian daerah secara keseluruhan.

Resensi Buku

Birokrasi Inovatif

Oleh **Dr. Agus Nompitu, S.E., M.T.P.**
Ketua ISEI Cabang Lampung

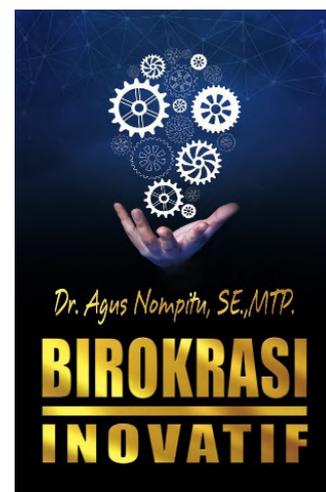
Selama ini organisasi pemerintah dikritik tidak efisien, tidak efektif, organisasi terlalu gemuk, biaya tinggi, terlalu birokratis penuh dengan aturan-aturan yang tidak perlu, tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tertutup, tidak demokratis, mengabaikan hak-hak masyarakat, melayani diri sendiri, dan gagal menyajikan pelayanan yang layak secara kuantitatif maupun kualitatif pada masyarakat.

Birokrat terus-menerus terjebak dalam kedisiplinan semu sistem birokrasi. Disiplin dalam jam kehadiran, disiplin mengikuti prosedur baru yang semakin ketat, atau membuat laporan ratusan halaman peraturan yang harus dijalani sehari-hari. Takut melanggar prosedur, takut melanggar aturan yang ketat, semua itu telah membuat mereka termakan produknya

sendiri. Sebagian besar mereka terjebak dan terbenam dalam rutinitas birokrasi dan tidak diberi waktu untuk belajar.

Sistem kerja birokrasi telah membuat birokrat sulit mencari waktu guna mengerjakan hal-hal kreatif, hal-hal yang sebenarnya berpotensi menyelesaikan banyak persoalan. Parameter kinerja masih sering diukur berdasarkan proses, bukan hasil akhir atau dampak yang diberikan. Pertanyaannya, apakah kerja birokrat masa depan akan seperti itu ?

Sebagai respons terhadap kritik atas kinerja birokrasi pemerintah, sejak reformasi pada berbagai sektor publik di seluruh dunia terus bergulir dengan isu utama akuntabilitas. Strategi desentralisasi yang ditempuh Indonesia sebagai wujud re-



Judul Buku: **Birokrasi Inovatif**

Penulis: **Dr. Agus Nompitu, S.E., M.T.P.**

Penerbit: **Adya Berkah Mulia**

Tahun Terbit: **November 2024**

Tebal Halaman: **261**

ISBN: **978-623-88921-3-6**

spons terhadap tuntutan tersebut juga berkaitan dengan upaya perbaikan akuntabilitas. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tekanan modernisasi terhadap organisasi pemerintah di seluruh dunia justru lebih banyak berfokus pada kepemimpinan strategik, budaya organisasi, dan struktur organisasi.

Kalau pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu 4 jam, mengapa harus bekerja selama 8 jam? Kalau bisa bekerja di rumah, apakah harus melakukannya di kantor? Kalau rapat bisa dilakukan secara virtual, mengapa harus bertemu langsung sehingga berpotensi menambah biaya dan kemacetan? Jika lebih baik kerja kantor bergiliran (*shift*), mengapa harus barengan? Bahkan, jika melihat dampak yang lebih luas, ternyata kita bisa mengurangi emisi gas karbon secara signifikan hanya dengan mengurangi jumlah jam kerja.

Bukan saja birokrat yang merasa lebih nyaman dengan bekerja secara cerdas, publik pun akan mendapat manfaat yang lebih besar. Warga negara bisa mendapatkan akses layanan publik kapan saja. Inilah momentum bagi kita semua, terutama organisasi pemerintahan, melakukan perbaikan secara mendasari. Tidak ada jalan lain bagi kita, kecuali melakukan inovatif - cara berpikir yang baru. Kita percaya bahwa inovatif bisa menjadi kunci untuk mentransformasi birokrasi guna memudahkan kerja para birokrat dan memudahkan masyarakat dalam menikmati hasil kerja keras mereka.

Birokrasi inovatif suatu keniscayaan, terutama untuk mengurai kerumitan birokrasi. Kita hargai jerih payah birokrat yang bekerja secara inovatif. Mereka mampu mentransformasi birokrasi. Mereka memberikan nilai dan makna kepada publik yang dilayaninya. Inovatif mestinya membuat para birokrasi bekerja menjadi lebih efisien, bekerja menjadi lebih mudah, dan hasilnya semakin maksimal.

Bekerja secara Inovatif itu artinya mereka tidak mengambil langkah yang dilakukan sendiri. Inovatif berarti punya peluang berhasil lebih tinggi jika dilakukan bersama-sama melalui kolaborasi. inovatif juga perlu daya dukung yang hebat. Setidaknya inovatif perlu dibarengi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terutama digital, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur yang mumpuni.

Selanjutnya untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dalam organisasi guna meningkatkan kinerja organisasi, peran kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya organisasi dan struktur organisasi. Karena pertumbuhan organisasi dikendalikan oleh pimpinan atau dengan kata lain

organisasi birokrasi adalah refleksi dari pimpinannya.

Peran penting kepemimpinan terletak pada proses inovasi dalam organisasi. Sedangkan budaya, struktur dan teknologi merupakan instrumen manajemen yang penting untuk menciptakan efektifitas organisasi melalui proses inovasi.

Secara empiris dibuktikan bahwa kepemimpinan transformasional mempengaruhi terciptanya budaya inovatif. Hal ini berarti bahwa tipe kepemimpinan transformasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil, namun juga pada proses yang dapat mendorong kesadaran aparatur untuk lebih kreatif dan inovatif.

Kepemimpinan transformasional juga lebih terbuka untuk meminimalkan aspek formalitas dalam birokrasi dan mengembangkan integrasi horizontal dan mendistribusikan kewenangan pada berbagai level jabatan struktural/ fungsional, dimana pengambilan keputusan, pengendalian dan proses penetapan sasaran disebarkan pada semua tingkatan organisasi. Sehingga organisasi akan lebih adaptif dan fleksibel.

Memahami konsep penciptaan birokrasi yang inovatif, secara sederhana dapat dilakukan dengan mengombinasikan dari 2 dimensi, yaitu budaya inovasi dan struktur organik yang secara empiris berpengaruh signifikan terhadap penciptaan birokrasi yang inovatif. Kemudian dapat dikategorikan dalam 4 tipologi, yaitu: *Rigid Bureaucracy*, *Participant Bureaucracy*, *Structure Driven* dan *Optimum Bureaucracy*.

Rigid Bureaucracy terjadi ketika desain struktur organisasi yang kaku, lapisan hirarki yang tinggi, ketatnya aturan dan prosedur, formalitas yang tinggi, integrasi horizontal rendah, lokus pengambilan keputusan dengan pola manajemen kendali, dan budaya inovasi yang rendah.

Participant Bureaucracy adalah keadaan organisasi dimana memiliki tingkat yang tinggi mengenai kesadaran untuk meningkatkan mutu layanan, daya saing organisasi, tetapi tidak didukung oleh desain struktur organisasi yang dapat mengungkit kreativitas dan inovasi karyawan.

Structure Driven terjadi pada saat organisasi memiliki desain struktur yang lebih fleksibel dan adaptif yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi, tetapi tidak didukung oleh kesadaran, sikap dan perilaku, asumsi serta nilai-nilai dalam organisasi.

Optimum Bureaucracy ketika organisasi memiliki tingkat kesadaran meningkatkan mutu dan terbukanya ruang kreativitas dan inovasi, memiliki fleksibilitas dan apresiasi yang tinggi, serta didukung oleh

desain struktur organisasi yang minimalisasi formal, hirarki yang ramping, tinggi integrasi horizontal serta pengambilan keputusan yang tersebar pada berbagai jenjang jabatan organisasi.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong agar keadaan *Rigid Bureaucracy* dapat berubah menjadi *Optimum Bureaucracy* dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, menggunakan pendekatan struktural (*structural approach*), yaitu didorong dengan regulasi berupa peraturan-peraturan yang lebih menyederhanakan rantai birokrasi dengan membangun struktur organisasi yang ramping dan minim formal akan mendorong dan mengungkit budaya inovasi dalam organisasi. Kedua, pendekatan budaya (*cultural approach*), yaitu pimpinan birokrasi harus dapat membangun kesadaran bagi pegawai untuk dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam organisasi, diikuti dengan memberikan ruang yang cukup pada bawahan, dengan mendorong kreativitas bawahan agar tercipta ide-ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif.

Harapannya melalui penciptaan birokrasi inovatif dapat mengurai berbagai permasalahan yang terjadi di birokrasi pemerintahan yang semakin kompleks. Dengan membangun budaya inovatif dan desain struktur organisasi yg bersifat organik, yang tentu didukung dengan penerapan kepemimpinan yang transformasional untuk menumbuhkan atmosfer inovatif mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semoga!



Tahukah Kamu?

Grameen Bank adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan oleh Dr. Muhammad Yunus di Bangladesh pada tahun 1983. Tujuan utama Grameen Bank adalah memberikan akses kepada penduduk miskin, terutama perempuan, untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan, yang sering kali tidak dapat diakses melalui sistem perbankan tradisional.

Membangun Generasi Mandiri dan Berwawasan Lingkungan

Catatan atas Bakti Sosial ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat ke Pondok Pesantren Modern Darul Fallah Cimenteng Subang

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terlihat jelas Pondok Pesantren Modern Darul Fallah Cimenteng, Subang, Jawa Barat, saat rombongan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung Koordinator Jawa Barat yang dipimpin oleh Ketuanya, Prof. Dr. Martha Fani Cahyandito, melakukan kunjungan istimewa pada 18 Januari 2025.

Kunjungan rombongan 15 pengurus, termasuk perwakilan 10 komisariat kampus itu, bertujuan untuk memberikan motivasi kepada sekitar 400 santri, sekaligus menyerahkan donasi berupa 11 dus paket buku dan 100 bibit pohon buah-buahan, serta diakhiri dengan penanaman pohon secara simbolis di area pesantren.

Acara berlangsung dengan khidmat dan penuh antusiasme dari jajaran guru (*asatidz*) dan santri yang dipimpin oleh pembina ponpes, Ustadz H. Agus Maulana dan pengasuh ponpes, Ustadz KH. Komarudin. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya ISEI untuk tidak hanya berkontribusi dalam bidang pemikiran ekonomi, tetapi juga berbagi inspirasi di lembaga pendidikan keagamaan dengan semangat pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan kolaborasi antar lembaga.

Pemimpin yang Berkarakter dan Mandiri

Setelah mengajak rombongan ISEI berkeliling pondok dan melihat berbagai ruangan seperti perpustakaan dan ruang komputer, pimpinan ponpes mengajak rombongan memberikan motivasi kepada para santri di Masjid Al-Hamid.

Prof. Dr. Martha Fani Cahyandito dalam sambutannya menekankan pentingnya pendidikan dan semangat kewirausahaan bagi generasi muda, khususnya santri di pesantren. Sebab, pendidikan merupakan kunci untuk membuka pintu kesuksesan.

"Pesantren juga menjadi wahana untuk mencetak pemimpin yang berkarakter dan mandiri. Saya berharap, para santri Darul Fallah bisa menjadi agen perubahan yang tak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan demi kebaikan masyarakat," ujar Prof. Fani.

Ia mengungkapkan, salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia ke depan adalah bagaimana membangun generasi muda yang siap menghadapi tantangan global dengan kemandirian dan semangat gotong-royong.

"Kita perlu menanamkan nilai-nilai kolaborasi dan kewirausahaan sejak dini, agar generasi muda tidak hanya sibuk mencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada di sekitarnya," lanjutnya.

Prof. Dr. Anton Mulyono Azis, Ketua Program Pengembangan Organisasi ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat, yang merupakan putra kelahiran Subang, turut memotivasi santri agar tidak patah semangat meskipun berasal dari pedesaan yang berada di tengah hutan.

"Kita memiliki berbagai keterbatasan di sini, seperti belum menikmati akses internet. Namun, kita harus memiliki mimpi, cita-cita, setinggi mungkin. Kalo perlu, tuliskan cita-cita itu di dinding atau buku dan yakinlah selalu ada jalan untuk meraihnya," ucapnya berapi-api.

Penyerahan Donasi Buku dan Bibit Pohon

Setelah sesi motivasi selesai, acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis donasi buku-buku pendidikan dan bibit pohon untuk lingkungan pesantren. Donasi buku itu terdiri dari lebih dari 250 judul buku untuk memperkaya koleksi

perpustakaan pesantren sehingga membantu santri mengembangkan pengetahuan dan wawasan mereka mengenai berbagai bidang.

"Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca, santri bisa memperluas wawasan dan tidak hanya terkungkung dalam satu perspektif. Saya berharap buku-buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para santri semua," kata Ustadz Agus.

Sementara itu, seratus bibit pohon buah-buahan yang dihibahkan diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk



mengembangkan *green entrepreneurship* di lingkungan Ponpes Darul Fallah. Pondok tersebut saat ini memiliki belasan hektar lahan yang siap dijadikan perkebunan, peternakan maupun aktivitas agribisnis lainnya. Seluruh aset tersebut didapatkan dari wakaf masyarakat dan dikelola oleh Badan Wakaf yang menaungi ponpes.

Menurut Ustadz Komarudin, pemberian bibit pohon buah-buahan ke ponpes sangat bermakna, karena selain berkontribusi untuk menjaga lingkungan, juga meningkatkan kesadaran kepada santri tentang pentingnya menjaga bumi sebagai amanah.

"Pohon yang kita tanam hari ini, adalah simbol dari upaya kita untuk menjaga keseimbangan alam demi masa depan yang lebih baik," ujarnya sebelum memimpin doa yang mengawali penanaman pohon.

Komitmen terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Penanaman pohon dilakukan secara simbolis oleh Prof. Martha Fani Cahyandito, H. Agus Maulana, Ustadz KH. Komarudin dan seluruh perwakilan komisariat ISEI di lokasi yang dinamai Dafa Dream Land, lahan yang dipersiapkan sebagai cikal bakal pengembangan *green entrepreneurship*.

"Kami ingin pesan ini sampai ke hati setiap santri, bahwa manusia memiliki tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT," ujar Prof. Fani.

Penanaman pohon itu diharapkan akan berjalan secara kontinyu, dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Sebab, pohon-pohon yang ditanam itu adalah bentuk investasi bagi masa depan yang lebih baik.

Dalam suasana informal selepas makan siang dengan menu kuliner lokal yang lezat, Ustadz Agus menegaskan pentingnya pondok pesantren sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian lingkungan kepada santri. Bukan saja terkait penghijauan tetapi juga pengolahan sampah dan energi terbarukan.

"Pesantren bukan hanya tempat untuk belajar ilmu agama, tetapi juga untuk mempersiapkan generasi yang mandiri, siap menghadapi tantangan zaman, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Pesantren menyambut hangat setiap mitra kolab-



orasi dengan harapan bukan saja memajukan pendidikan dan masyarakat tetapi juga mengubah masyarakat desa sekitar yang sebelumnya merupakan desa IDT," jelasnya.

Kolaborasi untuk Masa Depan

Kunjungan ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat ke Pondok Pesantren Modern Darul Fallah Cimenteng Subang merupakan awal kolaborasi lain yang melibatkan komisariat-komisariat dan kampus-kampus dalam jejaring ISEI untuk bersama-sama menciptakan perubahan yang signifikan di tengah masyarakat.

"Saya akan mengusulkan pesantren dan desa ini sebagai lokasi pengabdian masyarakat kampus saya (Telkom University),"

ujar Prof. Anton. Prof. Anton memandang bahwa ISEI, perguruan tinggi dan pesantren dapat berkontribusi melalui peran masing-masing dalam mencetak generasi baru yang tidak hanya memiliki tingkat literasi yang tinggi tetapi juga berkarakter unggul dan responsif terhadap setiap tantangan jaman.

Selain Telkom University, beberapa komisariat dan kampus lain juga tertarik untuk menjadikan Pondok Pesantren Darul Fallah sebagai mitra kegiatan atau lokasi penelitian. Tampaknya, kolaborasi akan terus terjalin. Semoga, dapat menjadikan sumbangsih yang bermakna dalam mengawal masa depan Jawa Barat yang berkelanjutan dan penuh harapan.



Laporan Kegiatan ISEI Pusat

Diskusi Panel: Strategi Pengembangan Hilirisasi Industri, Ketahanan Pangan, dan SDM Unggul



Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) telah menorehkan peran penting selama 70 tahun dalam perjalanan bangsa. ISEI mengusung tiga manifesto, yaitu: (1) mengambil peran positif untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat, (2) mengembangkan ilmu ekonomi, dan (3) menyampaikan pemikiran ekonomi yang sejalan dengan falsafah Pancasila. ISEI terus berkontribusi dalam menjawab tantangan pembangunan nasional. Untuk memperingati tujuh dekade ISEI berkiprah, Pengurus Pusat ISEI mengadakan Diskusi Panel sebagai wadah diskusi strategis dengan membahas tiga isu utama yang harus dihadapi perekonomian nasional, ditengah kompleksnya tantangan geopolitik dan ekonomi global, yaitu peningkatan daya saing industri, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul.

Berdasarkan laporan *World Competitiveness Ranking* (WCR, 2024) yang dikeluarkan International Institute for Management Development (IMD), peringkat daya saing Indonesia naik dari posisi ke-34 menjadi ke-27. Peningkatan kinerja ekonomi yang signifikan tersebut tidak terlepas dari peran peningkatan daya saing khususnya di sektor industri. Untuk meningkatkan daya saing lebih lanjut dan menjadi terdepan di Asia, strategi pembangunan industri perlu terus dipertajam, khususnya dengan mengoptimalkan peran rantai nilai (*value chain*), baik lingkup global maupun domestik. Dalam kaitan ini, Pemerintah Prabowo-Gibran telah memperkuat komitmen untuk tetap

melanjutkan program hilirisasi industri untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Melalui program hilirisasi industri tersebut, diharapkan semua kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, Indonesia juga konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan (*just transition*).

Indonesia juga menghadapi masalah serius di sektor pangan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada kuartal-3 mengalami penurunan, yakni hanya sekitar 13,71% (BPS RI, 2024). Di sisi lain, angka malnutrisi masih mencapai 17,7% dari total populasi menurut UNICEF. Situasi ini menunjukkan urgensi untuk memperkuat ketahanan pangan melalui strategi yang lebih terintegrasi. Dalam konteks ini, program Astacita yang dicanangkan Pemerintah Prabowo-Gibran sangat penting dielaborasi dengan tekun dan cermat. Dengan menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas, termasuk adopsi teknologi pertanian modern dan perluasan akses pasar bagi petani, penerapan *lab-grown food* dan mendorong program makan bergizi gratis (MBG) untuk mendorong sisi permintaan menjadi relevan mengarahkan Indonesia akan dapat mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

Keterbatasan konektivitas di Indonesia

menjadi hambatan utama dalam pertumbuhan ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memaparkan bahwa lebih dari 30% daerah terpencil di Indonesia belum memiliki akses infrastruktur yang memadai. Dalam menghadapi ketertinggalan ini, pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk jalan tol trans-nasional, pelabuhan, dan koneksi digital. Investasi pada infrastruktur tidak hanya akan mempercepat distribusi barang dan jasa tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama di wilayah tertinggal.

Tantangan ketiga yang tidak kalah penting adalah mewujudkan SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Berdasarkan laporan Bank Dunia (2022), *Human Capital Index* (HCI) Indonesia hanya mencapai 0,53. Hal ini mengartikan bahwa anak Indonesia rata-rata hanya akan mencapai 53% dari potensi produktivitasnya saat dewasa. Hal ini diperburuk pasca-pandemi COVID-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran (*lag of education*) selama lebih dari dua tahun bagi sebagian besar pelajar. Sebagai bagian dari Astacita program penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru, mendorong sekolah unggulan di daerah dan pengembangan riset menjadi prioritas yang harus diakselerasi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Ketiga isu tersebut harus dihadapi di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Fenomena *secular stagnation* (*SecStag*) mengancam pertumbuhan ekonomi global dengan penurunan produktivitas yang meluas. Selain itu, dampak pandemi masih terasa melalui ketidakseimbangan ekonomi, dan potensi perang dagang baru yang dipicu oleh kebijakan proteksionis Presiden Donald Trump dapat memperburuk ketidakpastian perdagangan internasional. Dalam konteks ini, Indonesia harus mengadopsi strategi yang adaptif dan inovatif, seperti memperkuat kerjasama regional melalui ASEAN dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi sektor ekonomi.

Oleh: Firman Sihol Parningotan

Pelantikan Pengurus Pusat ISEI Periode 2024–2027: ISEI Siap Dukong Program Asta Cita



ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) mengukuhkan komitmennya untuk mendukung program strategis Asta Cita dalam acara pelantikan Pengurus Pusat ISEI Periode 2024–2027, yang digelar di Jakarta, Jumat (17/01). Dalam sambutannya, Ketua Umum ISEI Perry Warjiyo menyoroti pentingnya peningkatan daya saing Indonesia untuk menjadi yang terdepan di Asia. Peringkat daya saing Indonesia saat ini naik ke posisi 27 berdasarkan World Competitiveness Ranking (WCR, 2024) yang dirilis oleh International Institute for Management Development (IMD), dari sebelumnya berada di posisi 34.

Ketua Umum ISEI menyatakan bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya peningkatan daya saing, khususnya di sektor industri. Pada kesempatan ini, ISEI juga menyerahkan dua buku penting sebagai kontribusi dalam pemikiran ekonomi nasional, yaitu **Buku 70 Tahun ISEI Membangun Ekonomi**

Negeri dan Buku Kelampauan, Kekinian, dan Hari Depan – Sumbangan Pemikiran Sarjana Ekonomi Indonesia 1955–2025.

Buku tersebut diberikan kepada para tokoh nasional dan Ketua Umum ISEI terdahulu, seperti Emil Salim, Marzuki Usman, Burhanuddin Abdullah, Darmin Nasution, Muliaman D. Hadad, serta sejumlah tokoh ISEI lainnya, termasuk Jusuf Kalla dan Boediono.



Dukungan terhadap Program Asta Cita

ISEI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung program Asta Cita. Perry Warjiyo menegaskan bahwa dukungan ini diwujudkan melalui lima program strategis utama:

- 1. Menjaga Stabilitas Perekonomian dan Sistem Keuangan** ISEI akan mendukung kebijakan yang mengarahkan perekonomian menuju pertumbuhan yang lebih kuat dan stabil.
- 2. Mengembangkan Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)** Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah di sektor perekonomian melalui hilirisasi SDA.
- 3. Memperkuat Ketahanan Pangan** ISEI mendorong strategi terintegrasi untuk menjadikan sektor pangan sebagai prioritas nasional. Langkah ini mencakup adopsi teknologi pertanian modern, perluasan akses pasar bagi petani, penerapan *lab-grown food*, serta program makan bergizi gratis (MBG) untuk mendukung sisi permintaan.
- 4. Mengakselerasi Digitalisasi** Digitalisasi dipandang sebagai langkah penting untuk menciptakan inklusivitas dalam perekonomian dan keuangan.
- 5. Penguatan SDM melalui Sertifikasi Profesi** Melalui kerja sama dengan berbagai lembaga, ISEI mendukung pengembangan SDM untuk memperkuat daya saing bangsa, termasuk dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

Fokus pada Ketahanan Pangan dan SDM

ISEI juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi sektor pangan. Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada kuartal ketiga menurun hingga 13,71%, sementara angka malnutrisi masih mencapai 17,7% dari total populasi menurut UNICEF. Oleh karena itu, ISEI mendorong penguatan ketahanan pangan dengan strategi yang lebih terintegrasi dan inovatif.

Di bidang pengembangan SDM, ISEI mencatat bahwa *Human Capital Index* (HCI) Indonesia hanya mencapai 0,53, menurut laporan Bank Dunia. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia rata-rata hanya mencapai 53% dari potensi produktivitas mereka di masa dewasa.



Hal ini diperburuk oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran selama lebih dari dua tahun.

Untuk itu, program penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru, pembangunan sekolah unggulan di daerah, dan pengembangan riset menjadi fokus utama ISEI dalam mendukung visi Asta Cita. ISEI juga menekankan pentingnya adopsi strategi inovatif dan adaptif, termasuk penguatan kerja sama regional

melalui ASEAN serta pemanfaatan teknologi digital.

Meningkatkan Daya Saing Industri

Dalam mendukung daya saing industri, ISEI menekankan pentingnya strategi pembangunan yang mengoptimalkan peran rantai nilai, baik dalam skala global maupun domestik. Perry Warjiyo menegaskan bahwa dengan pendekatan yang adaptif, inovatif, dan terintegrasi, Indonesia dapat menjadi negara terdepan di Asia.

ISEI percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha akan menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

Oleh: Bidang Komunikasi Strategis PP ISEI

The 47th Federation of ASEAN Economic Association Conference



Konferensi FAEA ke-47 kali ini digelar di Bangkok, Thailand dengan mengusung tema "Sustainable Transformation of ASEAN Economies Under Major Challenges: Climate Change, Geopolitical Conflicts, Digital Technology, Aging, and ASEAN Centrality". Tema ini diangkat karena meningkatnya berbagai distrupsi baik dari segi krisis lingkungan, ketegangan geopolitik & geoekonomi, distrupsi teknologi, dan meningkatnya populasi lansia dimana berbagai aspek tersebut perlu menjadi perhatian negara kawasan dengan mengutamakan sentralitas ASEAN di Tengah berbagai kompleksitas dan rivalitas global.

Perwakilan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang merupakan anggota

dari FAEA juga turut hadir yang diwakili oleh Bapak Muhammad Edhie Purnawan selaku Ketua Bidang Kerjasama Internasional PP ISEI, Prof. Abdul Mongid yang merupakan anggota bidang kerjasama internasional PP ISEI, Bapak Priyanto Soedarsono yang juga anggota bidang kerjasama internasional PP ISEI, dan Jonathan Ersten Herawan selaku Analis PP ISEI.

Dalam acara yang digelar tanggal 22-23 Januari 2025 di Emerald Hotel ini banyak pesan dan lesson learned yang disampaikan oleh Dr. Narongchai Akasenee dalam sesi panel discussion, dimana terjadi perubahan paradigma dari kerjasama yang bersifat multilateralisme menjadi kerjasama yang sifatnya bilateral. Amerika Serikat yang masih menjadi kekuatan ekonomi dunia saat ini mulai melakukan rasionalisasi kebijakan domestic dan luar negerinya, mereka dibawah kepemimpinan Presiden Ke-47 saat ini yakni Donald Trump akan mengutamakan kepentingan ekonomi terutama dalam mendorong investasi domestik, memperkuat manufaktur serta daya beli masyarakat, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dan mempertahankan supremasi US dolar sebagai mata uang utama global.

Pada sesi panel discussion, terdapat dua pembicara lain yakni Muhammad Edhie Purnawan selaku Ketua Bidang Kerjasama Internasional ISEI dan Prof. Dr. Bui Quang Tuan selaku Wakil Ketua Viet Nam Economic Association (VEA) yang menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi ASEAN untuk menghadapi kompleksitas permasalahan global terutama permasalahan dari perubahan iklim yang sangat esensial mengganggu komoditas pangan. Federation of ASEAN Economic Association (FAEA) juga tetap bersepakat untuk tetap menjaga sentralitas ASEAN ditengah potensi terjadinya economic decoupling dimana munculnya Tiongkok dan BRICS yang dinilai akan mengganggu hegemoni Amerika Serikat.

The 47th FAEA Conference ini juga mengadakan sesi pararell discussion yang

Judul Artikel	Penulis
Economic Diversification and Unemployment Dynamics: Pathways for Sustainable Transformation in ASEAN-6	Muhamad Rizki Karim Amrulloh, Rima Prama Artha, Dionisius A, Narjoko
Can Advancement of a Democratise Digital Economy Affect Income?: An Insight in Selected ASEAN +6	Jonathan Ersten Herawan, Matthew Kartawinata, Laurensius Farel Dwi Putranto
Ageing Population and Economic Growth in OECD, ASEAN, and BRICS Countries: Does Human Capital Matter?	Qori'atul Septiavina; Muhammad Fadli Hanafi
The Determinant of Bank Profitability in ASEAN: Evidences From Non- Linear Regression	Prof. Abdul Mongid
How Climate Change Affects The Economy: A Case of Indonesia	Try Zulmeida
Economic Development and Environmental Sustainability: Does ESG Practice make a difference?	Muhammad Fadli Hanafia; Qori'atul Septiavinb
The Analyses of Governance In Fintech (P2P) Lending Industry In Indonesia	Priyanto Soedarsono
The Impact of The Increasing Number of Informal Workers on The Implementation Of Employment Social Security In ASEAN	Andri Ronaldo Pasaribu

diselenggarakan dalam 4 sesi dalam 4 ruangan dengan 32 paper yang dipresentasikan dimana diantaranya 8 paper berasal dari Indonesia.

Artikel yang berasal dari Indonesia menjadi pembicaraan hangat karena relevansinya dengan tema yang diangkat dalam The 47th FAEA kali ini. Setelah pararell session acara ditutup dengan closing remarks dan estafet palu kepemimpinan dari Thailand ke Malaysia yang menandakan bahwa The 48th FAEA akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Selanjutnya, pada malam hari para delegasi diajak untuk menikmati malam bersama dengan menikmati hidangan khas Thailand yang menggugah selera. Delegasi juga disuguhkan tarian asal Thailand yang menjadi sambutan hangat bagi delegasi selama di Thailand.

Pada hari kedua, delegasi diajak untuk menikmati Wat Arun Ratchawaram Ratchawaramahawihan dan Wat PhraChetuphon

Wimon Mangkhalaram Rajwaramahawihan (Wat Pho) yang menjadi dua candi yang dihormati dan diagungkan masyarakat Thailand. Kegiatan selanjutnya ditutup dengan makan siang bersama di Krua Khun Kung yang merupakan restoran kelolaan angkatan laut Thailand.

Kerjasama dan kolaborasi yang terjadi dalam economist society ini menjadi wadah penting bagi negara anggota FAEA dan bagi ASEAN untuk terus mendorong Pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas serta keamanan kawasan yang strategis ini.

Khop Khun Kap Bangkok! See You Kuala Lumpur

Oleh: Jonathan Ersten Herawan



ISEI Ajak Akademisi Produktif Menulis



Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bersinergi dengan ISEI Lampung, Bank Indonesia Provinsi Lampung, dan FEB Universitas Lampung mengadakan "2 Days Workshop Teknik Menulis Populer, Policy Brief, dan Press Release yang Berdampak". Kegiatan yang berlangsung tanggal 24-25 Februari 2025 ini, merupakan wujud peran ISEI untuk melatih akademisi dan peneliti untuk dapat produktif menulis terutama dalam strategi mengubah penelitian atau karya ilmiah menjadi artikel populer.

Kegiatan yang diselenggarakan di Smart Room Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung (FEB UNILA) diikuti oleh 80 peserta yang merupakan mahasiswa,

Siregar, M.Ec. selaku Ketua Bidang Akademik dan Riset ISEI.

Workshop diawali dengan materi strategi dan praktik menulis populer yang dibawakan oleh Bapak Dr. Agus Herta Sumarto, M.Si. yang juga merupakan Pengurus Pusat ISEI Bidang III dan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia. Pada sesi materinya, Bapak Agus menekankan pentingnya akademisi menerjemahkan hasil penelitiannya dalam karya populer agar dapat dibaca oleh khalayak dan tidak hanya berhenti hingga publikasi artikel saja.

Sesi kedua dibawakan oleh Bapak Dr. Junanto Herdiawan, M.A. dengan materi

utama dan judul yang menarik perhatian bagi pembaca menjadi sangat penting dalam strategi press release.

Kegiatan hari pertama ditutup dengan Sosialisasi "Digitalisasi Transaksi Menggunakan QRIS & Perlindungan Konsumen Bank Indonesia" yang dibawakan oleh Bank Indonesia Provinsi Lampung dimana tingginya kontribusi ekonomi digital di Indonesia dan berkembangnya inovasi teknologi pembayaran yang berbasis consumer centric yang mendukung aktivitas perekonomian Masyarakat.

Pada hari kedua, Prof. Dr. Sahara, M.Si. yang merupakan Pengurus Pusat ISEI Bidang V dan Guru Besar IPB University mendorong peserta pelatihan terutama yang berasal dari kampus atau universitas untuk dapat mendorong publikasi policy brief. Policy Brief yang berguna sebagai alat komunikasi informasi kebijakan yang efektif perlu dibuat untuk menyampaikan pesan yang jelas dan singkat pada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.

Kegiatan 2 Days Workshop Teknik Menulis Populer, Policy Brief, dan Press Release yang Berdampak ditutup oleh Bapak Junanto Herdiawan, Bapak Agus Nompitu, dan Bapak Hermanto Siregar dimana menekankan kegiatan hari ini bukanlah akhir namun awal semangat bagi peserta untuk dapat meningkatkan karya tulis baik bersifat ilmiah dan populer. ISEI berharap kegiatan ini menjadi semangat bagi anggota ISEI untuk terus dapat meningkatkan publikasi yang akan berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas tulisan anggota ISEI.

Cek disini untuk informasi selengkapnya



Oleh: Jonathan Ersten Herawan



akademisi, dan peneliti. Workshop ini dibuka oleh Bapak Prof. Dr. Nairobi, M.Si. selaku Dekan FEB UNILA, Bapak Dr. Agus Nompitu, M.T.P. selaku Ketua ISEI Cabang Lampung, dan Prof. Dr. Ir. Hermanto

pembuatan press release yang sukses dan efektif. Dalam sesinya, Bapak Junanto yang merupakan Pengurus Pusat ISEI Bidang Komunikasi Strategis juga menekankan bahwa kita berada pada era *Post-Truth* dimana penggunaan kata kun-

Pelaksanaan Seminar Kajian Kebijakan Publik 5.0



Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Kajian Kebijakan Publik 5.0 pada tanggal 27 Februari 2025 di Auditorium Fakultas Bisnis dan Ekonomi – Universitas Surabaya (Ubaya) yang dihadiri oleh 150 orang peserta dari akademisi, mahasiswa, masyarakat sipil, perwakilan BI, LPS, dan OJK, dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Acara dibuka dengan sambutan dari Wakil Dekan FBE UBAYA, Bp. Fidelis Arastyo Andono dan Ketua ISEI Surabaya, Bp. Soni Harsono, dilanjutkan Keynote Speech oleh Ibu Lana Soelistianingsih (Ketua FG Kebijakan Moneter dan Makroprudensial – Bidang III PP ISEI). Pada kesempatan ini juga disampaikan Buku KKP 5.0 oleh Ibu Lana Soelistianingsih dan Ibu Clarita Ligaya Iskandar (Kepala Bank Indonesia Institute) masing-masing kepada Ibu Ignatia Martha Hendrati (Guru Besar UPN Veteran Surabaya) dan kepada Bp. Fidelis Arastyo Andono.



2. Sesi seminar diawali dengan pemaparan Buku KKP 5.0 oleh pemateri Bp. Arief Hartawan (Kepala Departemen Regional – Bank Indonesia) dan penyampaian tanggapan oleh Ibu Ignatia Martha Hendrati, serta dimoderatori oleh

Bp Donni Fajar Anugerah (Deputi Direktur Departemen Ekonomi Inklusif dan Hijau – Bank Indonesia).



3. Pokok-pokok hasil seminar adalah sebagai berikut:
 - a. Buku KKP sangat relevan dengan topik-topik isu strategis saat ini dan rencana Pemerintah ke depan setiap tahunnya menuju Indonesia Emas 2045 dengan 4 pilar visi Indonesia 2045, yaitu: **1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2) Pembangunan Ekonomi berkelanjutan; 3) Pemerataan Pembangunan; dan 4) Pemantapan ketahanan nasional dan tata Kelola pemerintahan.**
 - b. Dalam mencapai Indonesia Emas tersebut, perlu dilakukan transformasi ekonomi Indone-

sia untuk keluar dari *middle income trap* dimana saat ini Indonesia berada di *upper- middle income level* dengan *Gini index ratio* membaik dan tingkat kemiskinan menurun sehingga diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju *high income level* sebagaimana yang ingin dicapai dalam visi Indonesia Emas. Tahapan Transformasi Indonesia telah tercantum dalam RPJPN 2025-2045.

- c. Bonus demografi menjadi faktor positif yang perlu dioptimalkan untuk mencapai Indonesia Emas, termasuk melalui dukungan pada hilirisasi pangan karena sektor pangan merupakan sektor yang padat karya dan padat modal. Model hilirisasi pangan yang dapat dilakukan adalah model hilirisasi berganda /multi-pronged approach.

- d. Hilirisasi pangan dilakukan untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan memperkuat akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor yang memiliki keunggulan komparatif yaitu sektor pertanian. Hilirisasi pangan mendorong ketahanan pangan dengan peningkatan pasokan dan swasembada pangan, serta mendukung pengendalian inflasi.
- e. Implementasi hilirisasi pangan di daerah dilakukan dengan pengembangan pelatihan, dukungan sarana dan prasarana, pendampingan, serta sosialisasi kepada UMKM untuk meningkatkan nilai tambah,

perluasan akses pasar, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan kelompok tani dan UMKM. Dukungan yang dapat dilakukan ISEI untuk hal tersebut adalah penguatan ekosistem hilirisasi pangan dari hulu ke hilir, a.l melalui: program magang inovatif di desa, katalisator kolaborasi antar generasi, dan inisiasi lomba inovasi pangan berbasis komunitas.

- f. Masukan untuk pengembangan lebih lanjut adalah strategi memastikan tercapainya tujuan hilirisasi pangan yang mendukung ketahanan pangan. Hal ini perlu didukung necessary condition (kondisi yang harus ada) berupa kebijakan ketahanan pangan dan transformasi sistem pangan, serta *sufficient condition* (kondisi yang harus diciptakan) berupa SDM yang mumpuni, sarana dan prasarana, tata kelola pangan berkelanjutan (termasuk tata niaga pangan, manajemen harga, demand-supply management antara petani dan konsumen a.l dengan kejelasan waktu kontrak, dan edukasi konsumen untuk konsumsi bijak), dan pendanaan. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan koordinasi dan kolaborasi terkait anggaran dan regulasi Pemerintah, dukungan kegiatan Pemerintah, dan dukungan swasta.



- g. Perlu dimitigasi potensi risiko dari hilirisasi pangan terhadap ketahanan pangan yaitu : **1) Kompetisi bahan baku (bahan Pokok Utama); 2) Eksploitasi yang mengabaikan keberlanjutan; 3) Kelangkaan akibat penimbunan Bahan Baku; 4) Perubahan aliran distribusi barang ke produsen hilir; dan 5) Kompleksitas instrumen pengendalian harga.**
- h. Saran yang diberikan untuk pemikiran ke depan adalah: **1) Hilirisasi pangan tidak mengganggu ketersediaan, kecukupan dan keterjangkauan pangan; 2) Hilirisasi Pangan tidak menjadi "competitor" dalam pemenuhan pangan pokok Masyarakat; dan 3) Penciptaan nilai tambah memperhatikan system pangan Lestari (Sustainable).**



Cek disini untuk informasi selengkapnya

Oleh: Donni Fajar Anugrah



Mengapa Industrialisasi di Tiongkok Berjalan Baik?

Industrialisasi Tiongkok memberikan pelajaran tentang pentingnya kebijakan yang terencana, infrastruktur yang baik, inovasi teknologi, serta kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemerataan sosial. Modal manusia memegang peranan kunci di dalamnya yakni berbasis produktivitas dan daya saing yang tinggi.

Belajarlah sampai ke Negeri China...

- Kebijakan Pemerintah yang Proaktif: Pemerintah China berhasil menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti reformasi pasar dan kontrol negara yang kuat. Ini mengajarkan pentingnya kebijakan yang terencana dan fleksibel dalam mempercepat industrialisasi.
- Pembangunan Infrastruktur: Infrastruktur yang kuat seperti transportasi dan energi mendukung kelancaran produksi dan distribusi. Ini menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur adalah kunci untuk pertumbuhan industri.
- Teknologi dan Inovasi: China mulai berinvestasi dalam teknologi domestik untuk meningkatkan daya saing. Ini mengajarkan bahwa inovasi adalah kunci untuk pertumbuhan jangka panjang.

ISEI Dorong Akselerasi Akreditasi & Indeksasi Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (EMBA)

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengadakan *Online Workshop* mengenai "Strategi Terkini Tata Kelola E-Journal Pada Open Journal System 3". Kegiatan yang berlangsung tanggal **28 Februari 2025** ini merupakan wujud peran ISEI untuk mendukung pengelola jurnal terutama Jurnal EMBA untuk menghadapi perubahan indikator penilaian akreditasi mendatang.

Kegiatan yang diselenggarakan secara online ini, diikuti oleh 30 pengelola jurnal yang tersebar di seluruh Indonesia yang sudah terakreditasi baik dari SINTA 6 hingga SCOPUS Q3. Workshop ini dibuka oleh Prof. Jaka Sriyana selaku Editor in Chief Indonesian Economic Journal (JEI ISEI) dan merupakan Pengurus Pusat ISEI Bidang Akademik dan Riset.



Proses Bisnis Akreditasi Jurnal Ilmiah



Pemateri Workshop ini dibawakan langsung oleh Bapak Yoris Adi Mareta, M.Pd. selaku Sie. Akreditasi dan Indeksasi Pengembang Jurnal UNNES dan Relawan Jurnal Indonesia yang membawakan materi Strategi pengelolaan E-Journal Pada OJS 3, Strategi Akreditasi & Indeksasi Jurnal, dan Praktik Upgrading OJS 3.4 yang merupakan Open Journal System terbaru. Kegiatan yang dimoderasi oleh Bapak Dr. Dekeng Setyo Budiarto, M.Si., Ak., CA. selaku *Editor in Chief Journal of Business and Information System* dan Dosen Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas PGRI Yogyakarta.

Kegiatan ini ditutup oleh Firman Sihol Parningotan, M.Ec., selaku Sekretaris Eksekutif PP ISEI, yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada nara-

sumber hebat, para ahli yang hadir, serta seluruh peserta, termasuk sekitar 30 pengelola jurnal, atas partisipasinya dalam workshop ini. Diharapkan ke depannya jurnal-jurnal yang dikelola dapat meraih akreditasi yang lebih baik dan semakin strategis. Pemaparan dari Pak Yoris serta pengalaman yang dibagikan oleh para peserta menjadi bekal berharga untuk mengimplementasikan hasil workshop ini, sehingga jurnal yang ada dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

Dengan berjalannya kegiatan workshop ini, ISEI berharap semakin banyak Prodi EMBA yang dapat mengelola jurnal sendiri dan meningkatkan akreditasi serta indeksasi Jurnal EMBA yang telah dikelola. Kegiatan ini juga diharapkan dapat

mendorong peningkatan aspek *research mindset* yang hilirnya dapat meningkatkan *research quality* di Indonesia.



Cek disini untuk informasi selengkapnya

Oleh: *Fabritio Paulus Kumowal & Faiz Nursyahbari*



Cek disini untuk informasi selengkapnya



Session 01 : Indonesian Family Life Survey (IFLS)

Metode statistik untuk mengatasi bias dalam studi observasional

Tema: "Ekonomi Kesehatan RT Indonesia"

Hari: Sabtu, 08 Maret 2025

Waktu: 13.30 – 17.00 WIB

Harga: ~~Rp350.000~~ **Rp250.000**

Session 02 : Propensity Score Matching

Analisis survei longitudinal berkala nasional yang mengumpulkan data individu, rumah tangga, dan komunitas di Indonesia

Tema: "Dampak Program Keluarga Harapan"

Hari: Minggu, 09 Maret 2025

Waktu: 13.30 – 17.00 WIB

Harga: ~~Rp350.000~~ **Rp250.000**

Session 03 : Experimental Economics

Eksperimen yang mempelajari individu membuat keputusan ekonomi dalam berbagai situasi.

Tema: "Eksperimen Ekonomi dalam Era Digital: Uang, Kebijakan, dan Perubahan Perilaku"

Hari: Sabtu, 22 Maret 2025

Waktu: 13.30 – 17.00 WIB

Harga: ~~Rp500.000~~ **Rp350.000**

Session 04 : Regresi Panel Dinamis

Analisis data panel ketika ada hubungan dinamis antar variabel

Tema: "Penerapan Sustainable Blue Economy"

Hari: Minggu, 23 Maret 2025

Waktu: 13.30 – 17.00 WIB

Harga: ~~Rp500.000~~ **Rp350.000**

Session 05 : Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Analisis data ketenagakerjaan dari SAKERNAS yang dipublikasi BPS

Tema: "Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia"

Hari: Sabtu, 12 April 2025

Waktu: 13.30 – 17.00 WIB

Harga: ~~Rp500.000~~ **Rp350.000**

Session 06 : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Analisis kondisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator seperti konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Tema: "Kondisi Kualitas Modal Manusia"

Hari: Minggu, 13 Maret 2025

Waktu: 13.30 – 17.00 WIB

Harga: ~~Rp500.000~~ **Rp350.000**

Workshop Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi & Persiapan

Akreditasi LAMEMBA
Tanggal : 21 Februari 2025

Tempat : Aula Prof. Dr. Suhadji Hadibroto FEB Universitas Sumatera Utara

Nama Kegiatan: Workshop Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Perguruan tinggi & Persiapan Akreditasi Lamemba

Narasumber:
Prof. Dr. Ria Mardiana Y, S.E., M.Si.
Anggota Dewan Eksekutif Lamemba
Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua Dewan Eksekutif Lamemba

Moderator:
Prof. Dr. Yeni Abisah, S.E., M.Si.
Akademisi USU



WARTA ISEI

EDISI APRIL

Warta ISEI merupakan publikasi yang membahas fenomena atau isu hangat, penting, dan perkembangan terkini yang ditulis dalam karya tulis populer.

Ketentuan Naskah

- Berisi 800-1.000 kata.
- Menggunakan pedoman PUEBI.
- Berbentuk dokumen word dengan font Tahoma, size 12, single-spaced pada kertas bentuk A4 dengan margin halaman 3 cm.
- Dapat melampirkan gambar yang terkait dengan konten naskah.

Tema Naskah

“Ketahanan Pangan Sebagai Strategi Transformasi Bangsa.”

Pengiriman Naskah

warta@isei.or.id

Deadline: 15 April 2025

Contact Person



+62 821-1273-4541 (Firman S.P.)



@ppisei_official

Template Naskah

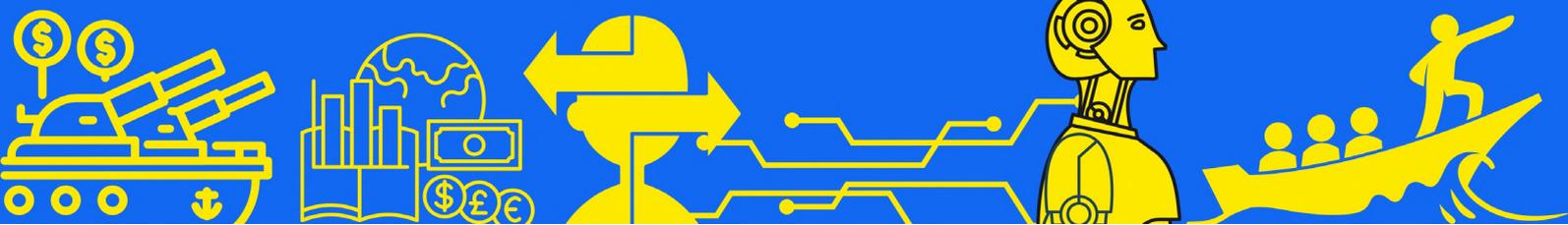


bit.ly/publikasiwartaisei

Tertarik Beriklan di Warta ISEI?



bit.ly/MediaOrderWartaisei



WARTA ISEI

Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah

Volume 2 No. 1 | Februari 2025



IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

Gedung Kantor Pusat ISEI

Jl. Daksa IV No. 9, Jakarta 12110

Telp : (021) 2277 2577

Fax : (021) 720 1812

E-mail : isei.pusat@gmail.com

 [ppisei_official](https://www.instagram.com/ppisei_official)

 [PP ISEI](https://www.youtube.com/PPISEI)

 isei.or.id